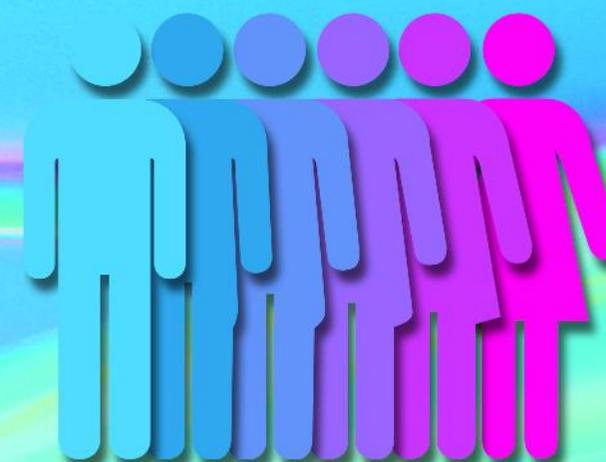


ISSN 2089-3531



# PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2013



PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2013



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Medan Merdeka Barat 15 Jakarta 10110

Tel.: (021) 3842638, 3805563 Fax.: (021) 3805562, 3805559

Jl. Abdul Muis 7 Jakarta 10110

Tel.: (021) 34835456 Web.: <http://www.menegpp.go.id/>

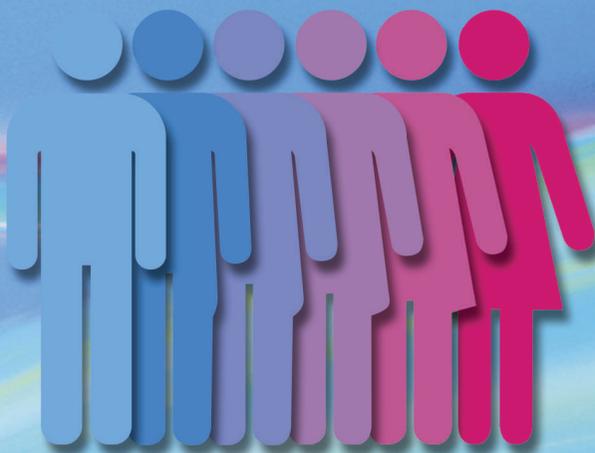


KERJASAMA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK





# PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2013



KERJASAMA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK







**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**



## SAMBUTAN

**M**anusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Artinya, faktor pembangunan SDM harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan prinsip pembangunan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksana pembangunan yaitu pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025.

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif serta terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Publikasi ini menyajikan Indikator Pembangunan Manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dirinci sampai tingkat Kabupaten/Kota. IPM menggambarkan pembangunan kapabilitas dasar manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Di sisi lain IPG juga mengukur kapabilitas dasar manusia pada ketiga bidang tersebut, tetapi terfokus pada faktor

ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan membandingkan kedua indikator tersebut dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan SDM antara laki-laki dan perempuan. IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Di tingkat nasional terjadi peningkatan IPM, IPG dan IDG. Meskipun demikian perlu diperhatikan pencapaian ketiga indikator tersebut antar daerah, karena masih terjadi disparitas pencapaian antar wilayah. Hal ini penting sebagai bahan advokasi dalam upaya percepatan dan peningkatan pembangunan di wilayah masing-masing.

Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat sebagai evaluasi dan penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di masing-masing wilayah, dan tentunya juga bagi para pemangku kepentingan terkait. Akhirnya kepada berbagai pihak terutama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan jajarannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas partisipasinya dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, November 2013

Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia



(Linda Amalia Sari Gumelar)

## KATA PENGANTAR

Publikasi “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2013” merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini berisi ulasan tentang perkembangan pencapaian tiga (3) indeks komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas manusia berbasis gender dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Publikasi ini dapat digunakan sebagai alat *monitoring* hasil pembangunan yang meliputi pencapaian kualitas hidup semua penduduk, perbedaan (*gap*) pencapaian antara laki-laki dan perempuan, serta kemajuan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan prioritas program-program pembangunan selanjutnya.

Disadari publikasi ini masih memiliki banyak kelemahan. Untuk itu kritik dan saran demi perbaikan di masa datang sangat diharapkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu.



Jakarta, November 2013  
Kepala Badan Pusat Statistik

(Dr. Suryamin, M.Sc.)



# Daftar Isi

SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	8
1.3 Sistematika Penulisan.....	8
1.4 Sumber Data .....	8
BAB 2 GAMBARAN UMUM GENDER DI INDONESIA.....	11
2.1 Perbandingan Capaian di Negara ASEAN .....	13
2.2 Permasalahan Gender di Indonesia .....	18
BAB 3 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER .....	27
3.1 Perkembangan Pembangunan Gender.....	31
3.2 Pencapaian Komponen IPG.....	34
3.3 Disparitas Pencapaian Pembangunan Gender Antar Wilayah .....	42
3.4 Disparitas Pembangunan Manusia dan Pembangunan Gender .....	45
BAB 4 PENCAPAIAN PEMBERDAYAAN GENDER .....	49
4.1 Perkembangan Pemberdayaan Gender .....	52
4.2 Pencapaian Komponen IDG.....	54
4.3 Disparitas IDG.....	59

BAB 5 KETERKAITAN ANTARA IPM, IPG, DAN IDG .....	65
5.1 Hubungan antara IPM dengan IPG .....	67
5.2 Hubungan antara IPM dengan IDG.....	76
5.3 Hubungan antara IPG dengan IDG .....	80
BAB 6 KESIMPULAN .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	89
TIM PENULIS .....	91
LAMPIRAN .....	93
CATATAN TEKNIS.....	141

# Daftar Gambar

Gambar 2.1	Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN, 1990-2012 .....	14
Gambar 2.2	Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN Menurut Indeks Dimensi .....	15
Gambar 2.3	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender di Negara-Negara ASEAN Tahun 2000-2012.....	17
Gambar 2.4	Perbandingan Indeks Ketimpangan di Negara-Negara ASEAN dengan Rasio Perempuan dan Laki-laki di Parlemen, 2012 .....	17
Gambar 2.5	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh, 2012.....	20
Gambar 2.6	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-laki, 2008-2012 Tw I .....	21
Gambar 2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan, 2008-2012 .....	21
Gambar 2.8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak Seminggu yang Lalu, 2012 .....	22
Gambar 2.9	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama, 2012.....	22
Gambar 2.10	Persentase TKI Menurut Jenis Kelamin, 2008-2012	24
Gambar 2.11	Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin, 2008-2012 .....	25

Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2004-2012 .....	32
Gambar 3.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup Saat Lahir ( $e_0$ ), 2004-2012 .....	35
Gambar 3.3	Perkembangan Angka Melek Huruf, 2004-2012 .....	37
Gambar 3.4	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah, 2004-2012 .....	38
Gambar 3.5	Perkembangan Sumbangan Pendapatan, 2004-2012 .....	40
Gambar 3.6	IPG Provinsi Menurut Peringkat, 2012 .....	42
Gambar 3.7	Nilai IPM dan IPG Menurut Provinsi, 2012 .....	47
Gambar 3.8	Disparitas Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Provinsi, 2012 .....	47
Gambar 4.1	Tren Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2010-2012 .....	53
Gambar 4.2	Pencapaian Komponen IDG tahun 2012 .....	54
Gambar 4.3	Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, 2004-2012 .....	56
Gambar 4.4	Perkembangan TPAK dan Persentase Angkatan .....	57
Gambar 4.5	Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin, 2007- .....	58
Gambar 4.6	Persentase Pejabat Struktural PNS Menurut Jenis .....	58
Gambar 4.7	IDG Provinsi menurut Peringkat, 2012 .....	60

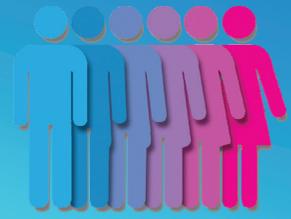
Gambar 5.1	Tren IPM dan IPG Indonesia, 2004-2012 .....	68
Gambar 5.2	Tren Selisih IPM dan IPG Indonesia, 2004-2012 .....	69
Gambar 5.3	Hubungan Antara IPG 2012 dengan IPM 2012 Kabupaten di Indonesia .....	73



# Daftar Tabel

Tabel 2.1	Upah Pekerja Menurut Jenis Kelamin, 2008-2012 .....	23
Tabel 3.1	Perkembangan IPM, IPG, dan Rasio IPG Terhadap IPM, 2004-2012.....	33
Tabel 3.2	Provinsi dengan IPG Tertinggi dan Terendah, 2011-2012 .....	43
Tabel 3.3	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPG Tertinggi, 2011-2012 .....	45
Tabel 3.4	Peringkat Tertinggi dan Terendah Rasio IPG Terhadap IPM Menurut Provinsi, 2012 .....	46
Tabel 4.1	Perkembangan Jumlah Anggota DPR RI, 1955-2009.....	55
Tabel 4.2	Provinsi dengan IDG Tertinggi, 2011-2012 .....	61
Tabel 4.3	Provinsi dengan IDG Terendah, 2011-2012.....	62
Tabel 4.4	Kabupaten/Kota dengan IDG Tertinggi, 2011-2012 ...	63
Tabel 4.5	Kabupaten/Kota dengan IDG Terendah, 2011-2012 ..	64
Tabel 5.1	Hubungan Antara IPM dengan IPG, 2006-2009-2012 .....	70
Tabel 5.2	Selisih IPM dan IPG menurut Provinsi Tahun 2006, 2009, 2012 .....	74
Tabel 5.3	Hubungan Antara IPM dengan IDG, 2006-2009-2012 .....	76
Tabel 5.4	Hubungan Antara IPG dengan IDG, 2006-2009-2012 .....	81





# Ringkasan Eksekutif

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Belum lagi, persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peranserta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan. Tuntutan akan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang. Tetapi pada kenyataannya, selama ini peranserta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya peranserta

perempuan dalam pembangunan karena masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra seajarnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2004, IPM nasional mencapai 68,69 kemudian meningkat menjadi 73,19 pada tahun 2012. Hanya sayangnya, keberhasilan pembangunan kualitas hidup yang diukur melalui IPM masih belum cukup efektif memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian kapabilitas dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Fenomena kesenjangan ini secara statistik dapat ditunjukkan oleh pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang nilainya lebih kecil dari pencapaian IPM, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Meski demikian, perkembangan pencapaian IPG dari tahun ke tahun terus meningkat, akan tetapi tidak secepat peningkatan IPM.

Dalam aspek pemberdayaan terutama keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, perempuan juga relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Ketertinggalan ini sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan apapun yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hasil pemilu legislatif tahun 2009 menempatkan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR hanya sekitar 17,49 persen dari keseluruhan jumlah anggota DPR RI. Bahkan di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD jauh lebih kecil. Sementara itu, perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi yang bekerja di lembaga eksekutif, yudikatif serta lembaga swasta lainnya tidak lebih dari 45,75 persen dari seluruh tenaga tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi. Namun demikian, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat.

# Pendahuluan





Latar Belakang



Tujuan Penulisan

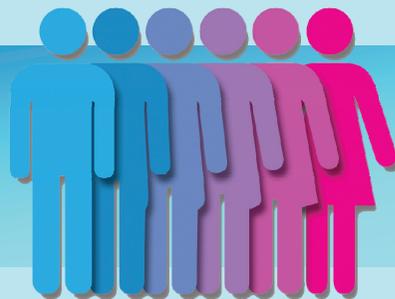


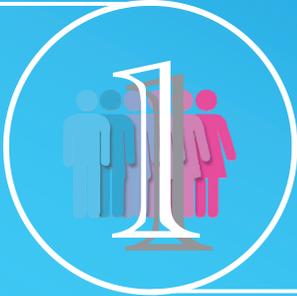
Sistematika Penulisan



Sumber Data

# Pendahuluan





# Pendahuluan

## • 1.1 Latar Belakang

*M*anusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana tetapi sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. **(Laporan Pembangunan Manusia, 1990)**

Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 tersebut menekankan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan.

Permasalahan gender sesungguhnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara di dunia. Hal ini terlihat dengan dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*). Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan Negara-negara di dunia, mencakup:

1. Perempuan dan Kemiskinan;
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan;
3. Perempuan dan Kesehatan;
4. Kekerasan Terhadap Perempuan;
5. Perempuan dan Konflik Bersenjata;
6. Perempuan dan Ekonomi;
7. Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan;
8. Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan;
9. Hak Asasi Perempuan;
10. Perempuan dan Media;
11. Perempuan dan Lingkungan Hidup; serta
12. Anak Perempuan.

UNDP dalam publikasi *Human Development Report (HDR)* tahun 1995 mengangkat tema mengenai gender. Publikasi tersebut menekankan bahwa pembangunan manusia merupakan upaya untuk memperluas pilihan bagi semua masyarakat, bukan hanya salah satu bagian dari masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang terkecualikan. Dalam publikasi tersebut juga tersirat pesan bahwa pengabaian aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah.

Melalui publikasi tersebut UNDP sekaligus memperkenalkan suatu indeks untuk mengukur pembangunan gender di suatu wilayah yaitu *Gender Development Index* (Indeks Pembangunan Gender/IPG) dan *Gender Empowerment Measure/GEM* (Indeks Pemberdayaan Gender/IDG). IPG adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara capaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Pembangunan Millennium (*Millennium Development Goals*) atau MDG's pada tahun 2015 adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Deklarasi yang telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB pada tahun 2000 tersebut menjadi bukti keprihatinan negara-negara di dunia terhadap permasalahan ketidakadilan gender yang terutama kerap menimpa perempuan. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara social, sehingga timbul perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin. Adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk pada kedua belah pihak menyebabkan pandangan yang mendiskreditkan salah satu kaum yang umumnya adalah kaum perempuan.

Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender. Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan INPRES No.9 tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan perundangan sudah responsif gender dan mendukung pengarusutamaan gender dapat dilihat dari data-data terpilah. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian-capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran yang nyata tentang pengarusutamaan gender di Indonesia. Diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai pembuka wawasan tentang pembangunan manusia yang berbasis gender.

## • 1.2 Tujuan Penulisan

Publikasi ini disusun untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan manusia serta perbedaan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu dalam publikasi ini juga akan ditelusuri hubungan antara IPM, IPG, dan IDG selama beberapa periode.

## • 1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan pembangunan manusia berbasis gender ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab 1, menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, sistematika penulisan, serta sumber data. Bab 2, menjelaskan tentang gambaran umum gender di Indonesia dan capaiannya terutama jika dibandingkan dengan capaian negara-negara lain di ASEAN. Bab 3, menjelaskan tentang pencapaian IPG. Bab 4, menjelaskan tentang pencapaian IDG. Bab 5 menjelaskan mengenai hubungan antara IPM, IPG, dan IDG.

## • 1.4 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan (khususnya dalam penghitungan IPG dan IDG) adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) Kor, Susenas Modul Konsumsi dan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sementara untuk data penunjang digunakan data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Proyeksi Penduduk (SP 2000), dan Indeks Harga Konsumen (IHK) serta data sekunder lainnya. Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung indikator pembentuk IPG, yaitu Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara angka harapan hidup dihitung menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Sedangkan data Sakernas digunakan untuk menghitung komponen IPG dan IDG yang menyangkut indikator ketenagakerjaan.



# Gambaran Umum Gender di Indonesia



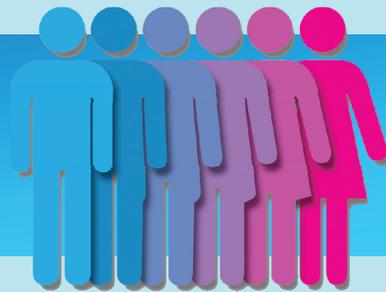


• **Perbandingan Capaian di Negara ASEAN**



• **Permasalahan Gender di Indonesia**

## **Gambaran Umum Gender di Indonesia**





# Gambaran Umum Gender di Indonesia

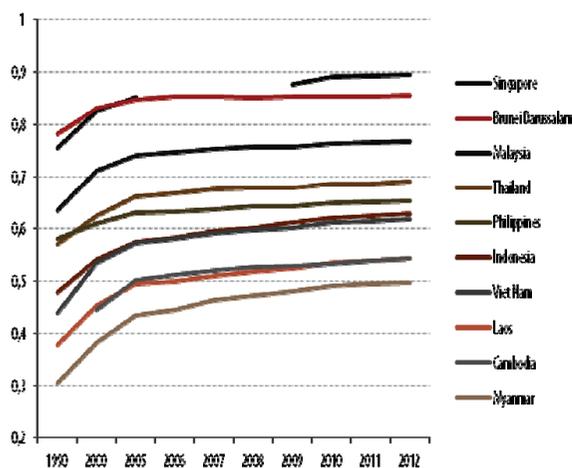
## • 2.1 Perbandingan Capaian di Negara ASEAN

### Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator GNI per kapita.

Pada Gambar 2.1 terlihat perbandingan IPM antarnegara ASEAN selama tahun 1990-2012. Menurut UNDP, Singapura dan Brunei Darussalam merupakan Negara dengan capaian IPM sangat tinggi. Sedangkan Malaysia menjadi negara dengan nilai IPM yang tinggi selama tahun 1990-2012. Nilai

IPM ketiga negara tersebut masing-masing adalah 0,895; 0,855; dan 0,769 untuk tahun 2012. Sedangkan nilai IPM terendah diperoleh Myanmar diantara negara lain di wilayah ASEAN yaitu 0,498 pada tahun 2012. Peringkat terendah berikutnya adalah Laos dan Kamboja dengan nilai IPM di tahun 2012 berturut-turut adalah 0,543 dan 0,543. Untuk negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke-6, dengan nilai capaian sebesar 0,629. Posisi yang sama seperti pada dua dekade sebelumnya.

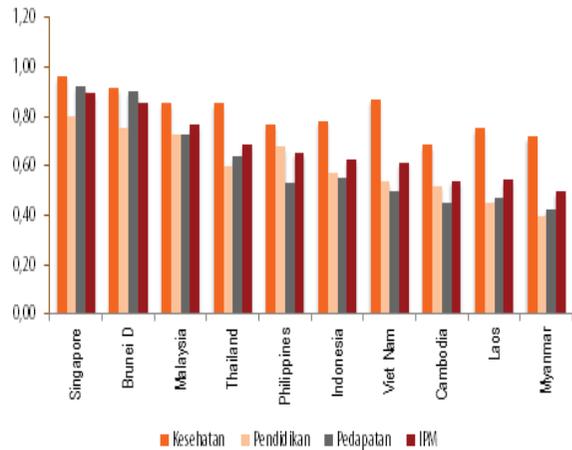


**Gambar 2.1**

Perbandingan IPM Negara-negara ASEAN, 1990-2012

Sumber: Human Development Report

Untuk melihat keterbandingan capaian pembangunan manusia antarnegara, dapat dilakukan dengan melihat keterbandingan capaian antar indeks komponen IPM. Indikator dimensi kesehatan atau indeks dimensi kesehatan Indonesia berada pada urutan ke enam dengan nilai capaian sebesar 0,782. Negara-negara yang dimensi kesehatannya berada dibawah Indonesia adalah Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nilai tertinggi untuk dimensi kesehatan dicapai oleh Negara Singapura dengan nilai sebesar 0,963; sementara nilai terendah dicapai oleh Negara Myanmar sebesar 0,718. Komponen kedua adalah dimensi pendidikan yang diukur berdasarkan harapan lamanya sekolah (*Expected years of Schooling*) dan rata-rata lamanya sekolah (*Mean years of Schooling*). Kedua indeks tersebut digabung menjadi indeks pendidikan. Negara yang mempunyai nilai dimensi pendidikan tinggi adalah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Indonesia berada pada

**Gambar 2.2**

Perbandingan IPM Negara-negara ASEAN Menurut Indeks Dimensi, 2012

Sumber: Human Development Report

posisi ke enam dengan nilai 0,575. Negara-negara yang dimensi pendidikan di bawah Indonesia adalah Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Komponen ketiga yang nilainya terbesar untuk negara-negara dengan IPM tinggi di ASEAN adalah pendapatan. Komponen pendapatan ini diukur dari Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita riil yang disesuaikan *Purchasing Power Parity* (PPP). Negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand mempunyai nilai per kapita riil di atas Indonesia, sementara negara-negara Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar mempunyai pendapatan perkapita riil di bawah Indonesia. Dari ketiga dimensi, Indonesia menduduki peringkat yang sama kecuali pada dimensi pendapatan. Sementara Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia selalu menduduki peringkat tiga besar diantara negara ASEAN pada ketiga dimensi tersebut. Nilai tiga dimensi yang tinggi membentuk nilai yang juga tinggi pada IPM Negeranya. Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.2.

## Indeks Ketimpangan Gender

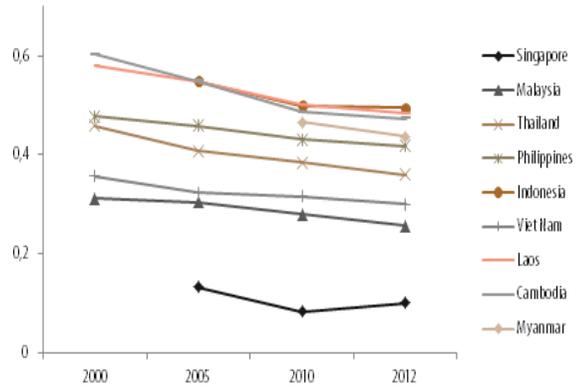
UNDP, sejak tahun 2010 telah mengukur ketimpangan/ketidaksetaraan gender *Gender Inequality Index* (GII) atau indeks ketimpangan gender. Indeks ini menunjukkan adanya kehilangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender. Kesenjangan yang

terjadi disebabkan adanya diskriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan. Terjadinya diskriminasi pada salah satu gender dapat diukur dengan GII. Nilai GII berkisar dari 0 hingga 1. Perempuan dan laki-laki dikatakan memiliki kehilangan kesempatan yang sama jika GII berkisar 0. Nilai berkisar 1 menunjukkan perempuan kehilangan lebih banyak dibandingkan laki-laki dari keseluruhan dimensi yang diukur. Semakin tinggi nilai GII maka semakin besar diskriminasi.

Masih seperti IPM, GII diukur berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Terdapat dua indikator pengukur dimensi kesehatan yaitu tingkat kematian ibu dan tingkat kesuburan remaja. Begitu juga dengan dimensi pendidikan yang diukur dengan dua indikator yaitu capaian tingkat pendidikan menengah dan tinggi untuk tiap gender serta proporsi kursi parlemen dipegang oleh setiap laki-laki atau perempuan. Dimensi tenaga kerja diukur dengan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Kelima indikator ini akan menghasilkan beberapa indeks hingga diperoleh dua indeks besar yaitu indeks laki-laki dan indeks perempuan yang akan dihitung menjadi Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks ketimpangan gender dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan adanya ketidaksetaraan gender yang selama ini ada di masyarakat, serta mengetahui kemajuan pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender. Selain itu indeks ini digunakan untuk mendukung aksi masyarakat dunia akan kesetaraan gender. Dengan data IKG maka dapat membantu pembuatan keputusan dan kebijakan pemerintah nasional dan internasional untuk menghilangkan kesenjangan gender sehingga menuju pembangunan manusia yang lebih baik.

Pada gambar 2.3 ditunjukkan mengenai perbandingan indeks ketimpangan gender di Negara-negara ASEAN. Berdasarkan data dari *Human Development Report* (HDR) tahun 2013, selama tahun 1990 hingga 2012, terjadi penurunan indeks ketimpangan gender. Hal ini berarti bahwa masing-masing Negara ASEAN berlomba untuk mencapai kesetaraan gender dan mengurangi adanya kehilangan dalam pembangunan manusia di Negaranya. Indeks ketimpangan gender yang rendah dimiliki oleh Singapura dengan nilai 0,1

**Gambar 2.3**

Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender di Negara-negara ASEAN Tahun 2000-2012

Sumber: Human Development Report

pada tahun 2012. Sedangkan Indonesia, Laos, dan Kamboja termasuk tiga negara dengan indeks ketimpangan gender yang tinggi, meskipun ketiga Negara tersebut melakukan berbagai program kesetaraan gender.

Berdasarkan komponen-komponennya, terlihat bahwa laki-laki masih dominan di masing-masing indikator, baik ketenagakerjaan, pendidikan maupun keterwakilan di parlemen. Perbedaan yang jauh terlihat jelas pada indikator rasio keterwakilan perempuan terhadap laki-laki di parlemen sehingga menyebabkan nilai IKD yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen untuk hampir semua negara masih rendah. Proporsi perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan masih belum sesuai. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya peran perempuan.

Salah satu komponen ketimpangan gender adalah keterwakilan perempuan/laki-laki dalam parlemen. Semakin proporsional jumlah

**Gambar 2.4**

Perbandingan Indeks Ketimpangan di Negara-negara ASEAN dengan Rasio Perempuan dan Laki-laki di Parlemen, 2012

Sumber: Human Development Report

perempuan/laki-laki dalam mewakili kelompoknya menunjukkan semakin setara dalam pengambilan keputusan. Gambar 2.4 menunjukkan perbandingan antara GII dengan rasio perempuan dan laki-laki di parlemen. Seager (1997) mengatakan bahwa laju dari keterwakilan perempuan di Parlemen sangatlah lambat sehingga UN memperkirakan bahwa dengan laju seperti ini keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di parlemen baru akan bisa dicapai pada tahun 2490.

## 2.2 Permasalahan Gender di Indonesia

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah berkaitan dengan kerumahtanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat.

Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Hal ini terjadi karena kasus perceraian (cerai hidup/mati) maupun sebab lain seperti

suami yang tidak bekerja. Data Susenas 2010 menunjukkan bahwa 13,9 persen rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan.

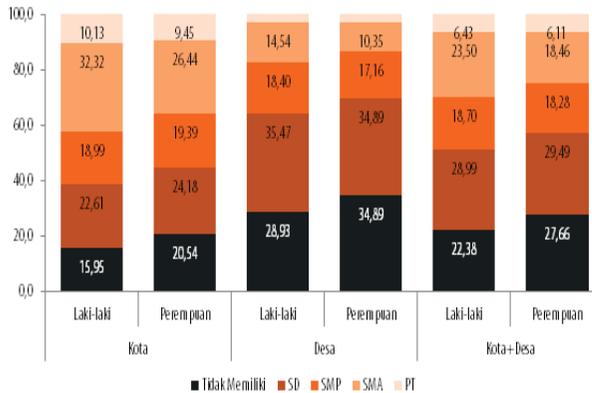
Banyak pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Pandangan tersebut telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat. Sudah pula membudaya bahwa tugas seorang perempuan adalah memasak, berdandan dan melahirkan anak. Tidak heran kedudukan perempuan terkadang menjadi nomor dua dan tidak sedikit orang yang merendahkan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan satu tindakan yang merendahkan perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan terdapat 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2012. Terjadi peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan data tahun sebelumnya. Kasus kekerasan yang terjadi adalah kekerasan dalam relasi personal, kekerasan terhadap istri (KDRT) hingga kekerasan dalam berpacaran. Dimana kasus KDRT memiliki persentase 42 persen dari keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal dimana pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban. Data tersebut menunjukkan kedudukan perempuan yang masih rendah dibandingkan laki-laki dalam peran domestiknya dan sebagai bukti masih terdapatnya kesenjangan gender yang terjadi. Tidak hanya setelah berumah tangga tetapi sebelum membentuk sebuah keluarga, perempuan pun menjadi korban kekerasan dari pasangannya. Sehingga kesetaraan gender menjadi permasalahan yang serius di Indonesia.

## Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Pendidikan merupakan satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender di Indonesia. Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi sepenuhnya. Dari data Susenas 2012 terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin senjang pula capaian laki-laki dan perempuan. Persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar persentasenya dibandingkan penduduk laki-laki baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Sebaliknya, proporsi perempuan yang meraih pendidikan, lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan.

Kesenjangan yang sama terjadi pula pada jenjang pendidikan terakhir perguruan tinggi, dimana proporsi laki-laki yang memiliki ijazah (10,13 persen) lebih besar dibandingkan proporsi perempuan (9,45 persen). Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa hal. Budaya yang memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dibandingkan perempuan



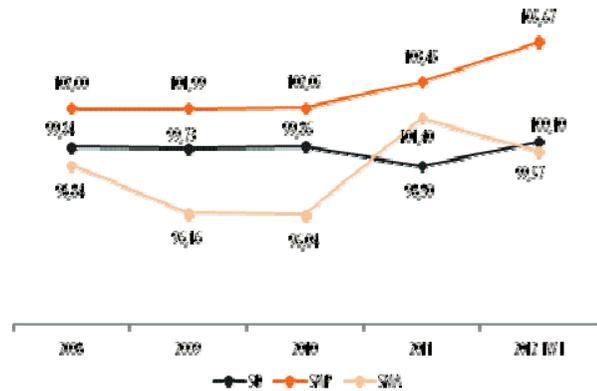
**Gambar 2.5**

Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh, 2012

Sumber: Susenas

masih terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, kewajiban laki-laki untuk menghidupi keluarga dengan mencari nafkah mengharuskan laki-laki mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Kesetaraan gender dapat terlihat dari rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di tiga jenjang pendidikan. Rasio APM masing-masing jenjang mendekati 100 yang berarti kesempatan pendidikan perempuan dan laki-laki hampir sama, bahkan rasio APM SMP melebihi angka 100 dari tahun 2008 hingga 2012 triwulan satu.

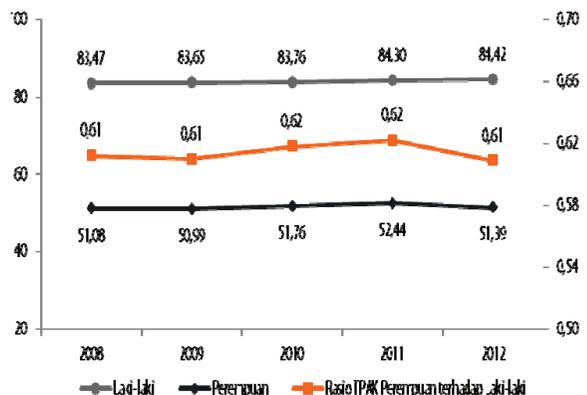
**Gambar 2.6**

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)  
Perempuan Terhadap Laki-laki, 2008-2012  
TW I

Sumber: BPS

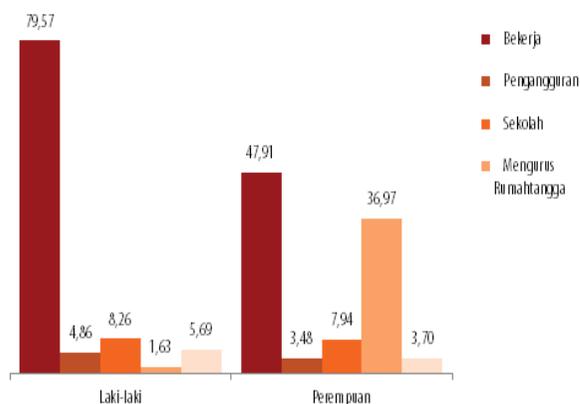
## Kesempatan Bekerja dan Berusaha

Laki-laki berkewajiban mencari nafkah dan bekerja menjadi budaya yang terus ada dalam kehidupan masyarakat. Meskipun perempuan yang memenuhi kebutuhan ekonomi dengan bekerja semakin meningkat, namun proporsinya masih lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini terutama dikarenakan pembagian peran laki-laki untuk bekerja dan perempuan mengurus rumah tangga. Pada gambar 2.7 terlihat bahwa rasio TPAK perempuan masih dibawah 1 dan masih lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Hal ini berarti bahwa persentase perempuan yang bekerja masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Rasio TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan. Pada tahun 2012, proporsi perempuan yang bekerja sebesar 47,91 persen sedangkan proporsi laki-laki mencapai 79,57 persen. Kondisi ini sesuai dengan *mindset* yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan berperan mengurus

**Gambar 2.7**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
Laki-laki dan Perempuan, 2008-2012

Sumber: Sakernas

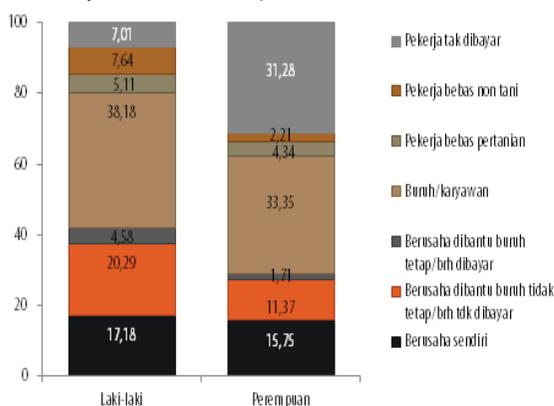
**Gambar 2.8**

Persentase penduduk 15 Tahun ke atas menurut kegiatan terbanyak seminggu yang lalu 2012

Sumber: Sakernas

rumah tangga. Dari data Sakernas 2012 diperoleh bahwa selain bekerja, kegiatan lain yang dilakukan perempuan seminggu yang lalu adalah mengurus rumah tangga dengan proporsi 36,97 persen. Sedangkan laki-laki yang mengurus rumah tangga hanya 1,63 persen. Pembagian peran perempuan dan laki-laki inilah yang menjadi sebab kesenjangan yang terjadi. Gambar 2.7 menunjukkan adanya sedikit penurunan TPAK perempuan yang diartikan bahwa persentase perempuan yang bekerja menurun pada tahun 2012.

Dari total penduduk yang bekerja terdapat 31,28 persen pekerja perempuan yang tidak dibayar, termasuk didalamnya pekerja keluarga yang menjadikan pekerja tidak mendapat imbalan jasa. Sementara hanya 7,01 persen laki-laki yang merupakan pekerja tak dibayar. Secara umum, proporsi pekerja laki-laki yang bekerja dengan mendapat upah masih lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Selain itu, lapangan kerja yang ada umumnya lebih memprioritaskan laki-laki dibandingkan perempuan. Proporsi

**Gambar 2.9**

Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yg lalu menurut status pekerjaan utama, 2012

Sumber: Sakernas

pekerja laki-laki yang berstatus buruh/karyawan (38,18 persen) lebih tinggi dibandingkan proporsi perempuan (33,35 persen).

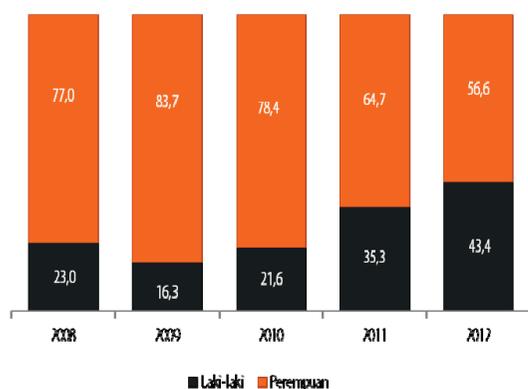
Selain dari status bekerja, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan juga terlihat dari upah yang diterima pekerja. Upah pekerja laki-laki lebih besar dibandingkan upah pekerja perempuan dari tahun ke tahun meskipun jumlah upah yang diterima masing-masing terus meningkat. Dilihat dari rasio upah perempuan terhadap laki-laki semakin mengalami peningkatan mengarah pada kesetaraan gender. Peningkatan yang terjadi bisa dikarenakan pengakuan akan kualitas pekerja perempuan.

**Tabel 2.1 Upah Pekerja Menurut Jenis Kelamin, 2008-2012**

Tahun	Upah (rupiah)		Rasio Upah Perempuan thd Laki-laki
	Laki-laki	Perempuan	
2008	1.055.123	814.142	0,77
2009	1.191.059	873.103	0,73
2010	1.294.867	1.024.991	0,79
2011	1.437.764	1.148.216	0,80
2012	1.538.887	1.235.824	0,80

Sumber: Sakernas, Agustus 2008 - 2012

Lapangan kerja yang semakin sempit mengakibatkan perpindahan penduduk ke wilayah lain dengan kesempatan kerja yang lebih besar, tidak terkecuali migrasi internasional ke luar negeri. Kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor seseorang bermigrasi untuk mendapatkan penghasilan lebih besar, antara lain dengan bekerja di luar negeri. TKI atau tenaga kerja Indonesia merupakan sebutan untuk penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri. Data pada Gambar 2.10 menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan (TKW) memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan pekerja laki-laki, dengan sektor yang terbesar adalah sektor informal. Hal ini dikarenakan pendidikan yang dimiliki pekerja sangat minim, sehingga pekerjaan yang dilakukan umumnya sebagai pembantu rumah tangga, buruh dan sebagainya. Pada

**Gambar 2.10**

Persentase Jumlah TKI Menurut Jenis Kelamin, 2008-2012

Sumber: BNP2TKI

tahun 2012 terdapat 279.784 TKW atau sebesar 56,67 persen dari total TKI yang tercatat di BNP2TKI. Persentase yang terus menurun dari tahun ke tahun disebabkan adanya perjanjian moratorium TKI dengan beberapa negara penerima TKI akibat dari maraknya kekerasan TKI di luar negeri.

## Kesempatan dalam Pemerintahan

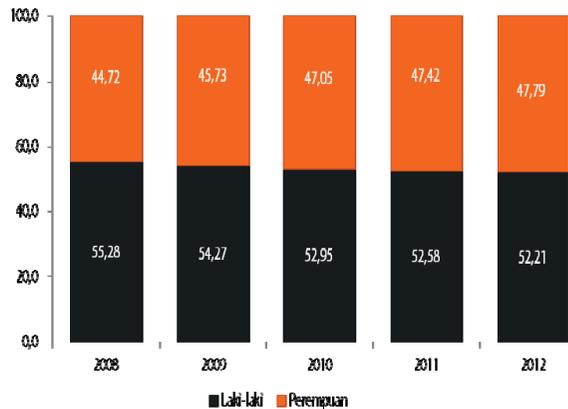
Peran perempuan tidak hanya dalam kegiatan rumah tangga tetapi juga dalam hal pekerjaan. Perempuan sebagai pemimpin masih sangat jarang karena pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya sebagai pendamping, tidak dapat membuat keputusan dengan sifat emosionalnya. Sehingga ungkapan laki-laki merupakan pemimpin terus ada dalam kehidupan masyarakat luas. Namun demikian, jumlah perempuan yang terlibat dalam pemerintahan terus meningkat.

Data tahun 2009 dari KPU menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Jumlah anggota DPR RI perempuan pada tahun 2009 menjadi 98 orang dari sebelumnya tahun 2004 yang berjumlah 65 orang. Selain itu, persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperlihatkan kesempatan perempuan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki dalam pemerintahan. Persentase PNS perempuan dari tahun ke tahun lebih kecil dibandingkan persentase PNS laki-laki. Persentase tersebut terus naik dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah anggota DPR dan PNS perempuan

**Gambar 2.11**

Persentase Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin, 2008-2012

Sumber: BKN



membuktikan keinginan untuk mendapatkan kesetaraan gender dengan laki-laki. Keinginan untuk disamakan dan ikut memegang andil dalam pemerintahan tidak hanya menjadi harapan tetapi sebagai bentuk capaian emansipasi perempuan sekarang ini.

## Produk Undang-Undang Terkait Gender

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 45 pasal 27. Namun demikian, dalam perkembangannya beberapa Undang-Undang (UU) yang selama ini berlaku di Indonesia, disadari mempunyai arti yang masih diskriminatif terhadap perempuan. Seperti dalam UU mengenai sistem pengupahan tenaga kerja perempuan, tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan-perempuan dianggap lajang sehingga suami dan anak-anak tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana yang diterima pekerja laki-laki. Ketentuan ini termuat dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 7 tahun 1990 tentang Upah, PP No. 37 tahun 1967 tentang Sistem Pengupahan di lingkungan perusahaan negara, Peraturan Menteri Pertambangan No.2/P/M/1971, Peraturan Menteri Pertanian No.K440/01/2/1984 dan No.01/GKKU/3/1978 dan SE Menaker No.4/1988 tentang tunjangan kesehatan, serta pasal 8 UU No.7/1983, pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 947/KMK/04/1983 dan pasal 8 UU No. 10/1994 tentang prosedur memperoleh

NPWP. Sejumlah UU tersebut tidak mampu mengakomodir kesetaraan gender yang telah dijamin oleh UUD, karena keterbatasan akses dan partisipasi perempuan dalam penyusunan UU.

# Pencapaian Pembangunan Gender





**Perkembangan Pembangunan Gender**



**Pencapaian Komponen IPG**

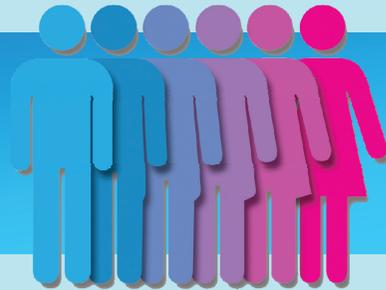


**Disparitas Pencapaian Pembangunan Gender  
Antarwilayah**



**Disparitas Pembangunan Manusia dan Pembangunan Gender**

## **Pencapaian Pembangunan Gender**





# Pencapaian Pembangunan Gender

**G**ender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh

akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu diwujudkan dalam kebijakan negara maupun dalam kebijakan informal yang dipelopori oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala yang struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut masing-masing elemen masyarakat dan individu mempunyai sensitifitas gender dan program-program Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan melalui GBHN 1999, UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004), dan dipertegas dalam instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Disamping itu beberapa Undang Undang Lainnya juga mendukung kesetaraan gender, antara lain: UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Disamping itu, pemerintah juga sedang membuat Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yaitu salah satu RUU yang akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014, yang diharapkan mampu menjadi landasan hukum mengenai penetapan dan penyelenggaraan Kesetaraan dan Keadilan Gender oleh Lembaga Negara di Indonesia.

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yang telah diperkenalkan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) dalam Laporan pembangunan Manusia tahun 1995. IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.

Pembangunan Manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau *gap* kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah *gap* kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi *gap* kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan.

### 3.1 Perkembangan Pembangunan Gender

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundang-undangan yang dihasilkan oleh negara maupun lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan

kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Namun pada implementasinya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena terkait beberapa kendala diatas. Untuk mewujudkan persamaan status dan kedudukan perempuan dan laki-laki diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan seperti peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi Pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya.



**Gambar 3.1**

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2004-2012

Sumber: BPS

Pencapaian pembangunan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama 9 tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. IPG Indonesia dalam kurun 2004-2012 telah meningkat dari 63,94 pada tahun 2004 menjadi 68,52 pada tahun 2012. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

**Tabel 3.1** Perkembangan IPM, IPG, dan Rasio IPG Terhadap IPM,

2004-2012

Tahun	IPM	IPG	Rasio (%)
2004	68,69	63,94	93,1
2005	69,57	65,13	93,6
2006	70,08	65,27	93,1
2007	70,59	65,81	93,2
2008	71,17	66,38	93,3
2009	71,76	66,77	93,0
2010	72,27	67,20	93,0
2011	72,77	67,80	93,2
2012	73,29	68,52	93,5

Sumber: BPS

Program-program Pemerintah yang selama ini dilaksanakan dan beberapa telah berpedoman pada pengarusutamaan gender, sebenarnya sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Namun demikian, peningkatan IPG dalam kurun waktu 2004-2012 belum sepenuhnya memperlihatkan hasil yang menggembirakan apabila dilihat dari kerangka pencapaian persamaan status dan kedudukan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut belum mampu mengurangi jarak (*gap*) secara nyata. *Gap* antara IPM dengan IPG selama kurun waktu tersebut masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah dari besarnya yaitu pada angka rasio 93 persen. Selama kurun waktu 2004-2012 IPG selalu menunjukkan posisi lebih rendah dari angka IPM, meskipun nilai IPG selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan persamaan dan kesetaraan gender belum sepenuhnya mampu diwujudkan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang serius dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk perempuan sehingga memperkecil *gap* yang terjadi antara kapabilitas dasar laki-laki dan perempuan. Namun demikian, disadari bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga upaya yang dilakukan harus terencana secara terus menerus dan berkelanjutan.

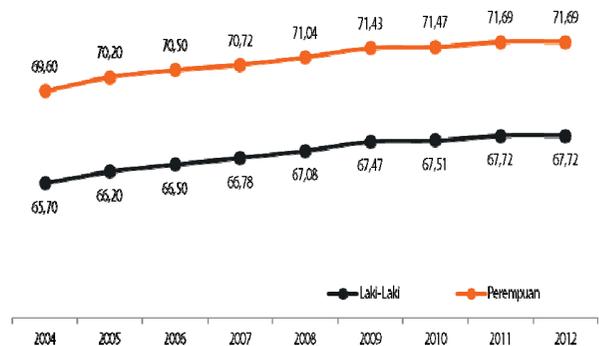
## 3.2 Pencapaian Komponen IPG

Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indeks komposit IPG juga memiliki komponen-komponen pembentuk yang turut menentukan nilai dari IPG itu sendiri. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. Oleh karena itu, pada subbab ini akan dibahas perkembangan masing-masing komponen IPG di Indonesia.

### Angka Harapan Hidup Saat Lahir ( $e_0$ )

Kesehatan adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yang tercermin dari kondisi fisik yang senantiasa sehat. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, leluasa dan murah. Bersama angka kesakitan dan angka kematian bayi, angka harapan hidup (AHH) di suatu negara merupakan elemen kunci yang sering dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upayanya melaksanakan pembangunan kesehatan.

Definisi dari Angka Harapan hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Kata kesehatan dapat dimaknai sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan). Lebih lanjut, informasi tentang

**Gambar 3.2**

Perkembangan Angka Harapan Hidup Saat Lahir ( $e_0$ ), 2004-2012

Sumber: BPS

perkembangan dari AHH di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Dari gambar 3.2, dapat dilihat bahwa secara umum tren  $e_0$  baik untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan dari periode 2004 hingga 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia telah berdampak pada kualitas kesehatan penduduk. Dari besaran  $e_0$  menunjukkan terdapat perbedaan level capaian yang nyata antara  $e_0$  perempuan dan laki-laki, dimana level  $e_0$  penduduk laki-laki lebih rendah kurang lebih sekitar 4 tahun dibanding level  $e_0$  penduduk perempuan.

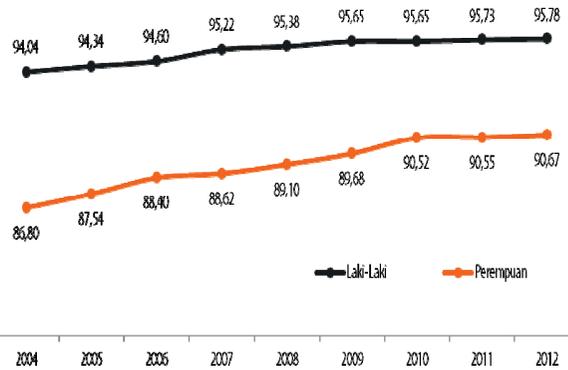
Perbedaan level atau *gap* yang terjadi tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Rata-rata negara-negara di dunia juga pernah atau sedang mengalami fase demikian. Fenomena ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Kajian-kajian terdahulu menyebutkan banyak faktor yang berperan terhadap perbedaan lebih rendahnya AHH penduduk laki-laki dibanding perempuan. Mulai dari faktor bawaan lahir (genetis), hingga pada faktor gaya hidup. Sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X, sedangkan laki-laki hanya tunggal. Kromosom X mengandung sekitar 1100 gen, yang selain berperan penting dalam pengaturan hormon, juga dalam fungsi vital tubuh lainnya, mulai dari pembekuan darah, metabolisme dan perkembangan janin. Sedangkan kromosom Y hanya mempunyai kurang dari 100 gen, dimana fungsi utamanya hanya untuk pembentukan dan perkembangan testes dan hormonalnya. Sehingga jika terjadi ketidakseimbangan (terinfeksi penyakit), secara biologis wanita lebih mampu

bertahan dibanding laki-laki, terutama pada masa tahun pertama kehidupan. Lebih lanjut, dilihat pada aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dibandingkan dengan perempuan yang bekerja. Padatnya aktivitas kerja yang dilakukan tentu berpotensi "mendatangkan" berbagai macam risiko, seperti stress, depresi, lingkungan yang tidak sehat, obesitas hingga ke penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Sedangkan dari sisi psikologis, perempuan diyakini lebih memperhatikan pola hidupnya dibandingkan laki-laki.

### Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia. Menurut Boserup (1984), pendidikan mampu membangun pola pikir seseorang menjadi lebih peka dan kritis dalam menanggapi suatu permasalahan, serta membuka pengetahuan seseorang yang memungkinkan ia untuk mengubah nasibnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu meningkatkan pembangunan pendidikan di Indonesia menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi sekolah secara berkelanjutan. Disamping itu kebijakan pendidikan murah untuk semua dengan BOS dan Wajib Belajar 9 tahun wajib dilanjutkan dan ditingkatkan.

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan baik dalam IPM maupun IPG adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years Schooling/MYS*). AMH menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca dan tulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

**Gambar 3.3**

Perkembangan Angka Melek Huruf,  
2004-2012

Sumber: BPS

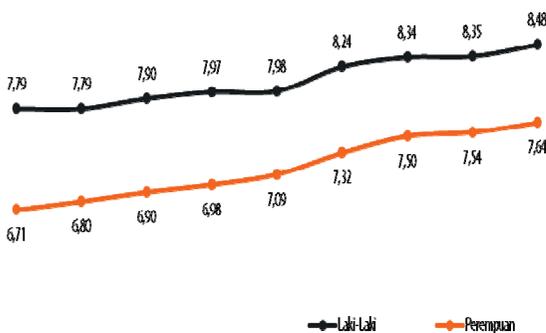
Dari Gambar 3.3 di atas terlihat bahwa pada periode 2004–2012 secara umum AMH penduduk laki-laki dan juga AMH penduduk perempuan terus mengalami peningkatan, meski laju peningkatannya terlihat sangat perlahan khususnya untuk AMH penduduk laki-laki. Pada prakteknya dibutuhkan jangka waktu yang cukup lama untuk menjadikan indikator-indikator sosial seperti AMH maupun MYS untuk meningkat secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan perubahan AMH atau MYS tersebut membutuhkan proses yang kompleks, tidak cukup dengan pembangunan gedung-gedung dan fasilitas sekolah saja, tetapi harus diiringi dengan penyediaan tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas, akses yang memadai, serta faktor budaya yang mengesampingkan pendidikan harus diperbaiki.

AMH dapat diartikan sebagai kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, yang menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media. Hal ini dapat digunakan untuk melihat potensi intelektual masyarakat, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu wilayah. Dari tren AMH laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa AMH perempuan masih lebih rendah dari AMH laki-laki. Meskipun demikian, hal yang menggembirakan bahwa laju peningkatan AMH perempuan sedikit lebih cepat dibanding perkembangan AMH laki-laki yang meningkat tipis. Tercatat dari periode 2004-2012, peningkatan AMH penduduk perempuan mampu mencapai hingga hampir 4 persen. Sementara untuk laki-laki hanya sekitar 1,5 persen. Pada tahun 2012 terlihat bahwa AMH Indonesia sudah mencapai level diatas 90 persen, dimana

95,78 persen untuk laki-laki dan 90,67 persen untuk perempuan. Dengan kata lain, pada 2012 terdapat sebanyak 4,22 persen penduduk laki-laki dan 9,33 persen untuk penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf.

Hal ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam hal baca dan tulis di Indonesia antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebab ketimpangan tersebut adalah belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama pada keluarga miskin yang jumlahnya masih banyak di Indonesia.

Sama halnya dengan komposisi angka melek huruf penduduk, capaian angka rata-rata lama sekolah laki-laki selalu di atas capaian perempuan, meskipun perbedaannya hanya kurang dari 1 tahun. Selama periode 2004-2012, pola peningkatan angka MYS laki-laki dan perempuan relatif sama. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang relatif lebih tinggi dibanding kenaikan pada tahun-tahun lainnya. Pada 2012 angka MYS laki-laki sebesar 8,48 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP, sedangkan MYS perempuan adalah 7,64 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Secara umum, selama periode 2004-2012, perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan yang mengecil meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini menjadi masukan bagi Pemerintah untuk lebih mengupayakan peningkatan pembangunan pendidikan masyarakat khususnya bagi perempuan.



**Gambar 3.4**

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah, 2004-2012

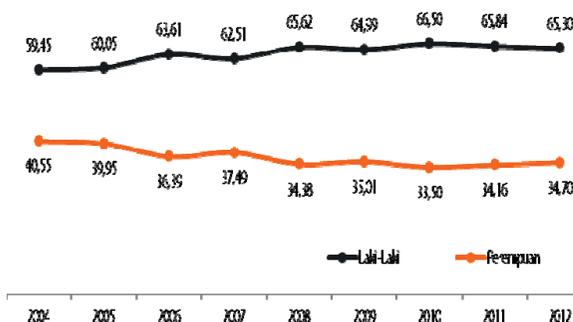
Sumber: BPS

Dari dimensi pendidikan (AMH dan MYS) yang telah diuraikan, terdapat fakta bahwa masih terjadi kesenjangan gender di Indonesia. Selain dua indikator tersebut, masih banyak fenomena putus sekolah yang dialami oleh anak perempuan Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa di tahun 2011, persentase anak perempuan (usia 7 hingga 17 tahun) yang putus sekolah mencapai 2,17 persen. Jika ditelaah dari jenjang pendidikannya, pada jenjang SD/ sederajat angka putus sekolah perempuan sebesar 1,22 persen, kemudian SMP/ sederajat sebesar 0,72 persen dan jenjang SMA/ sederajat sebesar 0,22 persen. Dari keseluruhan anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah tersebut, 51,29 persen berhenti sekolah karena alasan tidak adanya biaya. Selain itu, sekitar 8,71 persennya putus sekolah karena terpaksa harus bekerja (Profil Anak Indonesia, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pada level penduduk berpenghasilan rendah atau miskin anak perempuan dipaksa untuk menghentikan pendidikan dibanding anak laki-laki.

### Sumbangan Pendapatan

Gambar 3.5 menyajikan sumbangan pendapatan dari sektor non pertanian pada periode 2004-2012 dalam skala nasional antara laki-laki dan perempuan. Sumbangan pendapatan disini mencerminkan kontribusi perempuan di bidang ketenagakerjaan untuk sektor non pertanian. Secara umum, perkembangan sumbangan pendapatan perempuan mengalami fluktuasi pada rentang periode tersebut. Pada tahun 2004 sumbangan pendapatan perempuan mencapai angka paling tinggi, dengan capaian sebesar 40,55 persen, dan pada tahun-tahun berikutnya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2004. Pada tahun 2012 angka sumbangan pendapatan perempuan mencapai 34,70 persen, atau meningkat hanya sebesar 0,54 persen dari tahun 2011. Perubahan sumbangan pendapatan ini terkait dengan dua faktor yang memengaruhinya, yaitu faktor angkatan kerja dan upah yang diterima.

Berdasarkan data Sakernas BPS menunjukkan bahwa proporsi angkatan kerja perempuan di Indonesia pada tahun 2012 sekitar 38,62 persen dari total 120,41 juta angkatan kerja (kondisi Februari). Artinya, penduduk laki-laki masih mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada



**Gambar 3.5**

Perkembangan Sumbangan Pendapatan, 2004-2012

Sumber: BPS

sumbangan pendapatan perempuan yang lebih kecil. Jika partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan meningkat, tentunya akan menurunkan proporsi angkatan kerja laki-laki. Akibatnya proporsi sumbangan pendapatan perempuan akan meningkat dan mempersempit *gap* dengan proporsi sumbangan pendapatan laki-laki.

Dari sisi upah yang diterima, secara nominal selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pada penghitungan IPG, komponen upah menggunakan data upah buruh di sektor nonpertanian. Indikasi umum perbedaan upah nominal pekerja (buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian) pada kondisi November 2012 menunjukkan bahwa rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja laki-laki (Rp 1,552 juta) lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan (Rp 1,249 juta). Jika ditinjau perbedaan tersebut dari waktu ke waktu menunjukkan pola yang sama meskipun perbedaan tersebut tampak berfluktuasi. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat perbedaan cukup berarti pada jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya pekerja perempuan menerima upah yang lebih rendah dibanding pekerja laki-laki, sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya

gap upah antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya nilai IPG.

Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya di perdagangan, dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan, dan status pekerjaannya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang relatif lebih kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya *gap* pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.

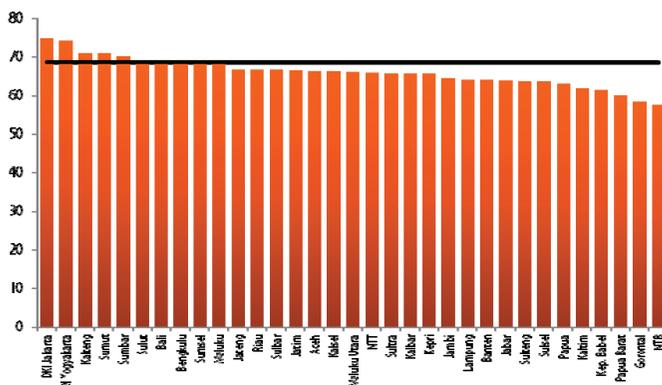
Dari tiga dimensi pembentuk IPG, ternyata masih terdapat ketimpangan pada dimensi pengetahuan dan juga dimensi ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah baik di Pusat dan Daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih responsif terhadap gender, mengingat Pemerintah menargetkan kesetaraan gender bisa terwujud paling lama di tahun 2025 mendatang. Hal tersebut ditujukan agar perempuan juga mampu secara optimal menikmati perannya sebagai subyek sekaligus objek pembangunan.

### 3.3 Disparitas Pencapaian Pembangunan Gender Antar Wilayah

Salah satu tujuan dari pembangunan di Indonesia adalah adanya pemerataan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan tujuan tersebut mampu diwujudkan secara berkesinambungan. Namun demikian, kesenjangan antar wilayah belum sepenuhnya bisa dihindari. wilayah bagian Barat Indonesia cenderung lebih pesat dibandingkan wilayah Timur Indonesia. Padahal masih banyak potensi sumberdaya alam yang masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan. Banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan tersebut antara lain adalah kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta kendala geografis yang relatif terisolasi merupakan masalah utama bagi pengembangan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

#### Capaian IPG Provinsi

Nilai capaian pembangunan gender untuk setiap provinsi dapat dilihat dari angka IPG provinsi, yang disajikan pada Gambar 3.6. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa angka IPG sebagian besar provinsi di Indonesia berada di bawah Indonesia. Dari 33 provinsi, hanya 10 provinsi yang berada diatas Indonesia yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bali, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan



**Gambar 3.6**  
IPG Provinsi Menurut Peringkat  
2012

Sumber: BPS

Maluku. Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas dalam capaian pembangunan gender di Indonesia.

Meskipun adanya disparitas dalam capaian pembangunan gender di Indonesia, namun secara umum setiap provinsi mengalami peningkatan nilai IPG, sehingga pembangunan gender mengalami kemajuan di semua Provinsi. IPG Nasional pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,72 poin, dibandingkan tahun 2011. Namun demikian, perlu upaya yang lebih keras dalam meningkatkan pembangunan manusia yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, karena peningkatan yang dicapai pada tahun 2012 masih belum maksimal dan masih terjadi kesenjangan di semua provinsi.

**Tabel 3.2 Provinsi dengan IPG Tertinggi dan Terendah, 2011-2012**

2011	IPG	2012	IPG
<b>Tertinggi</b>			
DKI Jakarta	74,01	DKI Jakarta	74,66
DI Yogyakarta	73,07	DI Yogyakarta	74,11
Sumatera Utara	70,34	Kalimantan Tengah	70,87
Kalimantan Tengah	69,80	Sumatera Utara	70,76
Sumatera Barat	69,55	Sumatera Barat	70,11
<b>Terendah</b>			
Kalimantan Timur	61,07	Kalimantan Timur	61,86
Kep. Bangka Belitung	60,79	Kep. Bangka Belitung	61,38
Papua Barat	59,24	Papua Barat	60,02
Gorontalo	57,67	Gorontalo	58,32
Nusa Tenggara Barat	56,70	Nusa Tenggara Barat	57,58

Sumber: BPS

Di tingkat provinsi, pencapaian IPG cukup bervariasi. IPG paling besar adalah DKI Jakarta dengan 74,66 dan terendah adalah Nusa Tenggara Barat dengan 57,58. Dengan demikian, perbedaan antara IPG tertinggi dan terendah adalah 17,02. Jarak yang tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun 2011 yaitu mencapai 17,31 poin. Dengan penurunan ini menunjukkan bahwa ada sedikit penurunan terhadap disparitas pembangunan gender di Indonesia.

Selama dua tahun terakhir lima provinsi yang tertinggi dan terendah tidak mengalami perubahan, hanya Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah yang berganti posisi, namun masih dalam 5 besar (Tabel 3.2). Hal ini berarti bahwa untuk provinsi-provinsi dengan IPG terendah harus lebih memacu program-program pembangunan yang berbasis gender. Disamping itu diperlukan upaya yang lebih keras dibandingkan provinsi-provinsi lainnya dalam mencapai pembangunan gender yang maksimal.

IPG 5 provinsi terbesar pada tahun 2012 telah mencapai angka diatas 70,00. DKI Jakarta sebagai provinsi tertinggi mengalami peningkatan IPG sebesar 0,65 poin, sedangkan IPG Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang terendah meningkat sebesar 0,88 poin. Sementara itu provinsi dengan peningkatan IPG tertinggi adalah Sumatera Selatan sebesar 2,04 poin.

### Capaian IPG Kabupaten/Kota

Capaian IPG di Kabupaten Kota selama periode 2011-2012 secara umum mengalami peningkatan. Di Yogyakarta merupakan Kabupaten dengan nilai IPG tertinggi di Indonesia dengan nilai 78,71 atau meningkat 1,15 poin. Pada tahun 2012 sepuluh besar Kabupaten/Kota dengan IPG tertinggi relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2011, kecuali Kota Salatiga yang keluar digantikan Kota Jakarta Pusat dan perubahan ranking dari Kabupaten Karo, Toba Samosir, dan Tapanuli Utara. Dari 10 besar Kabupaten/Kota tersebut hampir semuanya berada di Indonesia Bagian Barat kecuali Kota Ambon dan Barito Utara.

Sementara untuk lima besar IPG Kabupaten/Kota, tidak mengalami perubahan posisi urutannya. Urutan pertama adalah Kota Yogyakarta dengan 78,71, diikuti oleh Kota Padang panjang (IPG 77,53), Kota Denpasar (IPG 77,01), Kota ambon (IPG 76,88), dan Kota Surakarta (IPG 76,76).

**Tabel 3.3** Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPG Tertinggi, 2011-2012

2011	IPG	2012	IPG
Kota Yogyakarta	77,56	Kota Yogyakarta	78,71
Kota Padang Panjang	76,55	Kota Padang Panjang	77,53
Kota Denpasar	76,06	Kota Denpasar	77,01
Kota Ambon	76,01	Kota Ambon	76,88
Kota Surakarta	75,68	Kota Surakarta	76,76
Toba Samosir	74,78	Karo	75,93
Karo	74,60	Toba Samosir	75,92
Barito Utara	74,55	Sleman	75,76
Kota Salatiga	74,18	Kota Jakarta Pusat	75,59
Sleman	74,17	Barito Utara	75,42

Sumber: BPS

Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPG terendah tidak mengalami perubahan selama periode 2011-2012, namun mengalami beberapa pergeseran antar Kabupaten/Kota. Sebagian besar Kabupaten Kota dengan IPG terendah adalah merupakan kabupaten baru hasil pemekaran yang didominasi oleh provinsi Papua. Delapan kabupaten dengan IPG terendah berasal dari provinsi Papua dengan Kabupaten Deiyai mempunyai angka IPG yang paling rendah yaitu 43,85. Sementara itu, dua Kabupaten berasal dari Nusa Tenggara Barat menempati posisi 9 dan 10 terendah.

### 3.4 Disparitas Pembangunan Manusia dan Pembangunan Gender

Adanya kesenjangan gender secara nasional tidak terlepas dari adanya kesenjangan gender yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari lebih rendahnya angka IPG dibandingkan angka IPM yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan rasio IPG terhadap IPM, maka terdapat lima provinsi terkategori rasio tinggi dan lima provinsi terkategori terendah. Lima provinsi yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Papua, DKI Jakarta, dan Maluku. Sedangkan lima provinsi

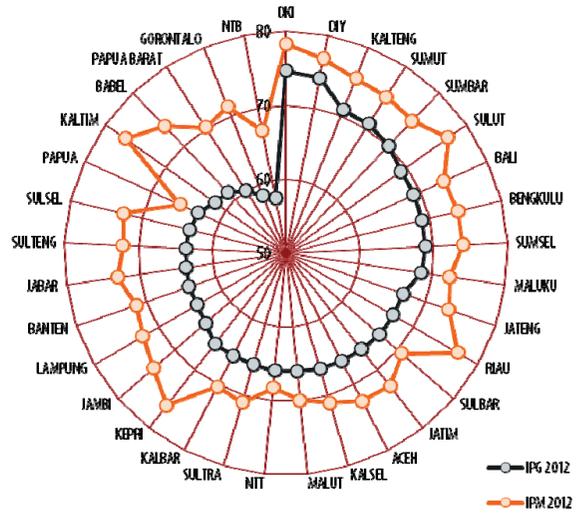
terendah adalah Kalimantan Timur, Gorontalo, Kep. Bangka Belitung, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat (Tabel 3.4).

**Tabel 3.4 Peringkat Tertinggi dan Terendah Rasio IPG terhadap IPM Menurut Provinsi**

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Rasio (%)
<b>Tertinggi</b>			
Nusa Tenggara Timur	65,99	68,28	96,66
DI Yogyakarta	74,11	76,75	96,56
Papua	63,06	65,86	95,75
DKI Jakarta	74,66	78,33	95,32
<b>Maluku</b>	<b>68,54</b>	<b>72,42</b>	<b>94,64</b>
<b>Terendah</b>			
Nusa Tenggara Barat	57,58	66,89	86,08
Papua Barat	60,02	70,22	85,47
Kep. Bangka Belitung	61,38	73,78	83,19
Gorontalo	58,32	71,31	81,79
Kalimantan Timur	61,86	76,71	80,64

Sumber: BPS

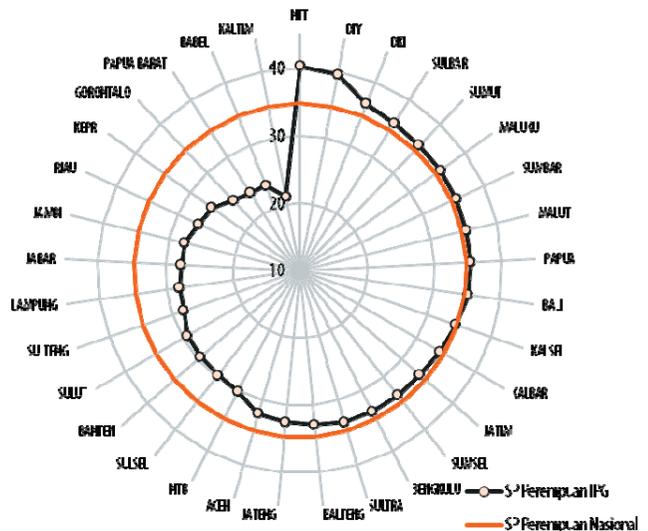
Provinsi NTT merupakan provinsi dengan nilai IPM yang rendah, namun memiliki *gap* IPG dan IPM yang paling kecil dibandingkan provinsi lainnya, dengan besaran rasio 96,66 persen. Kecilnya *gap* pencapaian IPM dan IPG di NTT menunjukkan bahwa pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan di NTT tidak jauh berbeda. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan gender di NTT relatif paling kecil dibandingkan provinsi lainnya. Kecilnya *gap* tersebut terutama disebabkan oleh besaran sumbangan pendapatan penduduk perempuan NTT terhadap total pendapatan yang paling tinggi di antara lainnya. Sumbangan pendapatan ini dihitung dari upah buruh yang bekerja di semua sektor kecuali sektor pertanian. Sementara itu provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta dengan IPM yang tinggi, juga mempunyai angka IPG yang tinggi pula dan rasio IPG dan IPM yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa di kedua provinsi tersebut, pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kapabilitas perempuan untuk menuju kesetaraan gender.



**Gambar 3.7**  
 Nilai IPM dan IPG Menurut Provinsi, 2012

Sumber: BPS

Bagi 5 provinsi dengan rasio IPM dan IPG terendah (Kalimantan Timur, Gorontalo, Kep. Bangka Belitung, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat), sumbangan pendapatan perempuan sangat berpengaruh terhadap rendahnya IPG. Angka persentase sumbangan pendapatan perempuan hanya berkisar antara 21 sampai dengan 30 persen (di bawah rata-rata Nasional yaitu sebesar 34,70) sehingga mempengaruhi nilai IPG kelima provinsi tersebut. Sementara itu angka IPM provinsi Kalimantan Timur yang tinggi yaitu sebesar 76,71 atau ranking 5 nasional, tidak secara otomatis berbanding lurus dengan



**Gambar 3.8**  
 Disparitas Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Provinsi, 2012

Sumber: BPS

angka IPG-nya. Tercatat nilai IPG Kaltim hanya 61,86 atau ranking 29 nasional, sehingga menghasilkan rasio IPM dan IPG rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kualitas manusia yang tinggi di Kaltim, masih belum mampu setara untuk laki-laki dan perempuan.

Secara umum adanya *gap* yang tinggi antara IPM dan IPG pada provinsi-provinsi dengan IPM tertinggi sangat dipengaruhi oleh sumbangan pendapatan buruh non pertanian perempuan. Hal ini menunjukkan penduduk laki-laki masih mendominasi pasar kerja di Indonesia atau hampir lebih dari 60 persen. Gambar 3.7 menunjukkan bahwa sebagian besar persentase sumbangan pendapatan perempuan dibawah angka rata-rata Indonesia, hanya 10 provinsi yang berada diatas rata-rata Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, Maluku, Sumatera Barat, Maluku Utara, Papua, dan Bali. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan kualitas manusia di suatu wilayah tidak berbanding lurus dengan kesetaraan gender dalam dunia kerja.

# Pencapaian Pemberdayaan Gender





Perkembangan Pemberdayaan Gender

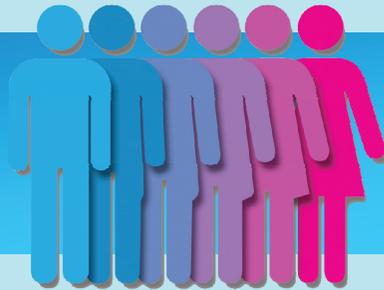


Pencapaian Komponen IDG



Disparitas IDG

## Pencapaian Pemberdayaan Gender





# Pencapaian Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

IDG menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (*survey*) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (*current condition*) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Bab ini akan membahas pencapaian pemberdayaan gender yang akan dibagi ke dalam 3 (tiga) pokok bahasan, yaitu perkembangan pemberdayaan gender, pencapaian komponen IDG, dan disparitas IDG. Ketiga pokok bahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum pencapaian peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, komponen/indikator yang berkontribusi terhadap capaian peranan perempuan, dan disparitas peranan perempuan antar wilayah (provinsi dan kabupaten/kota).

## 4.1 Perkembangan Pemberdayaan Gender

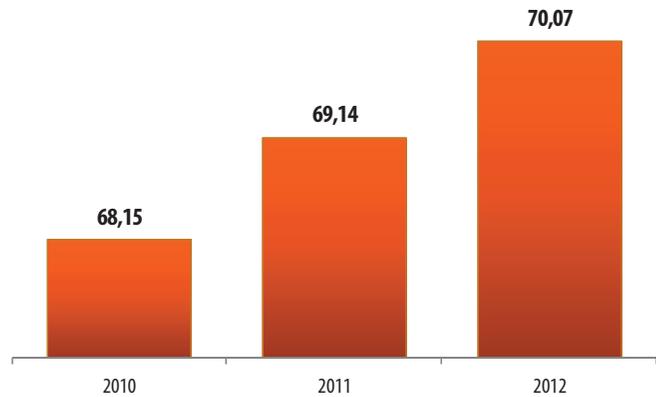
Kesetaraan dan keadilan gender sering dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Makna dari kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan.

Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal: proses pengambilan keputusan di bidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Unsur-

**Gambar 4.1**

Tren Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia, 2010-2012

Sumber: BPS

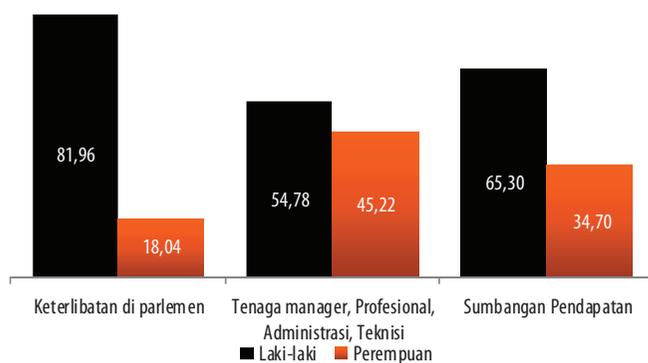


unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen/indikator yang tercakup dalam pengukuran IDG. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, IDG merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi.

Gambar 4.1 menggambarkan tren IDG Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2012 yang terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, IDG Indonesia sebesar 68,15, dan dalam kurun waktu 2 tahun terus meningkat menjadi 70,07 di tahun 2012. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibanding sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, perlu dikaji setiap komponen IDG secara lebih mendalam.

## 4.2 Pencapaian Komponen IDG

Secara umum capaian komponen IDG pada tahun 2012 untuk perempuan masih lebih rendah dari laki-laki, sebagaimana disajikan pada gambar 4.2. Hal ini terjadi di semua komponen pembentuk IDG, baik dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, maupun dalam bidang perekonomian. Masih relatif rendahnya capaian perempuan dibandingkan laki-laki tersebut, diduga disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua penduduk tanpa terkecuali, namun kesempatan ini belum dapat digunakan secara optimal oleh kelompok lain (dalam hal ini perempuan),



**Gambar 4.2**

Pencapaian Komponen IDG tahun 2012

Sumber: BPS

sehingga terkesan bahwa perempuan selalu termarginalkan (BPS, 2006).

Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki pada setiap komponen pembentuk IDG, hal ini akan dibahas dalam uraian berikut ini.

### Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas penduduknya khususnya perempuan, masih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terjadinya ketimpangan aksesibilitas antara perempuan dengan laki-laki, diantaranya dalam bidang politik.

**Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Anggota DPR RI, 1955-2009**

Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pesentase
1955	256	16	272	5,88
1971	429	31	460	6,74
1977	423	37	460	8,04
1982	418	42	460	9,13
1987	441	59	500	11,80
1992	438	62	500	12,40
1997	442	58	500	11,60
1999	456	44	500	8,80
2004	485	65	550	11,82
2009	460	100	560	17,86

Sumber : Statistik Indonesia 2011

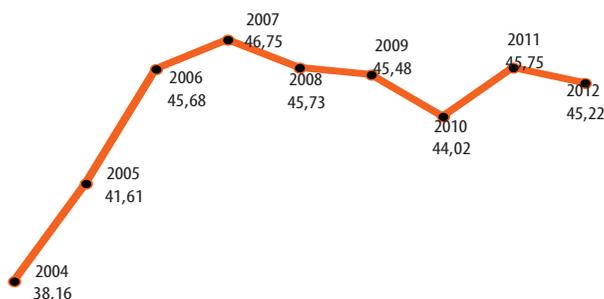
Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar 18,04 persen. Nilai ini masih jauh di bawah kuota yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekitar 30 persen. Apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam UU tersebut mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan, mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender. Meskipun belum mencapai kuota sesuai UU tersebut, tetapi jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2004 yang hanya mencapai 65 kursi dari 550 kursi yang ada di DPR (11,82 persen), keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan yang cukup mengembirakan pada hasil pemilu 2009 (100 anggota atau 17,86 persen).

Jika melihat perkembangannya, baik dari segi jumlah maupun persentase anggota DPR perempuan sejak tahun 1955 relatif menunjukkan peningkatan, kecuali pada Pemilu 1997 dan 1999. Jumlah dan persentase tertinggi terjadi pada saat pemilu 2009. Meskipun masih cukup jauh dari kuota yang ditetapkan dalam UU, tetapi dari tren yang menunjukkan peningkatan maka pemberdayaan perempuan khususnya dalam bidang politik mengindikasikan arah yang positif.

## Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi

Indikator lain yang juga digunakan dalam pembentukan IDG adalah persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan, dan teknisi. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan di posisi ini memberikan gambaran kemajuan peranan perempuan. Selama ini perempuan dipandang hanya berurusan dengan pekerjaan rumah tangga, padahal perempuan sebenarnya memiliki potensi yang sama baiknya dengan laki-laki. Perempuan hanya kurang memiliki kesempatan karena terbentur oleh persoalan budaya serta kodrat yang melekat terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi (Parawansa, 2003). Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, dan organisasi sosial lainnya masih relatif kecil, mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/managerial, administrasi, serta teknisi.

Komponen ini juga menunjukkan bahwa capaian perempuan masih lebih rendah dari laki-laki, meskipun capaian pada komponen ini masih lebih besar dibandingkan komponen keterwakilan perempuan di parlemen. Merujuk pada pola perkembangan persentase perempuan sebagai tenaga profesional selama kurun waktu 2004-2012 sebagaimana disajikan pada Gambar 4.3, capaian perempuan cukup berfluktuasi, terutama sejak tahun 2007. Hal ini cukup memprihatinkan, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, dan teknisi sebelum tahun 2007 terus meningkat. Bahkan, pada tahun



**Gambar 4.3**

Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, 2004-2012

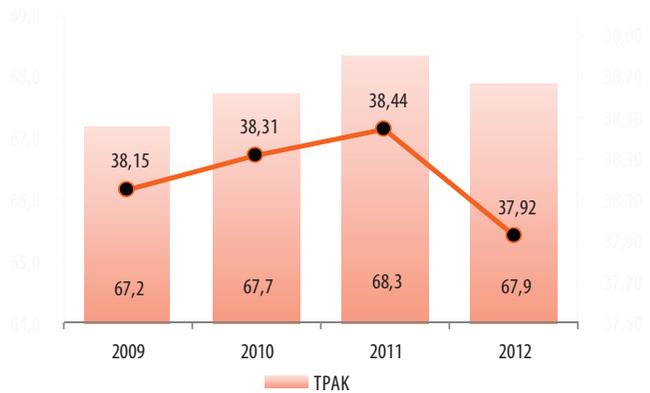
Sumber: BPS

2012, capaian tersebut sedikit mengalami penurunan, dari 45,75 menjadi 45,22.

Selanjutnya perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan persentase angkatan kerja perempuan periode 2009-2012 dapat dilihat pada gambar Gambar 4.4. Dari gambar tersebut, tampak bahwa TPAK perempuan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun sejak 2009 hingga 2011 namun turun pada tahun 2012. Jika dilihat dari komposisi angkatan kerja, tampak bahwa angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2009, perempuan baru mengisi porsi sebesar 38,15 persen hingga mencapai 38,44 persen di tahun 2011. Sayangnya, porsi ini menurun pada tahun 2012 menjadi 37,92 persen.

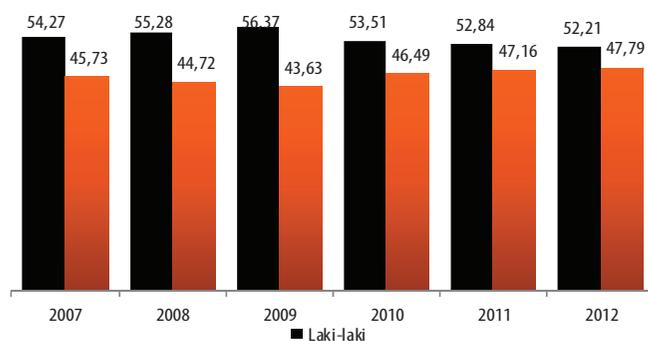
Informasi lain terkait peranan perempuan dalam komponen tenaga manager, profesional, kepemimpinan, dan teknisi, adalah formasi perempuan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Gambar 4.5 menunjukkan bahwa persentase PNS perempuan senantiasa mengalami peningkatan sejak 2009 hingga 2012, dan relatif mulai mendekati persentase laki-laki. Pada tahun 2009, persentase perempuan yang menjadi PNS sebanyak 43,63 persen. Angka ini menurun sejak tahun 2007, yang tercatat sebanyak 45,73 persen. Selanjutnya,

**Gambar 4.4**  
Perkembangan TPAK dan  
Persentase Angkatan Kerja  
Perempuan, 2009-2012



Sumber: BPS

sejak 2009 persentase PNS perempuan meningkat setiap tahun hingga mencapai 47,79 persen pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi diskriminasi gender dalam penerimaan PNS di Indonesia.

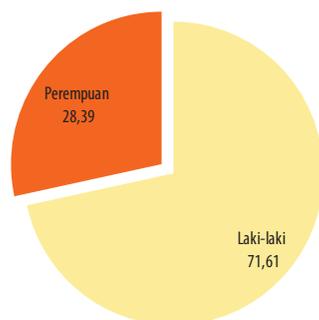
**Gambar 4.5**

Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin, 2007-2012

Sumber: BKN dan BPS

Rendahnya kesenjangan persentase PNS perempuan dan laki-laki merupakan sebuah indikasi yang cukup positif dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender. Namun, masih terdapat persoalan lain yang harus diperhatikan terkait peranan perempuan sebagai PNS, khususnya sebagai pejabat struktural yang sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Pejabat struktural di PNS ternyata masih didominasi oleh laki-laki, yakni sebanyak 71,61 persen pada tahun 2012, sedangkan pejabat struktural perempuan hanya sebanyak 28,39 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif kecil. Untuk itu masih diperlukan upaya lebih serius dari berbagai pihak terutama penentu kebijakan dalam rangka mendorong perempuan lebih maju dalam mencapai kapabilitas yang optimum sehingga dapat berpeluang menduduki jabatan-jabatan strategis.

**Gambar 4.6**

Persentase Pejabat Struktural PNS Menurut Jenis Kelamin, 2012

Sumber: BKN

## 4.3 Disparitas IDG

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia tidak hanya bertujuan meraih pertumbuhan setinggi-tingginya, namun juga memerhatikan pemerataan antarwilayah. Hal ini sering disebut sebagai *growth with equity*, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Dengan demikian, kajian-kajian maupun pengukuran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan diharapkan senantiasa menyajikan perbandingan antar wilayah, baik pada level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa. Dengan demikian, apabila ditemukan adanya kesenjangan (*gap*) yang besar antar wilayah, maka pemerintah dapat dengan segera melakukan evaluasi dan perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat.

Namun hingga saat ini, apabila berbicara dikotomi pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, masih ditemukan adanya kesenjangan yang cukup memprihatinkan. Wilayah bagian barat Indonesia cenderung mengalami pembangunan yang lebih pesat dibandingkan wilayah timur. Akibatnya, kualitas sumber daya di wilayah timur Indonesia masih jauh tertinggal. Dua faktor yang menyebabkan ketertinggalan pembangunan di wilayah bagian timur adalah terkait dengan kondisi alam yang cukup berat dan kekurangtersediaan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah pedalaman, sehingga masih terdapat daerah-daerah yang terisolir (BPS, 2001).

Ketertinggalan ini juga berdampak pada kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah, yang masih menjadi catatan pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah provinsi di Indonesia lebih lanjut dibahas pada subbagian ini.

### Capaian IDG Provinsi

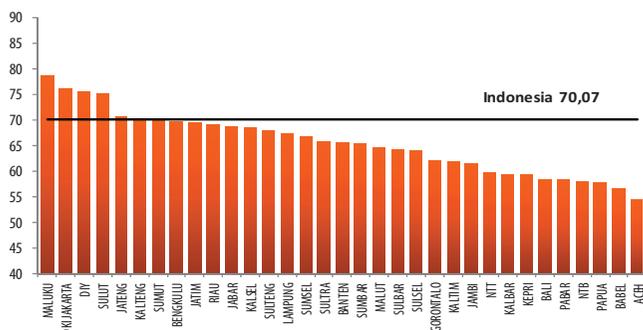
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) secara nasional pada tahun 2012 sebesar 70,07. Angka ini meningkat sebesar 0,93 poin dibanding tahun

sebelumnya yang mencapai 69,14. Peningkatan nilai indeks tersebut memberi gambaran adanya pemberdayaan gender semakin baik dimana masing-masing kelompok gender mendapatkan peran yang proporsional. Apabila ditinjau menurut capaian antar wilayah provinsi, peningkatan indeks pada tahun 2012 tersebut masih menyisakan kesenjangan antar provinsi yang relatif besar.

Pengukuran IDG pada level provinsi dilakukan untuk memperoleh gambaran lengkap pencapaian persamaan peranan perempuan dan laki-laki sebagai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan pada suatu provinsi. Keterbandingan nilai IDG antar provinsi tahun 2012 tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7. Pada gambar tersebut, tampak bahwa hanya enam provinsi yang memiliki capaian IDG di atas rata-rata IDG nasional, yaitu Maluku, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah.

Provinsi Maluku menempati posisi tertinggi dalam pencapaian IDG pada tahun 2012, sedangkan posisi terendah ditempati oleh Provinsi Aceh, dengan nilai IDG masing-masing sebesar 78,72 dan 54,44. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan sebesar 24,28 poin. Kesenjangan ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi pada tahun sebelumnya (25,78 poin). Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pembangunan gender antar provinsi di Indonesia sedikit menurun pada tahun 2012.

Posisi tertinggi yang diraih Provinsi Maluku pada tahun 2012 telah menggeser Provinsi DI Yogyakarta yang pada tahun 2011 menempati posisi tertinggi. Provinsi ini mengalami penurunan pencapaian nilai IDG sebesar 2,28



**Gambar 4.7**

IDG Provinsi Menurut Peringkat, 2012

Sumber: BPS

point yang berakibat Provinsi DI Yogyakarta hanya menempati peringkat ketiga pada tahun 2012. Adapun posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta, yang pada tahun sebelumnya hanya menempati peringkat ketiga, setelah meraih kenaikan poin sebesar 1,44.

**Tabel 4.2** Provinsi dengan IDG Tertinggi, 2011-2012

2011	IDG	2012	IDG
DI Yogyakarta	77,84	Maluku	78,72
Maluku	76,51	DKI Jakarta	76,14
DKI Jakarta	74,70	DI Yogyakarta	75,57
Kalimantan Tengah	69,48	Sulawesi Utara	75,00
Bengkulu	69,33	Jawa Tengah	70,66

Sumber: BPS

Secara umum, terjadi perubahan peringkat 5 besar menurut provinsi (lihat Tabel 4.2). Provinsi Kalimantan Tengah dan Bengkulu tidak lagi menjadi 5 provinsi tertinggi dalam capaian IDG, digantikan oleh Jawa Tengah dan Sulawesi Utara.

Pengukuran nilai IDG pada tahun 2012 juga mencatat adanya penurunan capaian nilai IDG di beberapa provinsi. Selain provinsi DI Yogyakarta, terdapat 5 provinsi lainnya yang mengalami penurunan capaian IDG, yaitu Sumatera Selatan (1,55 poin), Banten (1,05 poin), Gorontalo (0,04 poin), Kepulauan Riau (1,30 poin), dan Bali (0,09 poin). Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan gender pada provinsi-provinsi tersebut mengalami degradasi, sehingga perlu perhatian khusus dan upaya lebih kuat dari pemerintah daerah setempat.

Selain menyajikan lima provinsi dengan capaian IDG tertinggi pada tahun 2011-2012, kajian ini juga membahas lima provinsi dengan capaian IDG terendah pada periode yang sama, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3. Secara umum, kelima provinsi dengan IDG terendah pada tahun 2011 masih berada pada posisi yang sama kecuali Kalimantan Barat yang digantikan oleh Papua.

**Tabel 4.3 Provinsi dengan IDG Terendah, 2011-2012**

2011	IDG	2012	IDG
Papua	57,74	Bali	58,49
Papua Barat	57,54	Papua Barat	58,46
NTB	56,57	NTB	57,90
Kalimantan Barat	56,39	Papua	57,76
Kep. BABEL	56,03	Kep. BABEL	56,54
Aceh	52,06	Aceh	54,44

Sumber: BPS

## Capaian IDG Kabupaten/Kota

Pada level Kabupaten/Kota, sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia (314 dari 497 kabupaten/kota atau 63,18 persen) mengalami peningkatan nilai IDG pada tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya, sedangkan sisanya (183 Kabupaten/Kota atau 36,82 persen) mengalami penurunan capaian.

Bila dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional, pada tahun 2012 hanya terdapat 52 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IDG di atas rata-rata nasional. Jumlah ini turun dibanding tahun 2011 yang tercatat sebanyak 61 kabupaten/kota. Sebagian besar Kabupaten/Kota dengan capaian IDG di atas rata-rata nasional tersebut berasal dari wilayah bagian barat.

**Tabel 4.4 Kabupaten/Kota dengan IDG Tertinggi, 2011-2012**

2011	IDG	2012	IDG
Gunung Mas	83,08	Gunung Mas	81.58
Kota Salatiga	81,45	Kota Madiun	79.96
Kota Kendari	79,37	Kota Tomohon	79.72
Kota Madiun	79,21	Kota Depok	79.55
Kota Banjarmasin	78,77	Minahasa	79.21
Kota Malang	78,75	Kota Kendari	79.11
Kep. Siau Tagulandang Biaro	78,75	Barito Utara	78.91
Barito Utara	78,56	Minahasa Utara	78.74
Kota Tomohon	78,40	Kota Banjarmasin	78.30
Minahasa	78,27	Kota Surabaya	78.02

Sumber: BPS

Nama-nama Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat 10 terbesar capaian IDG pada tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.4. Tampaknya, posisi tertinggi pada tahun 2012 masih tetap dipertahankan oleh Kabupaten Gunung Mas meskipun mengalami penurunan besaran indeks dari 83,08 menjadi 81,58. Sedangkan nama-nama kabupaten/kota yang berada pada peringkat ke-9 hingga ke-10 mengalami pergeseran posisi dibanding tahun sebelumnya. Bahkan terdapat tiga kabupaten/kota yang baru menduduki 10 besar pada tahun 2012, yaitu Kota Depok, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Surabaya. Sedangkan tiga kabupaten/kota yang terlempar dari 10 besar adalah Kota Salatiga, Kota Malang, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Bila dikaji pada kabupaten/kota dengan capaian IDG yang rendah, tampaknya sebagian besar kabupaten/kota tersebut berasal dari wilayah Indonesia bagian timur, terutama dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sisanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara), Provinsi NTB (Kabupaten Lombok Utara), Provinsi NTT (Kabupaten Sabu Raijua), Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Lingga), dan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Labuhan Batu Utara).

**Tabel 4.5 Kabupaten/Kota dengan IDG Terendah, 2011-2012**

2011	IDG	2012	IDG
Luwu Utara	39,29	Dogiyai	39.78
Melawai	39,13	Luwu Utara	39.77
Lingga	38,59	Lombok Utara	39.49
Dogiyai	38,53	Sabu Raijua	39.42
Yahukimo	38,27	Lingga	39.29
Teluk Bintuni	38,09	Tambrauw	37.64
Tambrauw	31,61	Asmat	37.38
Asmat	31,44	Labuhan Batu Utara	36.05
Labuhan Batu Utara	23,59	Teluk Bintuni	34.33
Deiyai	20,24	Deiyai	20,43

Sumber: BPS

Urutan nama-nama Kabupaten/Kota yang termasuk dalam peringkat 10 capaian IDG terendah tampaknya mengalami perubahan-perubahan posisi, kecuali pada posisi paling rendah yang tetap dipegang oleh Kabupaten Deiyai (20,43).

Menilik besaran kesenjangan antara capaian IDG tertinggi dan terendah pada tahun 2012 sebesar 61,15, menunjukkan adanya disparitas pembangunan yang sangat lebar antar Kabupaten/Kota, lebih lebar dibanding disparitas antarprovinsi. Meskipun demikian, disparitas ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 62,84. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah dalam rangka menciptakan pemberdayaan gender yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

**Keterkaitan  
antara IPM, IPG,  
dan IDG**





• **Hubungan antara IPM dengan IPG**

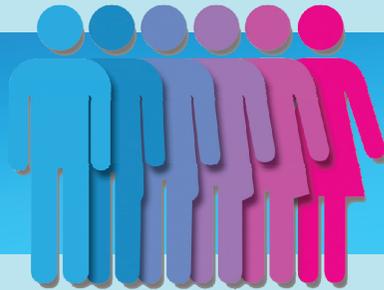


• **Hubungan antara IPM dengan IDG**



• **Hubungan antara IPG dengan IDG**

**Keterkaitan antara  
IPM, IPG, dan IDG**





# Keterkaitan antara IPM, IPG, dan IDG

## • 5.1 Hubungan antara IPM dengan IPG

### Keterkaitan Antara IPM - IPG Tahun 2006, 2009, 2012

Pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan berbagai aspek lain. Untuk mengukur kinerja pembangunan diperlukan suatu indikator pembangunan.

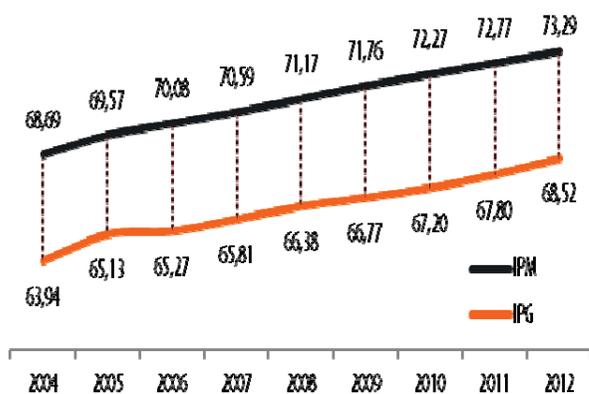
Oleh karena kompleksitas dari suatu kegiatan pembangunan, sampai saat ini belum ada satu indikator yang disepakati semua pihak sebagai ukuran tunggal tentang capaian pembangunan secara keseluruhan. Itulah sebabnya, untuk melakukan analisis dan perbandingan capaian pembangunan (baik antarwaktu maupun antarwilayah) pada umumnya digunakan indikator-indikator pembangunan yang secara khusus memiliki fokus terhadap aspek tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat

menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya.

Dengan menggunakan IPG akan dapat diukur capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender. Penting untuk dicatat bahwa IPG sebenarnya merupakan IPM setelah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Artinya, nilai maksimal dari IPG di suatu wilayah tidak akan pernah melampaui nilai IPM-nya. Nilai IPG yang semakin jauh dari nilai IPM-nya memperlihatkan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah pengamatan juga akan semakin tinggi pula.

Secara nasional, disparitas gender masih terjadi di dalam proses pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 5.1 yang memperlihatkan bahwa selama periode 2004 – 2012, nilai IPG Indonesia selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM. Pada tahun 2012, misalnya, IPM Indonesia telah mencapai 73,29 akan tetapi IPG-nya ternyata baru sebesar 68,52.

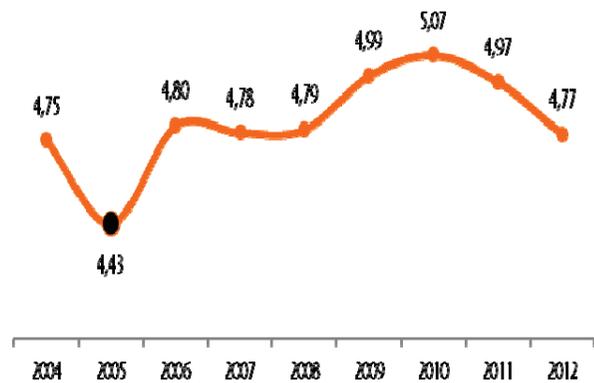


**Gambar 5.1**

Tren IPM dan IPG Indonesia, 2004-2012

Sumber: BPS

Selisih antara IPM dan IPG sebenarnya menunjukkan tingkat koreksi terhadap IPM yang diakibatkan oleh adanya disparitas gender. Dalam kondisi ideal, yaitu ketika disparitas gender relatif rendah, maka nilai selisih antara kedua indeks ini akan mendekati nol. Berdasarkan Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa disparitas gender dalam pelaksanaan pembangunan manusia di Indonesia pada periode 2004–2012 relatif berfluktuasi dengan kecenderungan terus meningkat secara perlahan. Walaupun demikian, perkembangan tahun terakhir telah memperlihatkan capaian yang menggembirakan. Selisih antara IPM dan IPG pada tahun 2012 menurun dibanding tahun 2011, yaitu dari 4,77 menjadi 4,97.



**Gambar 5.2**

Tren Selisih IPM dan IPG Indonesia,  
2004-2012

Sumber: BPS

Selanjutnya, untuk melihat sebaran capaian IPM dan IDG selama tahun 2006, 2009, dan 2012 dilakukan dengan analisis kuadran.

**Tabel 5.1 Hubungan Antara IPM dengan IPG, 2006-2009-2012**

Kuadran I			Kuadran II		
2006	2009	2012	2006	2009	2012
Sum. Utara	Sum. Utara	Sum. Utara	Riau	Riau	Riau
Sum. Barat	Sum. Barat	Sum. Barat	Jambi	Jambi	Jambi
Bengkulu	DKI Jakarta	Sum. Selatan	Sum. Selatan	Sum. Selatan	Kep. Babel
DKI Jakarta	DI Yogyakarta	Bengkulu	Kep. Babel	Bengkulu	Kep. Riau
DI Yogyakarta	Kal. Tengah	DKI Jakarta	Kep. Riau	Kep. Babel	Jawa Tengah
Kal. Tengah	Sul. Utara	DI Yogyakarta	Jawa Barat	Kep. Riau	Kal. Timur
Sul. Utara		Bali	Jawa Tengah	Jawa Tengah	
		Kal. Tengah	Kal. Timur	Kal. Timur	
		Sul. Utara			
<b>(7)</b>	<b>(6)</b>	<b>(9)</b>	<b>(8)</b>	<b>(8)</b>	<b>(8)</b>
Kuadran III			Kuadran IV		
2006	2009	2012	2006	2009	2012
Aceh	Aceh	Aceh	Bali	-	Maluku
Lampung	Lampung	Lampung			
Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Barat			
Banten	Jawa Timur	Jawa Timur			
NTB	Banten	Banten			
NTT	Bali	NTB			
Kal. Barat	NTB	NTT			
Kal. Selatan	NTT	Kal. Barat			
Sul. Tengah	Kal. Barat	Kal. Selatan			
Sul. Selatan	Kal. Selatan	Sul. Tengah			
Sul. Tenggara	Sul. Tengah	Sul. Selatan			
Gorontalo	Sul. Selatan	Sul. Tenggara			
Sul. Barat	Sul. Tenggara	Gorontalo			
Maluku	Gorontalo	Sul. Barat			
Maluku Utara	Sul. Barat	Maluku Utara			
Papua Barat	Maluku	Papua Barat			
Papua	Maluku Utara	Papua			
	Papua Barat				
	Papua				
<b>(17)</b>	<b>(19)</b>	<b>(17)</b>	<b>(1)</b>	<b>(0)</b>	<b>(1)</b>

Sumber: BPS

### KUADRAN I : IPM dan IPG di atas rata-rata nasional

Provinsi yang masuk dalam kelompok ini adalah provinsi yang pembangunan gender dan pembangunan manusianya berjalan searah dimana keduanya di atas

rata-rata nasional. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa semakin banyak daerah yang pembangunan manusia dan gendernya sudah di atas rata-rata nasional. Jika pada tahun 2006 hanya 7 provinsi yang masuk dalam kelompok ini, maka pada tahun 2012 sebanyak 9 provinsi.

#### KUADRAN II : IPM di atas rata-rata nasional tetapi IPG di bawah rata-rata nasional

Provinsi yang masuk dalam kelompok ini sudah baik pembangunan manusianya, namun belum setara antarkelompok gender. Secara umum, selama enam tahun, telah terjadi perbaikan upaya pembangunan manusia berbasis gender, terlihat dari menurunnya jumlah provinsi yang masuk dalam kelompok ini dari 8 provinsi pada tahun 2006 dan 2009 menjadi 6 provinsi pada tahun 2012.

#### KUADRAN III: IPM dan IPG di bawah rata-rata nasional

Diantara kuadran yang lain, provinsi yang masuk dalam kelompok ini tergolong cukup banyak. Provinsi-provinsi yang capaian pembangunan manusia dan kesetaraan gendernya masih di bawah rata-rata nasional mencapai lebih dari 50 persen pada tahun 2012. Selama kurun waktu enam tahun, terjadi perubahan persentase provinsi yang masuk dalam kelompok ini. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, diperlukan usaha yang lebih keras bagi semua provinsi di kelompok ini untuk mengejar ketertinggalannya dengan provinsi lain.

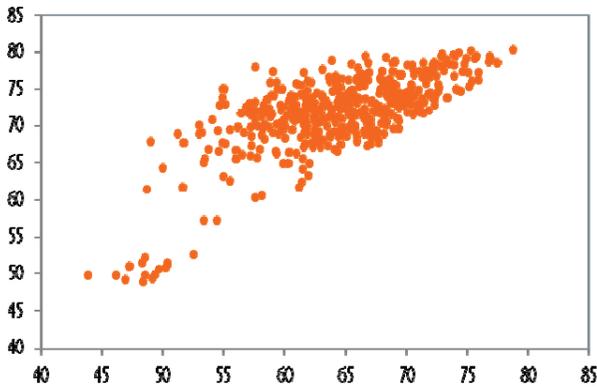
#### Kuadran IV: IPM di bawah rata-rata nasional tetapi IPG di atas rata-rata nasional

Provinsi yang masuk dalam kelompok ini merupakan provinsi dengan pencapaian pembangunan gender di atas nasional tetapi capaian pembangunan manusianya masih di di bawah nasional. Pada tahun 2006, provinsi yang masuk dalam kelompok hanya Provinsi Bali. Sementara pada tahun 2009, tidak ada satupun provinsi yang masuk dalam kelompok ini. Tahun 2012, provinsi yang masuk dalam kelompok ini adalah Maluku.

Dalam kurun waktu 6 tahun, yaitu 2006 hingga 2012, jumlah provinsi yang masuk dalam kelompok kuadran I relatif berfluktuasi. Selama kurun waktu tersebut, provinsi yang berhasil bertahan pada kelompok ini antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Keenam provinsi tersebut berhasil mempertahankan pembangunan manusia sekaligus pembangunan gendernya sehingga capaiannya berada di atas capaian nasional selama periode 2006-2012.

Provinsi-provinsi yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalah provinsi-provinsi yang berada pada kelompok kuadran III. Capaian IPM dan IPG provinsi pada kelompok ini berada di bawah capaian IPM dan IPG nasional. Jumlah provinsi yang masuk dalam kelompok ini juga bervariasi antartahun. Jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2009 dimana terdapat 19 provinsi yang masuk dalam kelompok ini. Provinsi Maluku dan Bali berhasil keluar dari kelompok ini pada tahun 2012, dimana Provinsi Maluku berpindah ke kuadran IV sementara Provinsi Bali masuk dalam kuadran I.

Pengelompokan provinsi sesuai dengan nilai IPM dan IPG seperti yang telah diuraikan memperlihatkan bahwa secara umum asosiasi antara IPM dan IPG adalah searah. Maksudnya, provinsi yang memiliki nilai IPM tinggi akan cenderung memiliki nilai IPG yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Hal yang

**Gambar 5.3**

Hubungan antara IPG 2012 dengan IPM 2012 Kabupaten di Indonesia

Sumber: BPS

sama ternyata berlaku juga untuk hubungan antara IPM dan IPG pada tingkat kabupaten/kota seperti yang disajikan pada Gambar 5.3.

### Kesetaraan Gender Antarprovinsi 2006, 2009, 2012

Selisih antara IPM dan IPG pada suatu wilayah pada dasarnya memperlihatkan tingkat disparitas atau kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Maksudnya, jika selisih antara IPM dan IPG untuk suatu wilayah semakin besar maka kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk, sebaliknya jika selisihnya semakin kecil maka kesetaraan gendernya akan semakin baik.

Perbandingan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia antarprovinsi selama periode 2006-2012 disajikan pada Tabel 5.2. Hal menarik yang patut dicatat bahwa kesetaraan gender di suatu provinsi tidak hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya IPM yang dicapai, melainkan dipengaruhi sekaligus oleh nilai IPM dan IPG dari provinsi tersebut. Provinsi-provinsi yang memiliki IPM dan IPG tinggi (berada pada Kuadran I dalam pembahasan sebelumnya) atau IPM dan IPG rendah (Kuadran III) akan cenderung memiliki kesetaraan gender yang baik. Sementara provinsi-provinsi dengan IPM tinggi dan IPG rendah atau dengan IPM rendah dan IPG tinggi disparitas gendernya akan cenderung tinggi.

**Tabel 5.2 Selisih IPM dan IPG menurut Provinsi Tahun 2006, 2009, 2012**

Provinsi	Selisih IPM-IPG			Perubahan	
	2006	2009	2012	2006-2009	2009-2012
Aceh	6,59	6,95	6,16	0,36	-0,79
Sumatera Utara	5,80	4,89	4,37	-0,91	-0,52
Sumatera Barat	5,36	5,70	4,59	0,34	-1,11
Riau	9,79	10,05	10,14	0,26	0,09
Jambi	10,21	9,81	9,33	-0,41	-0,48
Sumatera Selatan	8,73	7,64	5,11	-1,10	-2,53
Bengkulu	5,99	5,20	5,01	-0,79	-0,19
Lampung	8,97	8,59	8,48	-0,38	-0,11
Kep. Bangka Belitung	13,39	12,49	12,41	-0,90	-0,09
Kep. Riau	12,27	11,75	10,59	-0,53	-1,16
DKI Jakarta	5,03	4,36	3,66	-0,68	-0,69
Jawa Barat	9,47	9,80	9,42	0,33	-0,38
Jawa Tengah	6,55	7,08	6,56	0,52	-0,51
DI Yogyakarta	3,45	2,99	2,64	-0,46	-0,35
Jawa Timur	8,67	7,58	6,27	-1,09	-1,31
Banten	10,15	8,16	7,56	-1,99	-0,61
Bali	4,05	4,33	4,48	0,28	0,14
NTB	8,42	8,94	9,31	0,52	0,37
NTT	3,54	2,86	2,28	-0,68	-0,58
Kalimantan Barat	6,12	5,50	4,68	-0,62	-0,82
Kalimantan Tengah	6,15	5,48	4,60	-0,67	-0,88
Kalimantan Selatan	5,52	5,19	4,78	-0,33	-0,41
Kalimantan Timur	16,61	16,40	14,85	-0,21	-1,55
Sulawesi Utara	8,38	7,76	7,85	-0,62	0,08
Sulawesi Tengah	9,09	8,70	8,56	-0,40	-0,14
Sulawesi Selatan	9,80	9,70	9,20	-0,11	-0,49
Sulawesi Tenggara	6,35	6,63	5,33	0,28	-1,30
Gorontalo	14,39	14,08	12,99	-0,31	-1,09
Sulawesi Barat	3,47	4,55	4,00	1,08	-0,55
Maluku	5,13	3,88	3,88	-1,26	0,01
Maluku Utara	7,03	5,26	3,94	-1,77	-1,32
Papua Barat	9,95	10,51	10,20	0,56	-0,31
Papua	3,45	2,64	2,80	-0,81	0,15

Sumber: BPS, 2012

Berdasarkan Tabel 5.2, Provinsi NTT, Papua dan Maluku tergolong sebagai provinsi yang dalam melakukan pembangunan manusia memiliki kesetaraan gender yang baik, karena selisih IPM dan IPG untuk ketiga provinsi ini relatif sangat rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Di sisi lain, IPM untuk ketiga provinsi ini justru relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Artinya, walaupun kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di ketiga provinsi tersebut termasuk yang terbaik dibandingkan dengan provinsi lain, akan tetapi capaian pembangunan manusia secara umum justru termasuk yang rendah.

Sebaliknya, capaian IPM yang tinggi ternyata juga tidak selalu sejalan dengan tingginya tingkat kesetaraan gender. Kalimantan Timur, misalnya, walaupun nilai IPM-nya tergolong tinggi (urutan ke-5 tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain) ternyata memiliki tingkat kesetaraan gender yang paling buruk.

Gambaran tentang kesetaraan gender menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan manusia di berbagai provinsi di Indonesia masih belum selalu sejalan dengan peningkatan kesetaraan gender. Namun demikian, upaya perbaikan kesetaraan gender pada umumnya telah memberikan hasil yang positif di sebagian besar provinsi. Terdapat 23 provinsi yang mengalami penurunan selisih antara IPM dan IPG-nya pada tahun 2006-2009. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di semua provinsi ini mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kesetaraan gender pada periode 2009-2012 meningkat menjadi 27 provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan telah meningkat selama periode 2006-2012 yang ditandai dengan meningkatnya kesetaraan gender di berbagai provinsi.

## 5.2 Hubungan antara IPM dengan IDG

**Tabel 5.3 Hubungan Antara IPM dengan IDG, 2006-2009-2012**

Kudran I			Kudran II		
2006	2009	2012	2006	2009	2012
DKI	DKI	DKI	SumUt	SumUt	SumUt
Jakarta	Jakarta	Jakarta	SumBar	SumBar	SumBar
DIY	KalTeng	JaTeng	Riau	Riau	Riau
KalTeng	SulUt	DIY	Jambi	Jambi	Jambi
SulUt		KalTeng	SumSel	SumSel	SumSel
		SulUt	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu
			Kep. Babel	Kep. Babel	Kep. Babel
			Kep. Riau	Kep. Riau	Kep. Riau
			JaBar	JaTeng	Bali
			JawaTeng	DIY	KalTim
			KalTim	KalTim	
Kudran III			Kudran IV		
2006	2009	2012	2006	2009	2012
Aceh	Aceh	Aceh	SulTeng	SulBar	Maluku
Lampung	Lampung	Lampung	SulBar	Papua	
JaTim	JaBar	JaBar	Papua		
Banten	JaTim	JaTim			
Bali	Banten	Banten			
NTB	Bali	NTB			
NTT	NTB	NTT			
KalBar	NTT	KalBar			
KalSel	KalBar	KalSel			
SulSel	KalSel	SulTeng			
SulTra	SulTeng	SulSel			
Gorontalo	SulSel	SulTra			
Maluku	SulTra	Gorontalo			
Maluku Utara	Gorontalo	SulBar			
Papua Barat	Maluku	Maluku Utara			
	Maluku Utara	Papua Barat			
	Papua Barat	Papua			

Sumber: BPS

Selain IPM dan IPG, indeks lain dapat digunakan untuk melihat capaian pembangunan dalam konteks gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG yang pada dasarnya hanya merupakan IPM setelah dikoreksi dengan kesetaraan gender untuk setiap komponennya, IDG merupakan angka indeks komposit yang secara khusus dimaksudkan untuk

mengukur pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Dengan menggunakan IDG nasional dan IPM nasional pada tahun 2006, 2009, dan 2012 sebagai tolok ukur, provinsi di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok kuadran sebagai berikut.

#### Kuadran I : IPM tinggi dan IDG tinggi

Tingginya capaian pembangunan manusia pada kelompok ini ternyata berjalan seiring dengan tingginya pemberdayaan gendernya. Artinya, peluang bagi perempuan untuk mengambil peran di bidang politik, ekonomi dan sosial dalam kegiatan pembangunan juga relatif tinggi. Pada tahun 2006, provinsi yang masuk dalam kelompok ini yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Pada tahun 2009, provinsi yang masuk dalam kelompok ini hanya DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Sementara pada tahun 2012, provinsi yang masuk dalam kelompok ini adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Selama periode 2006 hingga 2012, provinsi yang terus berada dalam kelompok ini adalah DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara.

#### Kuadran II : IPM tinggi dan IDG rendah

Provinsi yang masuk dalam kelompok ini merupakan provinsi dengan capaian IPM yang tinggi tetapi belum disertai dengan pemberdayaan gender yang tinggi. Artinya, peran perempuan dalam kegiatan politik,

ekonomi dan sosial di masing-masing provinsi yang termasuk ke dalam kelompok ini masih relatif rendah dibandingkan dengan peranan perempuan di tingkat nasional. Pada tahun 2006, terdapat 11 provinsi yang masuk dalam kelompok ini yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, pada tahun 2009, jumlah provinsi yang masuk dalam kelompok ini masih sama dengan tahun 2006. Akan tetapi, Provinsi DI Yogyakarta masuk menggantikan Provinsi Jawa Barat. selanjutnya, pada tahun 2012, jumlah provinsi yang masuk dalam kelompok ini turun menjadi 10 provinsi dimana Jawa Tengah dan DI Yogyakarta telah berhasil keluar dari kelompok ini. Sementara itu, Provinsi Bali masuk ke dalam kelompok ini. Pada umumnya, provinsi yang berada pada kelompok ini merupakan provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Dalam kurun waktu 2006 hingga 2012, 80 persen provinsi masuk dalam kelompok ini.

### Kuadran III : IPM rendah dan IDG rendah

Capaian pembangunan manusia pada kelompok ini tergolong rendah dibandingkan dengan capaian pada tingkat nasional, begitu juga dengan peranan perempuan dalam pembangunan juga tergolong rendah. Dengan demikian permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing provinsi menjadi lebih berat dibandingkan dengan provinsi dari kelompok lain. Selain harus meningkatkan pembangunan manusia secara umum, masing-masing provinsi tersebut dituntut pula untuk bekerja keras dalam meningkatkan peranan perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi dan sosial.

Selama periode 2006 hingga 2012, jumlah provinsi yang berada pada kelompok ini cenderung meningkat. Tercatat bahwa pada tahun 2006 terdapat 15 provinsi sementara pada tahun 2009 dan 2012 terdapat 17 provinsi. Provinsi yang masuk dalam kelompok ini pada tahun 2006 antara lain Aceh, Lampung, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sementara itu, pada tahun 2009, Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah masuk ke dalam kelompok ini. Tahun 2012, Provinsi Bali dan Maluku berhasil meningkatkan pembangunannya sehingga tidak berada pada kelompok ini. Provinsi Sulawesi Barat dan Papua kemudian masuk dalam kelompok ini yang mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan manusia maupun pemberdayaan gendernya masih di bawah nasional.

#### Kuadran IV : IPM rendah dan IDG tinggi

Capaian pembangunan manusia pada kelompok ini relatif rendah dibandingkan dengan capaian secara nasional, tetapi peranan perempuan dalam kegiatan pembangunan pada kelompok ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional. Jumlah provinsi yang masuk dalam kelompok ini cenderung menurun selama periode 2006 hingga 2012. Pada tahun 2006, provinsi yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. Pada tahun 2009, provinsi yang berada pada kelompok ini yaitu Sulawesi Barat dan Papua. Sementara pada tahun 2012, hanya Provinsi Maluku yang masuk dalam kelompok ini.

Seperti halnya hubungan antara IPM dengan IPG, hubungan antara IPM dengan IDG selama kurun waktu 2006 hingga 2012 juga menunjukkan perubahan pada beberapa provinsi. Selain pembangunan manusia yang diiringi dengan pembangunan gendernya yang cukup bagus, pembangunan manusia dan pemberdayaan gender di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara juga cukup bagus. Ketiga provinsi ini juga masuk dalam kelompok kuadran I dalam hal hubungan IPM dengan IDG. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di provinsi tersebut telah selaras dengan pembangunan gender maupun pemberdayaan gender.

Pembangunan manusia dan pembangunan gender serta pembangunan manusia dan pemberdayaan gender di Provinsi Aceh, Lampung, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat justru tergolong buruk dan tidak ada perubahan dari tahun 2006 hingga 2012. Pada dasarnya, pembangunan manusia di wilayah tersebut telah selaras dengan pembangunan gender maupun pemberdayaan gender. Akan tetapi, kinerja pembangunan di wilayah tersebut tidak cukup optimal sehingga capaiannya berada di bawah capaian nasional. Upaya menyelaraskan dan meningkatkan kinerja pembangunan manusia dan gender di wilayah ini bukanlah hal yang mudah karena dalam periode 2006 hingga 2012 kinerja wilayah ini tidak banyak berubah.

### 5.3 Hubungan antara IPG dengan IDG

Idealnya, capaian pembangunan gender memiliki hubungan positif dengan capaian pemberdayaan gender. Artinya, meningkatnya pembangunan gender pada suatu wilayah harus diiringi dengan meningkatnya pemberdayaan gendernya. Singkatnya, apabila nilai IPG di suatu wilayah tinggi, maka nilai IDG juga seharusnya tinggi.

**Tabel 5.4 Hubungan Antara IPG dengan IDG, 2006-2009-2012**

Kuadran I			Kuadran II		
2006	2009	2012	2006	2009	2012
SumUt	DKI	DKI	-	SumUt	SumUt
SumBar	Jakarta	Jakarta		SumBar	SumBar
Bengkulu	KalTeng	DIY		DIY	SumSel
DKI	SulUt	KalTeng			Bengkulu
Jakarta		SulUt			Bali
DIY		Maluku			
Bali					
KalTeng					
SulUt					
<b>(8)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>	<b>(0)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>
Kuadran III			Kuadran IV		
2006	2009	2012	2006	2009	2012
Aceh	Aceh	Aceh	SulTeng	SulBar	JaTeng
Riau	Riau	Riau	SulBar	Papua	
Jambi	Jambi	Jambi	Papua		
SumSel	SumSel	Lampung			
Lampung	Bengkulu	Kep.			
Kep.	Lampung	Babel			
Babel	Kep.	Kep. Riau			
Kep. Riau	Babel	JaBar			
JaBar	Kep. Riau	JaTim			
JaTeng	JaBar	Banten			
JaTim	JaTeng	NTB			
Banten	JaTim	NTT			
NTB	Banten	KalBar			
NTT	Bali	KalSel			
KalBar	NTB	KalTim			
KalSel	NTT	SulTeng			
KalTim	KalBar	SulSel			
SulSel	KalSel	SulTra			
SulTra	KalTim	Gorontalo			
Gorontalo	SulTeng	SulBar			
Maluku	SulSel	Maluku Utara			
Maluku Utara	SulTra	Papua Barat			
Papua Barat	Gorontalo	Papua			
	Maluku				
	Maluku Utara				
	Papua Barat				
<b>(14)</b>	<b>(17)</b>	<b>(14)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>

Sumber: BPS

Berdasarkan capaian IPG dan IDG selama 2006-2009-2012, provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kuadran sebagai berikut.

#### Kuadran I : IPG tinggi dan IDG tinggi

Provinsi yang masuk dalam kelompok ini merupakan provinsi dengan capaian pembangunan gender dan pemberdayaan berada di atas capaian tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan manusia yang tinggi di masing-masing provinsi telah disertai dengan tingginya peranan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial. Jumlah provinsi yang masuk dalam kelompok ini pada tahun 2006 sebanyak 8 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Pada tahun 2009, jumlah provinsi yang masuk kelompok ini menurun drastis menjadi 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Sementara pada tahun 2012, jumlah provinsi pada kelompok ini menjadi 5 dengan masuknya Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Maluku. Selama kurun waktu 2006-2012, hanya Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara yang mampu bertahan dalam kelompok ini.

#### Kuadran II : IPG tinggi dan IDG rendah

Provinsi-provinsi dalam kelompok ini sudah memiliki pembangunan gender yang tinggi, namun belum optimal dalam memberdayakannya. Capaian pembangunan gender dalam kelompok ini telah melampaui capaian secara nasional, tapi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, kegiatan ekonomi dan sosial masih lebih rendah

dibandingkan dengan capaian tingkat nasional. Pada tahun 2006, tidak ada satupun provinsi yang masuk dalam kelompok ini. Tahun 2009, terdapat 3 provinsi yang masuk dalam kelompok ini, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan DI Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2012, jumlah provinsi pada kelompok ini mencapai 5 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bali.

### Kuadran III : IPG rendah dan IDG rendah

Provinsi yang masuk kelompok ini relatif tinggi jumlahnya dibanding kelompok lain. Tercatat bahwa pada tahun 2006 terdapat 22 provinsi yang masuk dalam kelompok ini, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Pada tahun 2009, Provinsi Bengkulu, Bali, dan Sulawesi Tengah masuk dalam kelompok ini sehingga jumlah provinsi dalam kelompok ini meningkat menjadi 25 provinsi. Selanjutnya, jumlah provinsi dalam kelompok ini turun menjadi 22 pada tahun 2012. Banyaknya jumlah provinsi yang masuk dalam kelompok ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia dengan mengupayakan peningkatan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik, dan dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

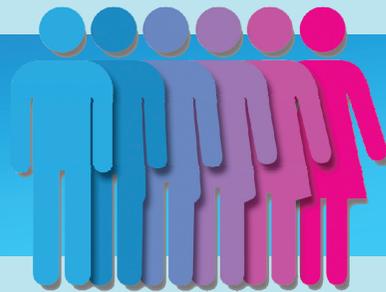
#### Kuadran IV : IPG rendah dan IDG tinggi

Pembangunan gender pada kelompok ini relatif rendah, tetapi peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan sudah relatif tinggi. Tantangan yang dihadapi pada kelompok ini adalah perlunya meningkatkan kualitas pembangunan manusia berbasis gender. Provinsi yang masuk dalam kelompok ini pada tahun 2006 antara lain Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. Tahun 2009, provinsi yang berada pada kelompok ini adalah Sulawesi Barat dan Papua. Sementara itu, pada tahun 2012, provinsi yang berada pada kelompok ini hanya Jawa Tengah.

# Kesimpulan



# Kesimpulan





# Kesimpulan

- Secara umum capaian pembangunan manusia di Indonesia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2004-2012 dan lebih dari 90 persen kabupaten/kota di Indonesia telah masuk dalam kategori capaian IPM menengah ke atas pada tahun 2012. Meskipun menunjukkan perbaikan, namun ukuran tersebut belum dapat menggambarkan kondisi pembangunan manusia yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan.
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Ketimpangan antara capaian IPM dan IPG yang dilihat dari rasio keduanya, selama kurun waktu 2004-2012 masih cukup tinggi dan cenderung tetap. Ketimpangan tersebut disumbang oleh komponen-komponen pembentuk IPG yang secara umum memperlihatkan bahwa capaian perempuan pada dimensi pendidikan dan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.
- Jarak antara provinsi dengan capaian IPG tertinggi (DKI Jakarta) dan terendah (Nusa Tenggara Barat) sebesar 17,02 poin. Hal tersebut

menandakan bahwa masih terjadi kesenjangan capaian pembangunan manusia menurut gender pada level provinsi. Meski demikian kesenjangan tersebut menunjukkan tren yang semakin menurun.

- Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta merupakan provinsi yang paling baik dalam hal capaian pembangunan manusia dan pembangunan gendernya dari tahun 2006-2012, tercermin dari tingginya nilai IPM dan nilai IDG.
- Selisih antara nilai IPM dan IPG memperlihatkan kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin besar selisih antara keduanya, maka kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk.
- Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan gap antara IPM dan IPG paling besar, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur memperlihatkan nilai gap yang paling kecil. Namun hal ini bukan berarti capaian pembangunan manusia (laki-laki dan perempuan) di NTT sudah cukup bagus karena kesenjangan (*gap*) tidak memperlihatkan level pembangunan yang dicapai.
- Indeks pemberdayaan gender (IDG) terus meningkat, hal ini menggambarkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan ketenagakerjaan meningkat. Provinsi Maluku menempati posisi tertinggi dalam pencapaian IDG dan Provinsi Aceh menempati posisi terendah. Gap antara kedua provinsi tersebut masih cukup tinggi yaitu 25,78 poin meskipun menurun dari tahun 2011.

# Daftar Pustaka

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2007. Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender, *Modul 2 : Konsep dan Teori Gender*. Jakarta : Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN.
- Elizabeth, R. 2007. Woman Empowerment to Support Gender Mainstreaming in Rural Agricultural Development Policies. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 25 No. 2 : 126-135.
- Haines, J. 1992. *Suffrage to Sufferance: 100 Years of Women in Politics*. Sydney: Allen & Unwin Pty. Ltd.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2011. *Kertas Kebijakan 1: Pengarusutamaan Gender*. Jakarta : KPPPA.
- Parawansa, K.I. 1998. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Kebijakan Bank Mengenai Gender dan Pembangunan*. World Bank.
- Seager, J. 1997. *The State of Women in the World Atlas*. London: Penguin Books Limited.
- Sun, Tsai-Wei. 2005. *Gender Representation In Politics and Public Administration: Taiwan and Asian Countries*. Singapore : National University of Singapore.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2005. *Human Development Report 2005, International Cooperation at a Crossroads : Aid, Trade, and Security in an Equal World*. New York : Hoechstetter Printing Co.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2006. *Human Development Report 2006, Beyond Scarcity : Power, Poverty and the Global Water Crisis*. New York : Palgrave Macmillan.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2007. *Human Development Report 2007/2008, Fighting Climate Change : Human Solidarity in a Divided World*. New York : Palgrave Macmillan.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2010. *Human Development Report 2010, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*. New York : Palgrave Macmillan.

United Nations Development Programme (UNDP). 2011. *Human Development Report 2011, Sustainability and Equity : A Better Future for All*. New York: Palgrave Macmillan.

United Nations Development Programme (UNDP). 2013. *Human Development Report 2013, The Rise of The South: Human Progress in Diverse World*. New York: Palgrave Macmillan.

# Tim Penulis

## **Pengarah:**

J. Bambang Kristianto  
Lies Rosdianty

## **Editor:**

Margo Yuwono  
Harmawanti Marhaeni  
Rustam  
Tri Nugrahadi

## **Penulis:**

Haerani Natali Agustini  
Yoyo Karyono  
Dyah Retno Prihatiningsih  
Adi Nugroho  
Evi Rahma Hismadinda

## **Pengolah Data:**

Adi Nugroho  
Evi Rahma Hismadinda

## **Perapihan Naskah:**

Adi Nugroho



# Lampiran





IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2011-2012

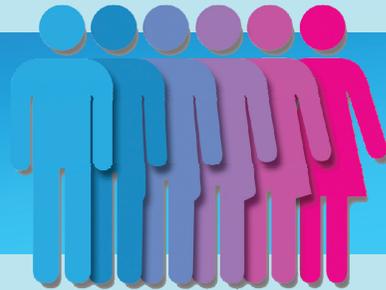


IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2011-2012



IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2011-2012

# Lampiran



**Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2011-2012**

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
		(tahun)	(tahun)	(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah PPP)	(ribu rupiah PPP)		
1100	ACEH	72,16	72,51	68,80	68,94	96,95	96,99	8,90	8,93	615,60	618,79
1101	Simeulue	69,73	70,09	63,05	63,12	98,85	99,29	8,62	8,63	622,72	625,59
1102	Aceh Singkil	68,98	69,37	65,10	65,28	96,25	96,25	7,77	7,78	613,88	617,48
1103	Aceh Selatan	70,36	70,71	67,03	67,14	96,55	96,55	8,44	8,45	610,56	614,19
1104	Aceh Tenggara	71,94	72,25	69,26	69,29	97,97	97,97	9,36	9,37	602,06	605,79
1105	Aceh Timur	70,94	71,17	69,80	69,86	98,25	98,27	8,51	8,53	592,58	594,86
1106	Aceh Tengah	74,18	74,42	69,70	69,76	98,65	98,65	9,70	9,71	622,73	625,37
1107	Aceh Barat	71,20	71,73	70,06	70,15	94,60	94,96	8,54	8,80	604,24	607,02
1108	Aceh Besar	73,83	74,13	70,81	70,87	96,98	96,98	9,77	9,84	614,39	617,09
1109	Pidie	72,43	72,81	69,68	69,84	96,30	96,31	8,72	8,74	616,29	620,01
1110	Bireuen	73,38	73,70	72,39	72,43	98,51	98,51	9,28	9,29	597,44	601,22
1111	Aceh Utara	72,85	73,07	69,80	69,86	97,83	97,83	9,19	9,20	612,04	614,35
1112	Aceh Barat Daya	70,95	71,53	67,19	67,38	96,47	96,47	8,01	8,25	621,49	625,24
1113	Gayo Lues	68,22	68,54	67,15	67,22	87,38	87,89	8,73	8,74	605,62	607,65
1114	Aceh Tamiang	71,26	71,65	68,47	68,57	98,32	98,33	8,85	8,86	602,79	607,12
1115	Nagan Raya	69,68	70,64	69,70	69,76	89,89	91,77	7,75	8,11	608,27	611,39
1116	Aceh Jaya	69,99	70,35	68,08	68,13	94,12	94,76	8,73	8,73	602,50	604,83
1117	Bener Meriah	71,51	71,86	67,69	67,74	98,79	98,79	8,81	8,83	610,71	614,81
1118	Pidie Jaya	72,82	73,13	69,30	69,36	95,48	95,48	8,68	8,69	626,89	630,37
1171	Kota Banda Aceh	78,00	78,50	71,15	71,42	99,18	99,25	12,20	12,25	636,28	640,06
1172	Kota Sabang	76,47	76,88	71,30	71,59	99,08	99,09	10,59	10,60	631,10	634,22
1173	Kota Langsa	74,37	74,75	70,75	70,93	99,30	99,31	10,51	10,59	607,95	610,79
1174	Kota Lhokseumawe	76,68	77,23	71,17	71,47	99,64	99,65	10,04	10,38	638,45	640,07
1175	Kota Subulussalam	69,63	70,06	66,01	66,13	96,55	96,55	7,61	7,63	616,48	620,99

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)	
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1200	SUMATERA UTARA	74,65	75,13	69,65	69,81	97,46	97,51	8,91	9,07	640,23	643,63
1201	Nias	69,09	69,55	69,77	69,94	90,78	90,79	6,42	6,46	610,40	614,77
1202	Mandailing Natal	71,04	71,44	63,70	63,79	99,34	99,34	7,92	7,96	640,33	644,44
1203	Tapanuli Selatan	74,45	74,78	67,34	67,48	99,83	99,83	8,95	8,97	647,03	650,18
1204	Tapanuli Tengah	71,63	72,04	68,26	68,40	95,82	95,84	8,15	8,19	623,03	626,92
1205	Tapanuli Utara	74,86	75,33	70,02	70,33	98,60	98,62	8,97	9,03	636,35	639,71
1206	Toba Samosir	76,93	77,21	70,75	70,82	98,49	98,50	9,85	9,87	649,91	652,85
1207	Labuhan Batu	74,65	75,29	70,02	70,23	97,96	98,32	8,55	8,78	639,53	643,08
1208	Asahan	73,25	73,80	69,13	69,28	97,70	98,00	7,92	8,17	634,67	637,36
1209	Simalungun	73,94	74,35	69,08	69,20	97,57	97,58	8,71	8,81	636,82	640,30
1210	Dairi	73,49	73,86	68,59	68,78	98,70	98,71	8,91	8,95	629,29	632,23
1211	Karo	75,79	76,22	72,29	72,38	98,72	98,73	9,22	9,29	629,36	633,61
1212	Deli Serdang	75,78	76,17	70,88	71,11	98,64	98,66	9,56	9,56	636,39	639,77
1213	Langkat	73,62	73,98	69,12	69,16	97,27	97,48	8,78	8,80	632,54	636,08
1214	Nias Selatan	67,72	68,23	70,36	70,70	85,28	85,36	6,40	6,44	604,39	608,04
1215	Humbang Hasundutan	72,43	72,80	67,96	68,06	98,22	98,22	9,31	9,34	617,64	621,32
1216	Pakpak Bharat	71,20	72,00	67,81	68,03	96,53	97,51	8,22	8,49	617,98	621,39
1217	Samosir	74,27	74,72	69,84	69,95	97,47	97,92	9,54	9,55	627,89	631,43
1218	Serdang Bedagai	73,64	74,07	69,08	69,18	97,80	97,81	8,65	8,67	632,71	637,36
1219	Batu Bara	72,08	72,71	68,71	68,83	95,27	96,10	7,54	7,88	633,10	634,83
1220	Padang Lawas Utara	73,25	73,59	66,62	66,67	99,53	99,53	8,89	8,93	638,06	641,80
1221	Padang Lawas	72,55	72,96	67,09	67,15	99,66	99,66	8,40	8,43	630,00	634,60
1222	Labuhan Batu Selatan	74,38	74,90	70,23	70,50	98,93	98,94	8,24	8,36	634,67	638,28
1223	Labuhan Batu Utara	74,14	74,92	69,97	70,31	98,53	98,90	8,01	8,26	636,80	641,05
1224	Nias Utara	68,18	68,71	69,24	69,33	89,30	89,31	6,13	6,45	609,48	612,58
1225	Nias Barat	67,10	67,59	69,23	69,31	84,46	84,47	5,88	6,17	611,91	614,83
1271	Kota Sibolga	75,50	75,73	70,29	70,34	99,31	99,33	9,72	9,77	633,58	635,65
1272	Kota Tanjung Balai	74,72	75,06	70,76	71,09	99,02	99,09	8,89	9,08	628,81	628,91
1273	Kota Pematang Siantar	77,93	78,27	72,29	72,42	99,47	99,47	10,89	10,93	639,01	642,02
1274	Kota Tebing Tinggi	76,91	77,34	71,47	71,60	99,02	99,03	9,90	9,92	642,49	646,89
1275	Kota Medan	77,81	78,25	72,06	72,21	99,38	99,52	10,86	10,86	639,60	643,76
1276	Kota Binjai	76,88	77,36	71,89	72,01	99,20	99,22	9,99	10,00	637,70	642,85
1277	Kota Padangsidimpuan	75,58	76,04	69,72	69,84	99,72	99,74	10,21	10,36	632,81	636,32
1278	Kota Gunungsitoli	72,21	72,61	70,29	70,63	94,86	94,88	8,45	8,48	615,91	618,19

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
		(tahun)	(tahun)	(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah PPP)	(ribu rupiah PPP)		
1300	SUMATERA BARAT	74,28	74,70	69,76	70,02	97,16	97,23	8,57	8,60	638,73	641,85
1301	Kepulauan Mentawai	69,06	69,26	68,54	68,63	93,67	93,69	6,52	6,52	609,56	611,43
1302	Pesisir Selatan	71,77	72,43	67,59	67,88	95,01	96,00	8,12	8,23	632,30	634,99
1303	Solok	71,73	72,15	66,95	67,30	97,21	97,24	8,03	8,04	631,02	633,78
1304	Sijunjung	71,40	71,80	67,25	67,58	94,79	94,80	7,50	7,51	636,58	639,31
1305	Tanah Datar	74,58	75,00	71,30	71,67	97,25	97,27	8,40	8,41	632,89	635,60
1306	Padang Pariaman	71,98	72,53	69,01	69,38	94,51	94,53	7,31	7,46	634,09	637,05
1307	Agam	73,74	74,11	69,23	69,43	97,86	97,87	8,59	8,61	633,28	636,57
1308	Lima Puluh Kota	71,78	72,24	68,81	69,18	98,99	99,01	8,00	8,01	613,39	616,54
1309	Pasaman	73,19	73,78	67,77	68,11	98,82	98,84	7,66	7,87	642,90	646,09
1310	Solok Selatan	69,34	69,69	64,74	64,88	97,60	97,63	7,84	7,86	616,62	619,84
1311	Dharmasraya	69,89	70,25	66,25	66,50	97,27	97,29	8,24	8,24	610,06	612,72
1312	Pasaman Barat	70,62	71,07	65,41	65,68	98,29	98,32	8,03	8,06	624,64	628,04
1371	Kota Padang	78,15	78,55	71,14	71,39	99,50	99,51	10,92	10,94	649,62	652,88
1372	Kota Solok	76,04	76,54	69,86	70,03	98,52	99,21	10,48	10,49	638,63	641,79
1373	Kota Sawah Lunto	75,41	75,87	71,86	72,08	98,62	98,63	9,23	9,42	627,79	630,20
1374	Kota Padang Panjang	78,12	78,51	71,66	72,01	99,31	99,32	10,73	10,74	647,98	650,36
1375	Kota Bukittinggi	78,73	79,07	71,69	71,85	99,93	99,93	10,58	10,59	655,31	658,39
1376	Kota Payakumbuh	76,29	76,76	70,78	70,94	99,19	99,20	9,72	9,91	640,51	643,67
1377	Kota Pariaman	74,89	75,23	69,25	69,48	98,93	98,94	9,92	9,93	632,35	634,90
1400	RIAU	76,53	76,90	71,55	71,69	98,42	98,45	8,63	8,64	650,83	654,48
1401	Kuantan Singingi	74,15	74,50	68,43	68,53	98,06	98,09	8,03	8,06	649,28	652,69
1402	Indragiri Hulu	74,54	74,90	68,91	69,01	98,21	98,22	8,01	8,01	650,72	654,52
1403	Indragiri Hilir	75,71	76,15	71,63	71,88	99,15	99,18	7,63	7,63	647,22	650,91
1404	Pelalawan	73,59	73,92	68,95	69,08	98,48	98,51	8,24	8,24	635,05	638,32
1405	Siak	76,92	77,27	71,86	72,03	98,65	98,68	9,14	9,14	648,16	651,35
1406	Kampar	75,18	75,54	68,67	68,83	98,58	98,60	8,92	8,93	650,82	654,20
1407	Rokan Hulu	73,10	73,62	67,21	67,26	98,37	98,40	7,68	7,94	646,92	650,69
1408	Bengkalis	75,53	75,86	70,46	70,56	98,16	98,17	9,17	9,18	641,33	644,81
1409	Rokan Hilir	72,83	73,17	67,25	67,32	98,15	98,18	7,89	7,90	641,77	645,54
1410	Kepulauan Meranti	71,08	71,47	68,86	68,98	90,34	90,36	7,35	7,35	635,16	639,27
1471	Kota Pekanbaru	78,72	79,16	71,67	71,88	99,89	99,90	11,34	11,35	648,05	652,20
1473	Kota Dumai	78,25	78,73	71,95	72,26	99,35	99,40	9,73	9,74	657,01	660,81

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
				(tahun)	(tahun)	(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah PPP)	(ribu rupiah PPP)
1500	JAMBI	73,30	73,78	69,25	69,44	96,16	96,20	8,05	8,20	637,60	640,82
1501	Kerinci	74,76	75,11	70,96	71,09	97,25	97,26	8,20	8,27	639,64	642,65
1502	Merangin	72,40	72,85	68,61	68,83	97,52	97,53	7,55	7,65	631,42	634,70
1503	Sarolangun	73,08	73,61	69,57	69,71	94,97	94,98	7,32	7,55	642,92	646,48
1504	Batang Hari	73,44	73,83	69,36	69,56	97,58	97,58	7,90	7,92	635,94	639,40
1505	Muaro Jambi	73,12	73,59	69,32	69,39	96,71	96,84	8,02	8,17	633,40	637,32
1506	Tanjung Jabung Timur	72,05	72,52	70,76	71,09	92,44	92,44	6,30	6,39	638,15	640,95
1507	Tanjung Jabung Barat	73,24	73,70	69,87	70,05	97,93	97,93	7,58	7,60	631,78	636,24
1508	Tebo	72,30	72,69	69,24	69,37	94,93	95,22	7,41	7,43	634,36	637,47
1509	Bungo	72,50	73,05	67,54	67,81	96,33	96,34	8,16	8,18	638,02	642,95
1571	Kota Jambi	76,60	77,08	69,91	69,95	99,07	99,07	10,37	10,56	644,99	649,09
1572	Kota Sungai Penuh	77,02	77,63	71,03	71,09	97,25	97,28	9,23	9,68	658,66	661,60
1600	SUMATERA SELATAN	73,42	73,99	69,80	70,05	97,44	97,50	7,84	7,99	633,57	637,47
1601	Ogan Komering Ulu	73,59	74,01	69,50	69,61	98,47	98,49	8,40	8,51	629,57	633,19
1602	Ogan Komering Ilir	71,07	71,45	68,25	68,48	96,61	96,62	6,75	6,76	627,12	630,28
1603	Muara Enim	71,26	71,65	67,85	68,03	98,85	98,85	7,52	7,53	618,62	622,30
1604	Lahat	71,83	72,29	68,57	68,90	97,83	97,84	8,31	8,37	616,13	619,03
1605	Musi Rawas	68,38	69,01	64,95	65,10	96,55	97,36	7,11	7,14	612,59	617,20
1606	Musi Banyuasin	72,44	73,15	70,12	70,39	97,70	98,59	7,61	7,63	619,92	624,50
1607	Banyu Asin	70,28	70,70	67,59	67,77	96,50	96,51	7,06	7,08	618,83	622,82
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	71,82	72,29	69,44	69,51	97,93	98,35	7,47	7,48	617,55	621,73
1609	Ogan Komering Ulu Timur	70,34	70,72	68,42	68,48	94,85	94,86	7,29	7,30	616,35	620,67
1610	Ogan Ilir	70,09	70,52	66,57	66,86	97,71	97,73	7,56	7,57	615,47	618,79
1611	Empat Lawang	69,08	69,69	65,64	65,78	97,83	98,36	7,40	7,69	610,32	612,92
1671	Kota Palembang	76,69	77,38	71,37	71,60	98,73	98,94	9,98	10,30	640,30	643,98
1672	Kota Prabumulih	74,94	75,45	72,32	72,73	98,71	98,72	9,25	9,29	617,77	621,13
1673	Kota Pagar Alam	73,70	74,15	70,39	70,61	98,60	98,62	8,97	9,01	618,67	622,47
1674	Kota Lubuklinggau	71,10	71,46	65,84	65,99	98,50	98,51	9,36	9,37	614,34	617,82
1700	BENGGKULU	73,40	73,93	70,16	70,39	95,40	95,69	8,33	8,48	631,86	634,74
1701	Bengkulu Selatan	72,78	73,18	67,59	67,77	96,51	96,54	8,60	8,67	636,57	639,61
1702	Rejang Lebong	71,70	72,21	67,62	67,98	95,65	95,74	7,97	8,01	630,72	634,20
1703	Bengkulu Utara	72,19	72,74	69,75	69,97	92,90	93,54	7,67	7,84	632,59	634,75
1704	Kaur	70,43	71,13	67,54	67,85	96,36	97,08	7,94	8,17	613,14	615,69
1705	Seluma	67,29	67,69	65,98	66,25	93,96	94,09	7,43	7,46	595,40	598,07
1706	Mukomuko	71,11	71,53	67,99	68,17	94,08	94,10	7,69	7,74	627,72	631,29
1707	Lebong	70,66	71,12	67,04	67,43	95,54	95,56	7,92	7,93	622,36	625,28
1708	Kepahiang	68,63	69,41	64,57	64,88	95,91	96,41	7,78	8,10	614,02	617,40
1709	Bengkulu Tengah	69,01	69,35	70,19	70,27	91,89	91,91	7,25	7,26	595,19	598,86
1771	Kota Bengkulu	77,99	78,51	70,66	70,84	99,28	99,32	11,03	11,26	650,68	653,78

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Dिसुsuaikan	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
				(tahun)	(tahun)	(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah PPP)	(ribu rupiah PPP)
<b>1800</b>	<b>LAMPUNG</b>	<b>71,94</b>	<b>72,45</b>	<b>69,75</b>	<b>70,05</b>	<b>95,02</b>	<b>95,13</b>	<b>7,82</b>	<b>7,87</b>	<b>621,77</b>	<b>625,52</b>
1801	Lampung Barat	69,72	70,17	67,45	67,77	97,33	97,36	7,46	7,47	606,45	609,69
1802	Tanggamus	71,83	72,32	69,74	70,15	95,47	95,48	7,40	7,43	623,22	626,37
1803	Lampung Selatan	70,53	70,95	68,74	69,05	94,91	94,94	7,49	7,50	614,29	617,36
1804	Lampung Timur	71,26	71,64	70,48	70,74	93,63	93,74	7,58	7,60	614,06	616,69
1805	Lampung Tengah	71,29	71,81	69,48	69,72	93,74	93,74	7,41	7,60	623,05	626,14
1806	Lampung Utara	70,81	71,28	68,21	68,49	95,32	95,71	8,10	8,10	614,70	617,67
1807	Way Kanan	70,43	70,84	69,70	69,96	94,89	94,91	7,32	7,33	607,79	611,10
1808	Tulangbawang	70,96	71,60	69,13	69,41	94,52	95,79	7,20	7,39	620,96	621,81
1809	Pesawaran	70,30	70,90	68,56	68,71	95,58	96,76	7,51	7,53	610,53	613,62
1810	Pringsewu	72,37	72,80	68,64	68,77	94,72	95,09	8,60	8,62	628,80	632,20
1811	Mesuji	67,98	68,30	68,45	68,50	93,30	93,30	6,37	6,39	598,74	602,26
1812	Tulang Bawang Barat	69,32	69,82	68,72	68,78	93,03	93,88	7,47	7,49	604,38	607,88
1871	Kota Bandar Lampung	76,29	76,83	71,24	71,61	98,47	98,50	10,18	10,30	634,96	638,04
1872	Kota Metro	76,95	77,30	72,76	72,98	98,38	98,40	10,12	10,15	633,37	636,08
<b>1900</b>	<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>73,37</b>	<b>73,78</b>	<b>69,05</b>	<b>69,21</b>	<b>95,83</b>	<b>95,88</b>	<b>7,58</b>	<b>7,68</b>	<b>645,37</b>	<b>648,49</b>
1901	Bangka	73,23	73,67	67,85	68,06	96,65	96,71	8,00	8,10	645,87	648,92
1902	Belitung	73,77	74,13	69,26	69,36	96,57	96,57	7,84	7,85	644,52	648,27
1903	Bangka Barat	70,54	70,94	67,90	68,02	93,59	93,85	6,95	7,02	629,50	632,42
1904	Bangka Tengah	71,63	72,27	68,05	68,19	95,95	96,79	6,96	7,17	635,69	638,52
1905	Bangka Selatan	67,36	67,73	67,92	68,13	93,66	93,68	6,01	6,04	596,94	599,84
1906	Belitung Timur	72,44	72,87	69,06	69,28	96,71	96,74	7,72	7,74	629,39	633,09
1971	Kota Pangkal Pinang	76,54	76,85	70,54	70,65	98,20	98,22	10,03	10,05	645,50	648,52
<b>2100</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>75,78</b>	<b>76,20</b>	<b>69,85</b>	<b>69,91</b>	<b>97,67</b>	<b>97,80</b>	<b>9,73</b>	<b>9,81</b>	<b>644,96</b>	<b>648,92</b>
2101	Karimun	73,99	74,45	69,93	69,94	96,36	96,83	8,14	8,16	640,24	644,56
2102	Bintan	75,17	75,68	69,76	69,80	96,14	96,92	8,91	8,95	650,00	653,63
2103	Natuna	71,26	71,77	68,37	68,43	96,63	96,82	7,64	7,78	620,14	624,33
2104	Lingga	71,68	72,09	70,26	70,37	91,79	91,79	7,24	7,27	629,65	633,85
2105	Kepulauan Anambas	69,50	70,11	67,53	67,66	91,87	91,87	6,38	6,67	629,07	633,29
2171	Kota Batam	78,03	78,46	70,86	70,91	98,97	99,29	10,78	10,84	653,07	656,71
2172	Kota Tanjung Pinang	75,25	75,97	69,67	69,72	98,70	98,70	9,68	10,18	636,87	641,10
<b>3100</b>	<b>DKI JAKARTA</b>	<b>77,97</b>	<b>78,33</b>	<b>73,35</b>	<b>73,49</b>	<b>99,15</b>	<b>99,21</b>	<b>10,95</b>	<b>10,98</b>	<b>632,17</b>	<b>635,29</b>
3101	Kep. Seribu	71,16	71,45	70,66	70,77	98,38	98,40	8,19	8,20	591,84	594,69
3171	Kota Jakarta Selatan	79,82	80,17	73,69	73,87	99,37	99,39	11,09	11,10	651,70	654,73
3172	Kota Jakarta Timur	79,31	79,80	73,53	73,70	99,11	99,55	11,10	11,13	646,87	650,42
3173	Kota Jakarta Pusat	78,68	79,12	72,43	72,55	99,53	99,55	10,77	10,87	648,69	652,47
3174	Kota Jakarta Barat	79,09	79,43	73,63	73,79	98,98	99,00	10,75	10,75	647,14	650,23
3175	Kota Jakarta Utara	77,93	78,25	72,95	73,08	99,18	99,20	10,07	10,08	642,91	645,99

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
3200	JAWA BARAT	72,73	73,11	68,40	68,60	96,29	96,39	8,06	8,08	635,80	638,90
3201	Bogor	72,58	73,08	69,28	69,70	95,09	95,27	7,99	8,00	631,63	634,52
3202	Sukabumi	71,06	71,50	67,38	67,70	97,35	97,56	6,90	6,93	629,72	632,14
3203	Cianjur	69,59	70,02	66,35	66,70	97,64	97,67	6,85	6,87	617,59	620,40
3204	Bandung	74,43	74,73	69,10	69,17	98,75	98,78	8,46	8,47	642,00	645,17
3205	Garut	71,70	72,12	66,00	66,39	98,96	98,98	7,37	7,37	638,77	641,28
3206	Tasikmalaya	72,51	72,84	68,18	68,40	98,92	98,95	7,33	7,34	634,06	636,53
3207	Ciamis	71,81	72,14	67,47	67,65	97,93	97,96	7,47	7,47	631,63	634,46
3208	Kuningan	71,55	71,99	67,59	67,71	96,99	97,02	7,22	7,46	632,44	634,98
3209	Cirebon	69,27	69,58	65,41	65,52	92,41	92,50	6,87	6,89	635,25	637,93
3210	Majalengka	70,81	71,16	66,62	66,88	95,11	95,14	7,17	7,19	635,71	638,12
3211	Sumedang	72,67	72,95	67,52	67,63	97,75	97,82	7,94	7,96	638,36	640,82
3212	Indramayu	68,40	68,89	67,23	67,64	85,66	85,69	5,95	5,96	638,98	642,33
3213	Subang	71,50	71,79	69,54	69,69	92,47	92,50	6,94	6,96	633,46	635,84
3214	Purwakarta	71,59	72,21	67,35	67,64	96,07	96,65	7,44	7,57	635,21	638,28
3215	Karawang	70,28	70,89	67,00	67,30	93,22	93,24	7,02	7,32	633,04	635,90
3216	Bekasi	73,54	74,13	69,73	70,07	94,14	94,39	8,60	8,73	637,76	641,01
3217	Bandung Barat	73,80	74,03	68,68	68,71	99,11	99,14	8,11	8,11	639,14	641,72
3271	Kota Bogor	76,08	76,47	68,97	69,07	98,79	98,97	9,80	9,81	651,25	655,00
3272	Kota Sukabumi	75,36	75,73	69,70	69,96	99,67	99,72	9,35	9,36	638,41	641,18
3273	Kota Bandung	76,39	76,86	69,78	69,85	99,70	99,72	10,45	10,62	640,65	644,48
3274	Kota Cirebon	75,42	76,02	68,52	68,54	97,06	97,44	9,75	10,13	651,47	654,29
3275	Kota Bekasi	76,68	77,17	69,70	69,76	98,56	98,57	10,58	10,84	646,92	650,45
3276	Kota Depok	79,36	79,71	73,22	73,34	98,96	99,01	10,97	10,98	651,46	654,95
3277	Kota Cimahi	76,01	76,28	69,25	69,32	99,74	99,80	10,61	10,61	637,86	640,62
3278	Kota Tasikmalaya	74,85	75,35	70,23	70,60	99,57	99,75	8,85	8,88	633,13	636,11
3279	Kota Banjar	71,82	72,10	66,38	66,49	97,30	97,33	8,12	8,12	635,10	637,86

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
		(tahun)	(tahun)	(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah PPP)	(ribu rupiah PPP)		
3300	JAWA TENGAH	72,94	73,36	71,55	71,71	90,34	90,45	7,29	7,39	640,41	643,53
3301	Gilacap	72,34	72,77	71,12	71,43	91,48	91,49	6,86	6,87	636,62	639,78
3302	Banyumas	72,96	73,33	69,78	69,83	94,06	94,24	7,76	7,79	638,27	641,78
3303	Purbalingga	72,50	72,97	70,44	70,68	93,50	93,52	7,21	7,23	634,44	638,41
3304	Banjarnegara	70,39	70,70	69,20	69,36	88,48	88,49	6,34	6,35	638,79	641,53
3305	Kebumen	71,62	71,86	69,37	69,43	91,53	91,54	6,92	6,93	639,16	641,78
3306	Purworejo	72,91	73,53	70,78	71,04	91,74	92,79	7,84	7,93	636,29	638,51
3307	Wonosobo	71,06	71,45	70,23	70,48	91,16	91,43	6,55	6,56	630,41	632,71
3308	Magelang	72,69	73,14	70,18	70,23	93,29	93,31	7,33	7,55	638,16	641,45
3309	Boyolali	71,25	71,50	70,43	70,49	87,96	87,97	7,42	7,43	632,19	634,86
3310	Klaten	74,10	74,46	71,67	71,84	89,92	89,93	8,28	8,31	646,39	649,49
3311	Sukoharjo	73,97	74,21	70,29	70,36	90,72	90,73	8,52	8,53	649,96	652,39
3312	Wonogiri	71,86	72,59	72,35	72,42	83,50	84,32	6,35	6,65	649,51	653,07
3313	Karanganyar	73,82	74,62	72,28	72,36	88,90	88,95	7,41	8,27	649,70	651,05
3314	Sragen	71,33	71,85	72,75	72,95	84,41	84,41	7,02	7,22	630,61	633,90
3315	Grobogan	71,27	71,77	69,89	70,05	90,41	90,94	6,81	6,83	635,15	638,68
3316	Blora	71,25	71,49	71,41	71,48	85,06	85,06	6,45	6,46	642,83	645,28
3317	Rembang	72,45	72,81	70,23	70,34	91,36	91,37	6,89	7,05	644,43	646,90
3318	Pati	73,49	73,81	72,89	72,95	87,59	87,61	6,98	7,01	648,77	652,22
3319	Kudus	73,24	73,69	69,68	69,73	93,73	93,74	8,12	8,49	639,98	642,02
3320	Jepara	73,12	73,54	70,99	71,13	93,15	93,29	7,52	7,58	636,45	639,89
3321	Demak	73,09	73,52	71,59	71,95	92,53	92,54	7,60	7,62	632,87	635,62
3322	Semarang	74,45	74,98	72,54	72,60	93,67	94,20	7,87	8,07	637,71	640,67
3323	Temanggung	74,47	74,74	72,66	72,77	95,96	95,97	7,09	7,10	638,07	640,56
3324	Kendal	70,85	71,48	68,77	69,10	89,31	89,77	6,93	7,11	639,78	642,55
3325	Batang	71,06	71,41	70,34	70,57	89,90	89,93	6,72	6,73	631,55	634,28
3326	Pekalongan	71,86	72,37	69,28	69,56	92,08	92,11	6,70	6,80	643,53	646,96
3327	Pemalang	70,22	70,66	67,90	68,12	90,79	90,80	6,51	6,54	637,71	641,52
3328	Tegal	71,09	71,74	69,08	69,38	89,47	90,64	6,60	6,62	643,48	646,19
3329	Brebes	68,61	69,37	67,96	68,26	86,15	86,69	5,72	6,07	637,29	640,06
3371	Kota Magelang	76,83	77,26	70,28	70,34	97,29	97,52	10,22	10,36	651,91	655,08
3372	Kota Surakarta	78,18	78,60	72,25	72,35	96,71	96,73	10,34	10,49	655,77	658,92
3373	Kota Salatiga	76,83	77,13	71,14	71,25	96,52	96,55	9,97	9,98	650,39	653,16
3374	Kota Semarang	77,42	77,98	72,18	72,24	96,47	96,98	10,11	10,30	649,21	652,80
3375	Kota Pekalongan	74,90	75,25	70,48	70,63	95,93	95,94	8,69	8,72	644,01	647,14
3376	Kota Tegal	74,20	74,63	68,93	69,12	94,90	94,91	8,27	8,30	653,11	656,99
3400	DI YOGYAKARTA	76,32	76,75	73,27	73,33	91,49	92,02	9,20	9,21	650,16	653,78
3401	Kulon Progo	75,04	75,33	74,48	74,58	92,00	92,04	8,37	8,37	631,42	634,34
3402	Bantul	75,05	75,51	71,33	71,34	91,23	92,19	8,92	8,95	651,17	654,06
3403	Gunung Kidul	70,84	71,11	71,01	71,04	84,94	84,97	7,70	7,70	628,73	631,91
3404	Sleman	78,79	79,39	75,18	75,29	93,44	94,53	10,51	10,52	650,27	654,11
3471	Kota Yogyakarta	79,89	80,24	73,48	73,51	98,07	98,10	11,52	11,56	653,79	657,65

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	2011	2012	(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
3500	JAWA TIMUR	72,18	72,83	69,86	70,09	88,52	89,28	7,34	7,45	647,46	651,04
3501	Pacitan	72,48	72,88	71,48	71,69	91,60	91,63	6,94	6,96	634,70	638,09
3502	Ponorogo	71,15	71,91	70,24	70,40	87,32	88,99	6,99	7,18	638,25	640,30
3503	Trenggalek	73,66	74,09	71,87	72,13	92,84	92,88	7,26	7,31	640,56	643,71
3504	Tulungagung	73,76	74,45	71,72	71,95	93,58	94,57	7,85	7,95	635,15	638,53
3505	Blitar	74,06	74,43	71,09	71,30	92,02	92,05	7,36	7,40	652,75	655,57
3506	Kediri	72,28	72,72	69,90	70,15	92,84	92,87	7,69	7,72	632,75	636,28
3507	Malang	71,17	71,94	69,23	69,50	89,59	90,73	7,02	7,08	639,07	643,20
3508	Lumajang	68,55	69,00	67,46	67,75	86,56	86,58	6,41	6,43	632,28	635,76
3509	Jember	65,53	65,99	63,03	63,21	83,60	83,65	6,73	6,79	630,48	634,48
3510	Banyuwangi	69,58	70,53	67,98	68,38	87,36	88,08	6,89	7,25	635,02	638,95
3511	Bondowoso	63,81	64,98	63,54	63,85	78,25	80,72	5,66	5,94	630,22	633,33
3512	Situbondo	64,67	65,06	63,36	63,52	78,27	78,31	6,19	6,22	637,51	641,12
3513	Probolinggo	63,84	64,35	61,42	61,70	80,44	80,48	5,80	5,92	638,17	641,64
3514	Pasuruan	68,24	69,17	64,31	64,61	90,03	91,17	6,54	6,83	639,73	643,59
3515	Sidoarjo	76,90	77,36	70,79	71,03	97,76	97,79	9,85	9,92	651,31	654,81
3516	Mojokerto	73,89	74,42	70,42	70,64	94,12	94,16	7,82	7,94	644,82	648,90
3517	Jombang	73,14	73,86	70,18	70,28	92,87	93,87	7,84	8,04	640,42	644,06
3518	Nganjuk	71,48	71,96	69,11	69,33	91,07	91,11	7,44	7,61	635,57	638,42
3519	Madiun	70,50	70,88	69,07	69,25	89,55	89,61	7,39	7,44	627,94	630,89
3520	Magetan	73,17	73,85	71,41	71,66	90,56	91,08	7,60	7,85	640,82	643,97
3521	Ngawi	69,73	70,20	70,24	70,57	85,54	85,58	6,99	7,02	624,99	628,38
3522	Bojonegoro	67,32	67,74	67,28	67,42	84,81	84,85	6,68	6,72	620,17	624,05
3523	Tuban	68,71	69,18	68,00	68,21	85,83	85,86	6,49	6,53	631,85	635,94
3524	Lamongan	70,52	71,05	68,37	68,55	88,71	88,76	7,46	7,59	634,92	639,15
3525	Gresik	75,17	75,97	71,22	71,47	94,56	96,17	8,84	8,98	644,70	647,31
3526	Bangkalan	65,01	65,69	63,48	63,65	82,87	82,90	5,30	5,74	636,44	639,67
3527	Sampang	60,78	61,67	63,49	63,98	67,56	69,12	4,20	4,22	636,12	639,43
3528	Pamekasan	65,48	66,51	64,39	64,79	81,82	84,21	6,32	6,32	629,18	632,76
3529	Sumenep	66,01	66,41	64,89	65,07	78,66	78,71	5,64	5,71	648,05	651,21
3571	Kota Kediri	76,79	77,20	70,64	70,86	97,56	97,60	10,21	10,24	648,01	651,38
3572	Kota Blitar	77,89	78,31	72,51	72,80	97,27	97,31	9,75	9,77	654,18	657,09
3573	Kota Malang	77,76	78,43	70,68	71,02	97,24	98,34	10,84	10,87	655,22	658,02
3574	Kota Probolinggo	74,85	75,44	70,52	70,86	92,51	92,55	8,53	8,67	654,52	658,14
3575	Kota Pasuruan	73,89	74,33	66,41	66,46	96,43	97,07	8,96	9,05	656,21	658,81
3576	Kota Mojokerto	77,50	78,01	71,78	72,00	97,13	97,18	9,98	10,11	652,47	656,18
3577	Kota Madiun	77,07	77,50	71,22	71,42	97,80	97,84	10,44	10,46	644,61	648,46
3578	Kota Surabaya	77,85	78,33	71,27	71,53	98,07	98,35	10,08	10,10	657,14	660,38
3579	Kota Batu	74,93	75,42	69,72	70,00	98,27	98,32	8,52	8,54	644,73	648,74

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
				(tahun)	(tahun)	(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah PPP)	(ribu rupiah PPP)
3600	BANTEN	70,95	71,49	65,05	65,23	96,25	96,51	8,41	8,61	633,64	636,73
3601	Pandeglang	68,77	69,22	63,95	64,13	96,37	96,41	6,81	6,97	628,41	631,24
3602	Lebak	67,98	68,43	63,35	63,42	94,82	95,69	6,25	6,27	632,21	634,85
3603	Tangerang	72,05	72,36	65,90	66,01	95,86	95,89	8,95	8,96	637,80	640,80
3604	Serang	69,33	69,83	63,88	64,25	95,72	95,75	7,25	7,36	633,72	636,45
3671	Kota Tangerang	75,44	75,72	68,41	68,44	98,41	98,43	10,04	10,07	645,90	648,93
3672	Kota Cilegon	75,60	75,89	68,62	68,67	98,73	98,77	9,68	9,72	648,88	651,86
3673	Kota Serang	71,45	72,30	65,47	65,81	96,89	96,92	8,01	8,58	639,17	642,18
3674	Kota Tangerang Selatan	76,01	76,61	68,65	68,77	98,19	98,51	10,70	10,98	645,78	649,12
5100	BALI	72,84	73,49	70,78	70,84	89,17	90,17	8,35	8,57	637,86	640,86
5101	Jembrana	73,18	73,62	71,88	71,95	90,69	91,36	7,81	7,86	635,24	637,96
5102	Tabanan	75,24	75,55	74,49	74,55	90,82	90,86	8,37	8,39	637,26	640,54
5103	Badung	75,35	75,69	71,85	71,91	92,96	93,01	9,45	9,47	641,27	644,94
5104	Gianyar	73,43	74,49	72,17	72,22	86,81	88,79	8,37	8,90	642,18	644,69
5105	Klungkung	71,02	71,76	69,15	69,20	82,39	84,15	7,35	7,43	655,28	658,53
5106	Bangli	71,42	71,80	71,73	71,81	85,64	85,83	6,66	6,68	639,00	642,64
5107	Karangasem	67,07	67,83	67,95	68,00	74,12	76,03	5,82	5,88	651,11	654,46
5108	Buleleng	71,12	71,93	69,34	69,53	88,63	89,94	7,36	7,54	637,03	640,64
5171	Kota Denpasar	78,31	78,80	73,06	73,12	97,49	97,52	10,70	10,94	645,85	649,48
5200	NUSA TENGGARA BARAT	66,23	66,89	62,41	62,73	83,24	83,68	6,97	7,19	642,80	645,72
5201	Lombok Barat	62,50	63,19	61,28	61,71	77,62	78,59	6,09	6,10	627,24	630,13
5202	Lombok Tengah	61,66	62,57	61,52	61,96	72,88	73,92	5,99	6,19	629,26	632,97
5203	Lombok Timur	63,93	64,91	61,32	61,88	82,89	83,89	6,61	6,91	625,27	628,09
5204	Sumbawa	66,67	67,23	60,82	60,93	90,85	90,87	7,35	7,64	634,41	638,03
5205	Dompu	66,70	67,58	61,16	61,26	86,35	87,94	7,71	7,97	641,82	645,50
5206	Bima	65,74	66,52	63,24	63,55	86,23	87,02	7,38	7,59	617,95	621,52
5207	Sumbawa Barat	67,08	67,85	61,45	61,61	91,47	92,50	7,52	8,02	631,73	632,76
5208	Lombok Utara	60,93	61,37	60,94	61,32	76,97	77,00	5,60	5,61	615,90	618,65
5271	Kota Mataram	72,83	73,70	67,13	67,62	91,85	92,25	9,22	9,68	648,01	650,09
5272	Kota Bima	69,10	69,83	63,10	63,22	93,77	93,80	9,71	10,22	618,42	622,00

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)	
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	67,75	68,28	67,76	68,04	88,74	89,23	7,05	7,09	607,31	610,29
5301	Sumba Barat	64,31	64,88	65,38	65,75	80,42	80,44	6,44	6,62	609,67	612,59
5302	Sumba Timur	62,50	63,33	62,13	62,33	84,45	86,22	6,26	6,44	599,77	602,22
5303	Kupang	66,77	67,12	65,69	65,94	89,23	89,24	7,44	7,45	604,41	606,96
5304	Timor Tengah Selatan	66,29	66,61	67,08	67,26	84,39	84,40	6,67	6,69	609,56	612,08
5305	Timor Tengah Utara	67,93	68,57	68,75	69,19	87,78	88,16	6,83	6,92	607,45	610,66
5306	Belu	64,75	65,52	66,35	66,70	83,08	83,93	6,34	6,56	601,69	604,62
5307	Alor	68,92	69,35	67,25	67,58	95,99	96,01	7,46	7,47	601,34	604,43
5308	Lembata	68,07	68,69	66,73	66,88	92,79	93,96	6,97	7,02	607,98	611,17
5309	Flores Timur	68,71	69,19	68,43	68,73	90,16	90,18	6,64	6,76	614,82	617,68
5310	Sikka	68,22	68,74	69,32	69,63	91,73	91,75	6,37	6,59	600,10	602,47
5311	Ende	67,58	68,08	65,05	65,29	93,96	94,00	7,39	7,55	606,31	609,48
5312	Ngada	70,13	70,63	67,31	67,46	96,23	96,92	7,62	7,63	614,40	617,63
5313	Manggarai	67,81	68,30	67,51	67,74	92,25	92,62	6,79	6,83	602,27	605,49
5314	Rote Ndao	66,61	67,10	68,32	68,74	89,02	89,04	6,45	6,46	593,39	596,61
5315	Manggarai Barat	66,09	66,84	66,61	66,84	90,50	92,46	6,56	6,58	593,75	596,02
5316	Sumba Barat Daya	61,42	62,48	63,89	64,16	72,35	74,32	5,93	6,21	611,06	614,56
5317	Sumba Tengah	61,22	61,70	62,93	63,13	75,59	76,09	5,32	5,34	612,02	615,16
5318	Nageko	66,59	67,23	63,70	63,86	94,08	95,05	6,97	7,15	606,92	609,50
5319	Manggarai Timur	66,55	67,06	67,84	68,12	92,39	92,72	6,50	6,53	585,95	589,32
5320	Sabu Raijua	56,12	57,12	67,57	67,92	75,58	77,55	5,40	5,54	511,60	515,05
5371	Kota Kupang	77,71	78,37	73,04	73,46	98,54	98,57	11,07	11,27	631,56	635,08
6100	KALIMANTAN BARAT	69,66	70,31	66,75	66,92	90,51	91,13	6,89	7,14	635,85	638,82
6101	Sambas	65,80	66,19	61,48	61,69	91,55	91,57	6,20	6,21	627,35	630,69
6102	Bengkayang	67,98	68,50	68,97	69,11	88,72	89,56	6,50	6,54	606,88	609,85
6103	Landak	68,16	69,05	65,70	65,93	92,51	93,85	7,26	7,54	614,58	617,92
6104	Pontianak	69,07	69,42	67,30	67,36	89,94	90,25	6,56	6,57	629,01	632,20
6105	Sanggau	68,97	69,50	68,74	68,91	89,98	90,50	6,51	6,63	617,76	620,76
6106	Ketapang	68,63	69,05	67,66	67,87	91,36	91,39	6,42	6,54	617,92	620,77
6107	Sintang	68,77	69,14	68,53	68,74	90,54	90,55	6,65	6,68	613,68	616,69
6108	Kapuas Hulu	70,38	70,52	66,67	66,75	92,64	92,64	7,18	7,18	636,89	638,05
6109	Sekadau	67,52	68,47	67,37	67,39	90,15	91,61	6,34	6,83	609,84	613,16
6110	Melawi	69,01	69,39	67,82	67,89	92,40	92,44	7,25	7,28	610,77	614,75
6111	Kayong Utara	65,75	66,19	65,84	66,00	88,31	88,34	5,73	5,84	609,13	612,56
6112	Kubu Raya	68,06	68,86	66,37	66,43	88,30	89,07	6,68	7,11	626,22	629,72
6171	Kota Pontianak	73,43	74,21	67,40	67,58	95,02	95,73	9,45	9,85	642,47	645,46
6172	Kota Singkawang	69,21	69,77	67,34	67,46	89,69	90,25	7,44	7,59	622,81	626,14

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
				(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)	
6200	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	75,06	75,46	71,30	71,41	97,84	97,88	8,06	8,15	640,73	644,21
6201	Kotawaringin Barat	74,19	74,69	71,61	71,75	94,96	94,98	7,74	7,97	638,61	641,79
6202	Kotawaringin Timur	74,74	75,14	69,70	69,84	98,73	98,77	8,04	8,08	645,79	649,44
6203	Kapuas	74,00	74,33	70,90	71,02	97,21	97,24	7,34	7,34	638,56	641,86
6204	Barito Selatan	74,01	74,34	68,35	68,42	98,98	98,98	8,45	8,47	641,39	644,94
6205	Barito Utara	75,50	75,97	72,20	72,36	98,24	98,71	8,39	8,40	635,63	639,09
6206	Sukamara	72,42	72,88	67,92	67,98	95,59	95,75	7,18	7,47	645,77	648,08
6207	Lamandau	72,74	73,13	67,29	67,36	98,67	98,68	7,73	7,83	640,25	643,89
6208	Seruyan	72,93	73,24	68,04	68,09	99,32	99,32	7,77	7,78	635,21	638,66
6209	Katingan	73,32	73,67	67,60	67,70	99,48	99,49	8,35	8,36	637,39	640,94
6210	Pulang Pisau	72,37	72,75	67,65	67,74	96,23	96,23	7,65	7,67	640,75	644,84
6211	Gunung Mas	73,73	74,08	68,10	68,23	99,64	99,64	8,77	8,79	634,55	637,92
6212	Barito Timur	73,33	73,75	67,92	67,98	98,00	98,01	8,62	8,83	636,79	639,69
6213	Murung Raya	73,34	73,77	68,18	68,26	99,95	99,95	7,38	7,52	641,36	645,00
6271	Kota Palangka Raya	78,78	79,30	73,50	73,61	99,51	99,53	10,57	10,80	644,21	647,91
6300	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	70,44	71,08	64,17	64,52	96,14	96,43	7,68	7,89	640,73	643,66
6301	Tanah Laut	72,00	72,75	68,75	69,11	95,12	96,44	7,26	7,27	634,93	638,23
6302	Kota Baru	71,69	72,43	65,81	66,15	94,05	95,33	7,07	7,09	656,99	660,40
6303	Banjjar	71,35	71,96	65,68	66,12	96,06	96,37	7,26	7,32	645,99	649,27
6304	Barito Kuala	68,36	68,92	62,31	62,76	94,15	94,15	7,15	7,25	637,93	640,99
6305	Tapin	71,00	71,71	67,48	67,73	95,72	96,87	7,15	7,26	630,54	633,52
6306	Hulu Sungai Selatan	71,20	71,64	64,32	64,69	96,80	96,80	7,36	7,37	650,70	653,63
6307	Hulu Sungai Tengah	71,19	71,67	65,65	66,03	97,43	97,49	7,47	7,50	638,16	641,15
6308	Hulu Sungai Utara	69,45	69,92	63,47	63,87	96,02	96,02	7,48	7,49	635,19	638,34
6309	Tabalong	70,45	71,05	63,36	63,64	96,47	97,17	8,15	8,16	641,15	644,97
6310	Tanah Bumbu	70,41	71,09	65,36	65,68	94,75	95,25	7,33	7,56	639,13	641,92
6311	Balangan	67,35	67,71	62,02	62,32	95,66	95,66	7,00	7,01	624,05	626,51
6371	Kota Banjarmasin	74,24	74,83	66,36	66,58	98,72	98,80	9,57	9,88	648,60	651,44
6372	Kota Banjar Baru	75,43	76,28	67,76	68,04	98,95	99,06	10,06	10,66	648,59	651,57
6400	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	76,22	76,71	71,40	71,58	97,21	97,55	9,19	9,22	646,01	649,85
6401	Paser	75,40	75,85	73,44	73,79	96,70	96,71	8,08	8,10	632,84	635,96
6402	Kutai Barat	73,69	74,05	70,39	70,61	96,60	96,61	8,20	8,21	631,67	634,68
6403	Kutai Kartanegara	73,51	74,24	68,05	68,17	97,31	98,33	8,57	8,76	640,73	644,56
6404	Kutai Timur	72,88	73,75	68,82	69,03	98,25	99,29	8,15	8,47	628,24	631,96
6405	Berau	74,63	75,05	70,18	70,43	97,20	97,26	8,58	8,62	639,99	643,26
6406	Malinau	73,26	73,63	68,47	68,62	92,96	92,97	8,25	8,26	650,07	653,63
6407	Bulungan	75,54	76,03	73,11	73,32	95,61	95,95	8,15	8,17	639,50	643,16
6408	Nunukan	74,38	74,84	71,77	72,01	94,56	94,79	7,47	7,55	643,63	646,55
6409	Penajam Paser Utara	74,03	74,35	71,63	71,80	95,57	95,77	7,68	7,71	635,20	637,30
6410	Tana Tidung	71,87	72,66	72,70	72,76	89,08	90,15	7,24	7,64	622,47	625,18
6471	Kota Balikpapan	78,85	79,38	72,39	72,61	98,78	98,86	10,26	10,46	658,23	661,33
6472	Kota Samarinda	77,63	78,26	71,42	71,62	98,02	98,56	10,06	10,36	653,50	655,71
6473	Kota Tarakan	77,19	77,76	71,96	72,19	97,99	98,89	9,43	9,44	650,08	653,00
6474	Kota Bontang	77,52	77,85	72,60	72,78	99,21	99,22	10,38	10,40	636,97	639,88

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)	
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
7100	SULAWESI UTARA	76,54	76,95	72,33	72,44	99,46	99,53	8,92	9,00	639,57	643,20
7101	Bolaang Mongondow	73,47	73,83	71,70	71,83	98,31	98,32	7,41	7,44	622,05	625,62
7102	Minahasa	76,12	76,69	72,54	72,61	99,72	99,74	9,22	9,54	629,01	632,63
7103	Kepulauan Sangihe	76,07	76,42	73,19	73,37	98,73	98,75	7,73	7,74	640,88	643,98
7104	Kepulauan Talaud	75,76	76,14	72,12	72,35	99,56	99,58	8,78	8,80	632,03	635,13
7105	Minahasa Selatan	75,10	75,46	72,41	72,54	99,80	99,81	8,76	8,78	620,80	624,42
7106	Minahasa Utara	76,54	76,91	72,73	72,87	99,77	99,78	9,38	9,40	631,45	635,01
7107	Bolaang Mongondow Utara	73,08	73,48	70,06	70,22	98,42	98,43	7,42	7,44	628,48	632,27
7108	Siau Tagulandang Biaro	73,70	74,06	68,71	68,81	99,77	99,78	8,47	8,49	632,24	635,97
7109	Minahasa Tenggara	73,09	73,42	70,10	70,16	99,51	99,52	8,40	8,41	615,70	619,46
7110	Bolaang Mongondow Selatan	70,87	71,63	71,34	71,39	98,33	99,05	6,50	6,88	599,68	603,43
7111	Bolaang Mongondow Timur	72,97	73,41	71,42	71,48	99,55	99,57	7,10	7,42	617,08	619,16
7171	Kota Manado	78,57	78,92	72,70	72,77	99,91	99,93	10,83	10,84	643,59	647,46
7172	Kota Bitung	75,96	76,30	70,59	70,67	99,41	99,42	9,44	9,46	639,65	643,34
7173	Kota Tomohon	76,92	77,40	72,78	72,95	99,85	99,87	10,00	10,16	629,78	633,07
7174	Kota Kotamobago	76,03	76,68	71,96	72,12	99,65	99,66	9,14	9,53	632,84	636,52
7200	SULAWESI TENGAH	71,62	72,14	66,86	67,11	96,12	96,16	8,03	8,13	633,31	637,34
7201	Banggai Kepulauan	68,28	68,90	64,35	64,85	95,07	95,08	7,92	7,94	612,21	616,42
7202	Banggai	71,84	72,37	68,74	68,96	95,96	95,99	7,97	8,03	623,70	628,37
7203	Morowali	71,47	71,95	65,73	65,91	97,46	97,49	8,18	8,20	634,22	638,83
7204	Poso	70,71	71,20	65,20	65,45	97,94	97,97	8,78	8,80	621,11	625,34
7205	Donggala	70,32	70,94	65,64	66,01	94,69	94,71	7,54	7,65	634,07	638,32
7206	Toli-Toli	69,25	69,67	64,49	64,73	95,36	95,37	7,84	7,86	623,67	627,18
7207	Buol	70,27	70,71	65,62	65,86	98,67	98,69	8,27	8,30	615,15	618,75
7208	Pariqi Moutong	69,28	69,75	65,47	65,79	93,96	93,98	7,16	7,17	627,58	631,23
7209	Tojo Una-Una	69,28	69,71	64,04	64,20	97,54	97,56	7,91	7,92	620,36	624,68
7210	Sigi	68,16	68,61	65,62	65,88	96,55	96,56	8,04	8,06	596,03	599,85
7271	Kota Palu	76,92	77,48	70,26	70,54	99,31	99,34	10,98	11,05	640,03	644,56

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)	
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
7300	SULAWESI SELATAN	72,14	72,70	70,20	70,45	88,07	88,73	7,92	7,95	640,30	643,59
7301	Kepulauan Selayar	70,00	70,49	67,88	68,02	90,86	90,88	7,07	7,26	629,31	632,86
7302	Bulukumba	71,77	72,33	72,13	72,32	85,45	86,26	7,11	7,11	636,96	640,49
7303	Bantaeng	70,66	71,51	73,96	74,32	79,03	80,10	6,10	6,46	637,55	639,50
7304	Jeneponto	65,27	65,56	65,15	65,31	77,31	77,42	6,23	6,23	634,85	637,16
7305	Takalar	69,09	70,14	69,89	70,27	81,85	83,10	6,46	6,99	634,87	637,03
7306	Gowa	71,29	71,60	71,78	71,96	82,32	82,50	7,23	7,24	641,00	643,20
7307	Sinjai	70,16	70,64	72,24	72,50	86,59	86,71	7,07	7,08	612,34	616,20
7308	Maros	71,74	72,54	72,76	73,22	83,10	83,98	6,90	7,08	640,74	643,56
7309	Pangkajene dan Kepulauan	69,89	70,65	68,96	69,14	87,59	88,82	6,94	7,07	630,79	634,50
7310	Barru	71,19	71,70	69,05	69,24	89,25	89,31	7,62	7,87	635,74	638,45
7311	Bone	70,77	71,47	70,00	70,26	86,41	87,88	6,72	6,72	640,31	643,23
7312	Soppeng	72,23	72,57	71,74	71,85	86,71	86,99	7,28	7,29	640,46	643,20
7313	Wajo	71,04	71,67	71,37	71,79	84,97	84,99	6,51	6,60	640,11	644,40
7314	Sidenreng Rappang	72,74	73,36	72,81	73,12	89,77	89,90	7,27	7,48	630,64	634,02
7315	Pinrang	73,80	74,39	72,28	72,50	91,48	91,63	7,62	7,89	639,83	643,01
7316	Enrekang	74,84	75,30	75,19	75,39	90,49	91,26	8,32	8,34	628,53	630,59
7317	Luwu	74,42	74,68	74,04	74,14	91,63	91,70	7,80	7,81	633,08	635,46
7318	Tana Toraja	72,29	72,90	74,22	74,26	87,76	88,94	7,74	7,83	615,84	619,27
7322	Luwu Utara	74,69	74,97	71,68	71,81	92,86	92,99	7,49	7,49	653,06	655,38
7325	Luwu Timur	73,11	73,56	71,06	71,29	93,28	93,43	8,18	8,19	629,17	632,76
7326	Toraja Utara	70,15	71,04	73,58	73,62	83,83	85,85	7,67	7,86	604,71	608,39
7371	Kota Makassar	79,11	79,49	73,82	74,05	96,82	96,88	10,85	10,86	651,28	654,25
7372	Kota Parepare	78,19	78,63	74,49	74,71	97,17	97,33	9,76	9,88	644,04	646,40
7373	Kota Palopo	76,85	77,28	72,59	72,72	97,34	97,43	10,04	10,16	637,12	640,30
7400	SULAWESI TENGGARA	70,55	71,05	68,00	68,21	91,95	92,04	8,21	8,25	621,44	625,81
7401	Buton	69,34	69,95	68,93	69,28	86,60	86,62	6,93	7,04	626,92	631,14
7402	Muna	67,95	68,35	66,07	66,16	87,99	88,37	7,45	7,53	620,46	623,14
7403	Konawe	70,42	70,95	67,55	67,82	94,66	94,68	8,55	8,56	612,01	616,76
7404	Kolaka	71,46	72,00	67,38	67,64	93,27	93,30	8,08	8,09	635,29	640,22
7405	Konawe Selatan	69,80	70,24	67,78	67,94	94,13	94,13	7,65	7,66	612,53	616,97
7406	Bombana	67,85	68,51	67,91	68,12	89,31	89,53	7,12	7,28	605,24	610,12
7407	Wakatobi	68,04	68,78	68,18	68,30	90,37	91,35	7,59	7,76	598,19	602,46
7408	Kolaka Utara	69,33	69,87	65,69	65,83	93,58	93,61	7,57	7,65	623,79	628,93
7409	Buton Utara	68,86	69,31	68,60	68,92	88,25	88,34	8,03	8,05	607,64	610,76
7410	Konawe Utara	69,24	69,84	67,34	67,63	93,82	93,84	7,70	7,97	608,82	611,91
7471	Kota Kendari	76,07	76,51	69,17	69,24	98,63	98,68	11,37	11,39	635,17	639,95
7472	Kota Baubau	74,10	74,58	70,69	70,99	95,60	95,65	9,87	9,89	621,67	625,46

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	(tahun)		(persen)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)	
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
<b>7500</b>	<b>GORONTALO</b>	<b>70,82</b>	<b>71,31</b>	<b>67,11</b>	<b>67,47</b>	<b>96,10</b>	<b>96,16</b>	<b>7,45</b>	<b>7,49</b>	<b>626,77</b>	<b>630,01</b>
7501	Boalemo	69,16	69,49	68,30	68,57	95,72	95,77	6,57	6,57	606,20	608,40
7502	Gorontalo	70,63	71,12	69,09	69,55	94,96	95,00	6,89	6,89	618,65	621,59
7503	Pohuwato	70,36	70,76	67,88	68,09	97,07	97,08	6,67	6,72	619,97	623,20
7504	Bone Bolango	72,22	72,65	68,90	69,25	97,44	97,47	7,85	7,85	624,35	627,37
7505	Gorontalo Utara	69,37	69,94	67,01	67,37	94,38	94,89	6,50	6,50	622,75	626,08
7571	Kota Gorontalo	73,67	74,17	66,98	67,16	99,45	99,47	10,09	10,28	629,71	633,00
<b>7600</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>70,11</b>	<b>70,73</b>	<b>68,00</b>	<b>68,27</b>	<b>88,54</b>	<b>88,79</b>	<b>7,15</b>	<b>7,32</b>	<b>635,84</b>	<b>639,56</b>
7601	Majene	71,86	72,41	65,70	66,02	94,75	94,77	8,44	8,50	644,81	649,06
7602	Polewali Mandar	67,88	68,44	65,26	65,53	85,94	86,00	6,96	7,07	635,99	640,07
7603	Mamasa	71,62	72,07	71,31	71,44	87,61	88,07	7,15	7,19	634,34	637,46
7604	Mamuju	69,78	70,76	68,76	69,02	89,23	89,97	7,01	7,47	625,54	629,76
7605	Mamuju Utara	70,41	70,79	67,59	67,62	95,59	95,60	7,22	7,26	621,70	625,91
<b>8100</b>	<b>MALUKU</b>	<b>71,87</b>	<b>72,42</b>	<b>67,60</b>	<b>67,84</b>	<b>98,15</b>	<b>98,17</b>	<b>8,82</b>	<b>9,15</b>	<b>617,75</b>	<b>620,08</b>
8101	Maluku Tenggara Barat	69,23	69,57	64,42	64,56	99,64	99,75	8,96	8,98	600,82	603,71
8102	Maluku Tenggara	72,85	73,27	68,19	68,39	99,58	99,58	8,77	8,91	622,65	625,36
8103	Maluku Tengah	71,25	71,55	65,89	66,03	99,10	99,11	8,86	8,88	618,96	621,68
8104	Buru	69,75	70,54	68,49	68,94	92,85	92,85	7,44	7,92	612,41	614,76
8105	Kepulauan Aru	70,33	70,91	67,94	68,15	99,06	99,07	7,59	8,02	604,60	606,51
8106	Seram Bagian Barat	70,07	70,40	66,68	66,79	98,29	98,30	8,41	8,57	604,56	606,55
8107	Seram Bagian Timur	68,53	68,90	66,07	66,28	98,16	98,17	7,86	7,93	594,63	597,25
8108	Maluku Barat Daya	66,99	67,38	64,35	64,56	98,25	98,25	8,02	8,09	585,23	588,22
8109	Buru Selatan	69,13	69,97	67,58	67,82	89,78	89,79	6,67	7,31	627,19	630,14
8171	Kota Ambon	78,97	79,41	73,16	73,31	99,61	99,62	11,22	11,37	642,52	645,73
8172	Kota Tual	77,10	77,62	69,04	69,38	99,71	99,71	9,86	9,93	660,79	664,39
<b>8200</b>	<b>MALUKU UTARA</b>	<b>69,47</b>	<b>69,98</b>	<b>66,31</b>	<b>66,65</b>	<b>96,19</b>	<b>96,43</b>	<b>8,66</b>	<b>8,71</b>	<b>603,20</b>	<b>606,22</b>
8201	Halmahera Barat	67,38	67,65	64,61	64,83	95,76	95,83	7,87	7,87	597,10	598,78
8202	Halmahera Tengah	69,60	70,03	66,98	67,38	96,81	96,83	8,25	8,25	602,13	604,80
8203	Kepulauan Sula	68,42	68,83	65,36	65,71	97,40	97,46	8,00	8,02	599,15	601,64
8204	Halmahera Selatan	68,50	68,87	65,69	65,90	95,85	96,09	7,69	7,69	605,35	607,98
8205	Halmahera Utara	68,87	69,84	66,19	66,51	96,87	97,71	7,79	8,28	602,54	605,76
8206	Halmahera Timur	68,30	68,71	65,65	65,98	95,74	95,79	7,84	7,84	601,83	604,66
8207	Pulau Morotai	65,09	66,08	65,55	65,87	93,91	94,08	6,25	6,96	581,45	584,70
8271	Kota Ternate	77,05	77,62	70,86	71,26	99,11	99,16	10,83	10,93	639,43	642,88
8272	Kota Tidore Kepulauan	69,97	70,45	65,25	65,44	97,67	97,72	8,79	9,01	611,76	614,32

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	IPM		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
		(tahun)	(tahun)	(persen)	(persen)	(tahun)	(tahun)	(ribu rupiah PPP)	(ribu rupiah PPP)		
9100	PAPUA BARAT	69,65	70,22	68,81	69,14	93,39	93,74	8,26	8,45	599,28	601,56
9101	Fakfak	72,13	72,64	70,88	71,24	98,13	98,47	9,37	9,49	592,30	594,23
9102	Kaimana	70,71	71,22	69,88	70,11	96,91	96,99	7,63	7,95	601,27	603,01
9103	Teluk Wondama	66,06	66,80	67,76	68,01	84,18	85,12	6,69	7,14	601,97	602,76
9104	Teluk Bintuni	67,17	67,58	68,54	68,88	87,05	87,38	6,91	7,02	600,33	601,28
9105	Manokwari	67,67	68,07	68,29	68,58	88,77	89,03	8,43	8,53	589,12	590,54
9106	Sorong Selatan	66,59	66,83	66,82	66,99	88,43	88,45	8,06	8,09	590,23	591,79
9107	Sorong	68,93	69,23	68,22	68,59	91,76	91,84	8,09	8,11	600,62	601,41
9108	Raja Ampat	65,06	65,49	66,50	66,82	94,13	94,34	7,43	7,53	562,22	563,96
9109	Tambrauw	50,81	51,18	66,31	66,48	77,33	77,38	5,78	5,80	443,07	446,25
9110	Maybrat	66,43	67,26	66,62	66,92	90,87	91,22	8,00	8,64	583,20	584,54
9171	Kota Sorong	77,72	78,36	72,36	72,52	99,14	99,69	10,68	10,99	638,70	641,28
9400	PAPUA	65,36	65,86	68,85	69,12	75,81	75,83	6,69	6,87	609,18	611,99
9401	Merauke	66,19	66,52	62,88	63,00	88,22	88,22	9,35	9,46	601,71	604,01
9402	Jayawijaya	56,60	57,22	66,63	66,84	52,76	52,77	4,84	5,31	595,72	597,80
9403	Jayapura	72,75	73,09	67,53	67,74	96,89	96,90	9,56	9,56	626,25	629,04
9404	Nabire	67,33	68,03	67,80	68,05	83,66	83,67	6,78	7,29	618,79	621,17
9408	Kepulauan Yapen	70,19	70,98	68,55	68,88	89,11	90,87	6,63	6,74	636,30	638,05
9409	Biak Numfor	70,33	70,68	66,75	67,01	98,67	98,68	9,58	9,64	595,16	597,19
9410	Paniai	60,22	60,54	68,00	68,30	62,94	62,95	6,22	6,22	590,27	592,22
9411	Puncak Jaya	68,34	68,37	67,70	67,71	86,82	86,82	6,12	6,12	629,82	630,17
9412	Mimika	69,68	70,02	70,53	70,87	88,19	88,20	6,87	6,93	615,71	617,07
9413	Boven Digoel	50,64	51,43	67,13	67,15	33,25	35,25	3,39	3,65	585,04	586,86
9414	Mappi	50,83	51,53	66,28	66,30	31,46	33,47	4,30	4,36	590,07	592,62
9415	Asmat	51,92	52,19	67,32	67,34	31,13	31,15	4,35	4,42	597,16	599,78
9416	Yahukimo	50,30	50,73	67,09	67,38	32,76	32,77	2,86	2,92	587,40	590,33
9417	Pegunungan Bintang	49,45	49,83	66,00	66,24	32,50	32,50	2,54	2,59	588,02	590,78
9418	Tolikara	52,43	52,66	66,09	66,24	33,44	33,45	3,38	3,38	615,39	617,19
9419	Sarmi	67,15	67,73	66,46	66,58	87,67	87,68	6,55	7,00	616,74	619,10
9420	Keerom	69,64	69,95	67,31	67,51	92,38	92,39	7,39	7,43	621,33	623,51
9426	Waropen	63,71	64,24	65,86	66,03	77,26	78,27	6,37	6,55	608,26	609,31
9427	Supiori	68,92	69,19	66,23	66,49	96,68	96,69	8,08	8,10	600,65	602,17
9428	Memberamo Raya	59,86	60,18	66,20	66,34	65,36	65,36	5,20	5,20	601,40	604,49
9429	Nduga	48,43	48,80	65,83	66,02	30,54	30,54	2,80	2,81	579,24	582,51
9430	Lanny Jaya	50,20	50,60	66,49	66,70	36,91	36,92	3,72	3,75	570,21	573,53
9431	Mamberamo Tengah	49,32	49,73	66,44	66,62	34,52	34,53	2,91	2,93	573,80	577,58
9432	Yalimo	48,90	49,31	66,56	66,77	33,51	33,52	2,75	2,81	571,90	575,10
9433	Puncak	49,35	49,77	67,64	67,84	32,13	32,15	2,82	2,85	573,36	576,99
9434	Dogiyai	50,49	51,09	67,27	67,44	34,23	34,65	3,89	4,16	574,37	577,17
9435	Intan Jaya	48,74	49,17	66,83	66,87	27,78	28,08	2,10	2,30	590,70	593,30
9436	Deiyai	49,31	49,80	66,62	66,64	30,12	31,02	2,79	2,96	586,30	588,19
9471	Kota Jayapura	76,29	76,64	68,61	68,77	99,83	99,84	11,03	11,06	641,78	644,80
	Indonesia	72,77	73,29	69,65	69,87	92,99	93,25	7,94	8,08	638,05	641,04

## Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2011-2012

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan		Angka Melek		Rata-rata Lama		Sumbangan	
		2011	2012	Hidup		Huruf		Sekolah		Pendapatan	
				L	P	L	P	L	P	L	P
1100	ACEH	65,79	66,35	66,87	70,84	98,21	96,23	9,36	8,66	67,86	32,14
1101	Simeulue	57,19	57,59	61,22	64,99	99,52	99,05	9,09	8,29	76,45	23,55
1102	Aceh Singkil	60,03	60,63	63,23	67,08	99,44	95,26	8,55	7,62	72,20	27,80
1103	Aceh Selatan	59,42	59,97	65,12	69,06	98,49	95,06	8,73	8,10	73,12	26,88
1104	Aceh Tenggara	64,22	64,59	67,33	71,29	99,42	97,04	9,64	9,26	70,27	29,73
1105	Aceh Timur	61,82	62,40	67,88	71,84	99,73	97,55	8,97	8,46	72,04	27,96
1106	Aceh Tengah	69,97	70,26	67,78	71,74	99,73	97,81	9,73	9,62	64,90	35,10
1107	Aceh Barat	61,73	62,46	68,14	72,09	97,79	92,04	9,15	8,39	72,64	27,36
1108	Aceh Besar	62,47	63,14	68,90	72,83	98,48	96,23	10,33	9,64	75,18	24,82
1109	Pidie	61,66	62,11	67,76	71,73	98,60	94,99	9,19	8,35	72,49	27,51
1110	Bireuen	69,60	69,98	70,53	74,37	99,11	98,17	9,50	9,11	63,06	36,94
1111	Aceh Utara	66,93	67,27	67,88	71,84	99,15	96,23	9,79	8,30	66,54	33,46
1112	Aceh Barat Daya	61,12	61,63	65,26	69,21	99,07	95,43	8,37	8,10	72,39	27,61
1113	Gayo Lues	64,16	64,49	65,23	69,17	94,02	87,15	9,82	7,96	65,29	34,71
1114	Aceh Tamiang	60,30	61,22	66,53	70,51	99,73	98,15	8,94	8,61	73,98	26,02
1115	Nagan Raya	60,02	60,81	67,78	71,74	95,48	89,34	8,80	7,81	73,41	26,59
1116	Aceh Jaya	67,57	67,98	66,14	70,12	98,46	92,47	9,45	8,63	63,18	36,82
1117	Bener Meriah	61,99	62,50	65,75	69,72	99,25	97,74	9,33	8,71	72,78	27,22
1118	Pidie Jaya	65,38	65,91	67,38	71,34	97,17	91,95	9,07	8,32	67,76	32,24
1171	Kota Banda Aceh	65,99	66,86	69,24	73,17	99,72	99,10	12,32	12,17	75,23	24,77
1172	Kota Sabang	68,56	69,39	69,40	73,33	99,62	98,74	10,95	10,20	69,93	30,07
1173	Kota Langsa	63,22	63,95	68,85	72,79	99,52	99,10	10,76	10,45	73,53	26,47
1174	Kota Lhokseumawe	60,71	61,54	69,26	73,20	99,70	99,58	10,69	10,16	78,04	21,96
1175	Subulussalam	66,77	67,10	64,12	68,01	98,86	95,58	8,21	7,47	63,04	36,96

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		1200	SUMATERA UTARA	70,34	70,76	67,73	71,69	99,02	96,29	9,35	8,77
1201	Nias	69,00	69,36	67,85	71,81	96,08	85,40	7,79	6,16	51,03	48,97
1202	Mandailing Natal	70,22	70,57	61,86	65,66	99,68	98,81	8,24	7,79	54,67	45,33
1203	Tapanuli Selatan	73,96	74,25	65,29	69,23	99,87	99,70	9,15	8,71	52,02	47,98
1204	Tapanuli Tengah	70,29	70,84	66,32	70,30	98,40	94,90	8,97	7,71	58,09	41,91
1205	Tapanuli Utara	74,77	75,18	68,08	72,05	99,74	98,59	9,89	8,68	51,04	48,96
1206	Toba Samosir	75,21	75,92	68,84	72,77	99,69	97,45	10,49	9,69	57,46	42,54
1207	Labuhan Batu	67,55	68,17	68,28	72,27	99,81	98,31	9,04	8,64	69,52	30,48
1208	Asahan	61,13	61,70	67,21	71,18	99,24	96,73	8,83	7,86	74,98	25,02
1209	Simalungun	68,99	69,38	67,16	71,13	99,31	96,22	9,15	8,49	65,47	34,53
1210	Dairi	73,19	73,34	66,65	70,64	99,43	97,43	9,18	8,38	49,42	50,58
1211	Karo	75,13	75,93	70,41	74,26	99,77	98,14	9,36	9,18	48,07	51,93
1212	Deli Serdang	64,70	65,26	68,97	72,91	99,63	97,65	9,84	9,22	73,55	26,45
1213	Langkat	65,07	65,49	67,19	71,15	99,26	96,37	8,98	8,24	70,88	29,12
1214	Nias Selatan	62,52	62,85	68,42	72,39	87,62	83,64	7,51	5,75	66,38	33,62
1215	Humbang Hasundutan	71,91	72,35	66,04	70,02	99,71	96,81	9,64	8,54	49,65	50,35
1216	Pakpak Barat	70,94	71,89	65,89	69,86	99,54	97,32	8,86	8,29	52,14	47,86
1217	Samosir	73,96	74,45	67,92	71,88	99,74	96,37	9,75	9,33	49,78	50,22
1218	Serdang Bedegai	65,14	65,70	67,16	71,13	99,27	96,55	8,96	8,36	70,63	29,37
1219	Batu Bara	69,18	69,77	66,77	70,75	97,86	95,54	8,76	7,67	62,87	37,13
1220	Padang Lawas Utara	71,88	72,36	64,72	68,64	99,80	98,73	9,02	8,50	56,64	43,36
1221	Padang Lawas	70,32	70,90	65,18	69,11	99,58	99,79	8,70	8,16	59,82	40,18
1222	Labuhan Batu Selatan	68,32	68,87	68,30	72,26	99,78	98,08	8,55	8,13	67,97	32,03
1223	Labuhan Batu Utara	58,63	59,43	68,03	72,01	99,22	96,75	8,74	7,98	78,06	21,94
1224	Nias Utara	66,99	67,64	67,31	71,28	95,07	83,53	7,45	5,49	55,47	44,53
1225	Nias Barat	66,62	67,11	67,30	71,27	90,28	79,13	7,51	4,97	49,11	50,89
1271	Kota Sibolga	68,62	68,90	68,36	72,31	99,79	98,95	10,05	9,64	68,69	31,31
1272	Kota Tanjung Balai	59,34	59,85	68,84	72,80	99,72	98,72	9,14	9,02	78,17	21,83
1273	Kota Pematang Siantar	71,67	72,15	70,42	74,28	99,91	99,43	11,27	10,46	66,18	33,82
1274	Kota Tebing Tinggi	68,55	68,92	69,57	73,47	99,88	98,21	10,07	9,79	69,89	30,11
1275	Kota Medan	69,59	70,10	70,18	74,05	99,99	99,16	11,16	10,59	69,51	30,49
1276	Kota Binjai	71,67	72,18	70,01	73,89	99,63	99,10	10,31	9,76	65,86	34,14
1277	Kota Padang Sidempuan	65,81	66,38	67,79	71,75	99,76	99,54	10,57	10,28	71,02	28,98
1278	Gunung Sitoli	68,81	69,37	68,36	72,33	98,28	91,24	9,00	7,40	60,61	39,39

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		<b>1300</b>	<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>69,55</b>	<b>70,11</b>	<b>67,83</b>	<b>71,80</b>	<b>98,49</b>	<b>96,46</b>	<b>8,69</b>	<b>8,55</b>
1301	Kepulauan Mentawai	62,03	62,48	66,61	70,59	96,35	90,87	7,54	6,45	70,78	29,22
1302	Pesisir Selatan	65,79	66,56	65,67	69,63	98,20	93,67	8,32	8,09	66,19	33,81
1303	Solok	68,03	68,46	65,04	68,97	98,15	96,30	8,07	7,74	62,13	37,87
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	60,50	60,85	65,33	69,28	96,91	92,00	7,74	7,33	73,13	26,87
1305	Tanah Datar	67,44	67,86	69,40	73,34	98,29	96,74	8,46	8,11	67,43	32,57
1306	Padang Pariaman	63,90	64,39	67,08	71,07	96,72	93,13	7,76	7,30	69,32	30,68
1307	Agam	70,11	70,68	67,31	71,28	98,98	97,23	8,66	8,22	61,57	38,43
1308	Limapuluh Koto	60,14	60,62	66,88	70,87	99,06	97,08	8,12	7,80	73,81	26,19
1309	Pasaman	68,73	69,51	65,85	69,82	99,36	97,66	8,10	7,83	35,50	64,50
1310	Solok Selatan	64,45	64,80	62,88	66,72	99,08	96,91	7,94	7,83	66,05	33,95
1311	Dharmas Raya	59,22	59,96	64,36	68,26	98,56	96,00	8,45	7,79	74,31	25,69
1312	Pasaman Barat	66,27	66,69	63,54	67,41	98,78	96,54	8,08	7,62	64,32	35,68
1371	Kota Padang	71,41	72,36	69,23	73,16	99,89	99,27	11,04	10,86	67,01	32,99
1372	Kota Solok	70,28	71,30	67,93	71,90	99,51	98,86	10,31	10,72	65,33	34,67
1373	Kota Sawah Lunto	63,63	64,23	69,98	73,87	99,00	98,27	9,78	9,17	73,92	26,08
1374	Kota Padang Panjang	77,16	77,53	69,75	73,67	99,77	98,88	10,76	10,41	54,41	45,59
1375	Kota Bukit Tinggi	74,42	74,93	69,80	73,70	99,97	99,77	10,59	10,51	62,18	37,82
1376	Kota Payakumbuh	71,63	72,52	68,86	72,80	99,65	99,10	9,88	9,93	63,80	36,20
1377	Kota Pariaman	65,51	66,06	67,31	71,29	99,42	98,27	10,05	9,61	70,60	29,40
<b>1400</b>	<b>RIAU</b>	<b>66,17</b>	<b>66,76</b>	<b>69,66</b>	<b>73,56</b>	<b>99,18</b>	<b>97,90</b>	<b>8,95</b>	<b>8,41</b>	<b>73,49</b>	<b>26,51</b>
1401	Kuantan Sengingi	69,66	70,09	66,50	70,48	99,13	96,86	8,42	7,70	65,55	34,45
1402	Indragiri Hulu	64,98	65,65	66,98	70,95	98,88	97,33	8,35	7,81	72,48	27,52
1403	Indragiri Hilir	66,27	66,87	69,74	73,65	99,42	98,77	7,99	7,02	72,25	27,75
1404	Pelalawan	64,83	65,41	67,02	70,99	99,07	97,20	8,66	7,75	72,56	27,44
1405	Siak	58,85	59,05	69,97	73,86	99,49	97,25	9,38	8,85	81,33	18,67
1406	Kampar	60,56	61,06	66,75	70,73	99,50	98,27	9,21	8,52	77,79	22,21
1407	Rokan Hulu	61,33	62,15	65,31	69,25	99,53	96,71	8,30	7,64	75,09	24,91
1408	Bengkalis	58,86	59,39	68,53	72,48	99,22	97,37	9,79	9,03	79,97	20,03
1409	Rokan Hilir	57,14	57,60	65,33	69,28	98,93	97,34	8,06	7,74	78,88	21,12
1410	Kepulauan Meranti	59,94	60,58	66,92	70,90	91,96	88,45	7,55	6,82	74,24	25,76
1471	Kota Pekanbaru	68,05	68,35	69,77	73,67	99,93	99,80	11,73	11,13	73,67	26,33
1473	Kota Dumai	63,46	63,91	70,05	73,95	99,84	99,16	9,95	9,51	78,05	21,95

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		<b>1500</b>	<b>JAMBI</b>	<b>63,95</b>	<b>64,45</b>	<b>67,32</b>	<b>71,29</b>	<b>98,16</b>	<b>94,37</b>	<b>8,55</b>	<b>7,80</b>
1501	Kerinci	72,04	72,70	69,05	72,98	98,91	93,96	8,87	7,77	59,87	40,13
1502	Merangin	70,82	71,18	66,68	70,67	99,46	94,92	8,26	7,40	59,81	40,19
1503	Sarolangun	64,97	65,40	67,65	71,61	98,31	91,63	8,03	7,01	70,88	29,12
1504	Batanghari	68,73	69,01	67,43	71,41	99,22	96,75	8,50	7,33	66,41	33,59
1505	Muara Jambi	68,77	69,69	67,40	71,37	99,13	96,43	8,42	7,79	65,63	34,37
1506	Tanjung Jabung Timur	56,46	56,81	68,82	72,79	96,43	90,17	6,81	5,98	79,06	20,94
1507	Tanjung Jabung Barat	62,52	63,17	67,95	71,91	99,06	97,40	8,04	7,23	74,60	25,40
1508	Tebo	62,46	63,09	67,31	71,28	98,02	95,01	7,75	7,10	73,57	26,43
1509	Bungo	56,49	57,14	65,61	69,57	98,62	94,65	8,60	7,80	79,10	20,90
1571	Kota Jambi	65,65	66,27	67,99	71,94	99,83	98,21	11,15	10,33	73,56	26,44
1572	Kota Sungai Penuh	69,65	70,58	69,12	73,04	98,17	96,02	10,05	9,44	67,98	32,02
<b>1600</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>66,84</b>	<b>68,88</b>	<b>67,89</b>	<b>71,85</b>	<b>98,59</b>	<b>96,58</b>	<b>8,26</b>	<b>7,69</b>	<b>66,49</b>	<b>33,51</b>
1601	Ogan Komering Ulu	60,20	60,86	67,59	71,55	99,56	98,09	9,03	7,88	76,80	23,20
1602	Ogan Komering Ilir	58,65	59,00	66,31	70,30	98,28	94,52	7,26	6,48	76,12	23,88
1603	Muara Enim (Liot)	67,40	67,90	65,92	69,89	99,89	98,12	8,09	7,21	64,41	35,59
1604	Lahat	68,92	69,37	66,62	70,61	99,30	96,91	8,59	8,06	62,70	37,30
1605	Musi Rawas	56,11	56,64	62,87	66,71	99,26	95,82	7,27	6,71	75,94	24,06
1606	Musi Banyuasin	68,13	68,72	68,20	72,17	99,26	97,72	7,87	7,38	65,85	34,15
1607	Banyuasin	61,98	62,41	65,67	69,63	98,22	95,82	7,70	6,74	71,79	28,21
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	60,02	60,67	67,52	71,48	99,00	97,87	7,67	7,26	76,67	23,33
1609	Ogan Komering Ulu Timur	62,76	63,39	66,49	70,46	97,71	94,11	7,52	6,89	70,61	29,39
1610	Ogan Ilir	59,34	59,79	64,66	68,58	99,39	96,91	8,00	7,14	73,57	26,43
1611	Empat Lawang	64,62	65,29	63,82	67,69	98,79	97,86	7,98	7,35	66,05	33,95
1671	Kota Palembang	67,55	68,05	69,46	73,38	99,86	98,82	10,92	10,09	71,70	28,30
1672	Kota Prabumulih	60,92	61,40	70,44	74,32	99,71	97,77	9,84	8,89	77,12	22,88
1673	Kota Pagar Alam	58,67	59,17	68,47	72,43	99,70	97,16	9,06	8,92	78,71	21,29
1674	Kota Lubuk Linggau	60,33	60,88	63,96	67,84	99,66	97,82	9,58	9,20	73,57	26,43
<b>1700</b>	<b>BENGKULU</b>	<b>68,45</b>	<b>68,92</b>	<b>68,23</b>	<b>72,19</b>	<b>97,80</b>	<b>93,15</b>	<b>8,87</b>	<b>8,17</b>	<b>66,51</b>	<b>33,49</b>
1701	Bengkulu Selatan	71,08	71,47	65,66	69,63	98,21	95,40	9,28	8,36	59,34	40,66
1702	Rejang Lebong	58,38	58,76	65,69	69,65	98,07	93,58	8,59	7,83	76,70	23,30
1703	Bengkulu Utara	69,21	70,36	67,83	71,80	97,46	91,93	8,16	7,46	62,26	37,74
1704	Kaur	67,15	68,17	65,62	69,58	99,16	95,87	8,71	7,83	63,95	36,05
1705	Seluma	62,58	62,96	64,09	67,97	97,55	91,01	8,05	7,30	67,22	32,78
1706	Mukomuko	65,43	66,30	66,05	70,03	97,35	91,35	8,08	7,35	67,99	32,01
1707	Lebong	68,07	68,36	65,13	69,06	98,24	94,20	8,31	7,40	62,33	37,67
1708	Kepahiang	64,66	65,42	62,71	66,55	98,81	94,49	8,35	7,77	65,07	34,93
1709	Bengkulu Tengah	67,09	67,61	68,28	72,23	96,94	87,14	7,72	6,83	60,46	39,54
1771	Bengkulu	70,82	71,37	68,75	72,70	99,77	98,87	11,40	11,13	68,79	31,21

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		<b>1800</b>	<b>LAMPUNG</b>	<b>63,50</b>	<b>63,96</b>	<b>67,82</b>	<b>71,79</b>	<b>97,80</b>	<b>92,80</b>	<b>8,16</b>	<b>7,50</b>
1801	Lampung Barat	64,94	65,45	65,54	69,50	98,49	95,73	7,62	7,08	67,95	32,05
1802	Tanggamus	63,44	63,88	67,80	71,79	97,86	93,10	7,66	7,09	72,39	27,61
1803	Lampung Selatan	62,12	62,49	66,81	70,80	97,37	90,34	7,96	7,14	71,76	28,24
1804	Lampung Timur	64,93	65,41	68,56	72,52	97,24	91,68	7,97	7,24	69,12	30,88
1805	Lampung Tengah	63,48	63,90	67,56	71,53	96,24	91,06	7,93	7,36	70,87	29,13
1806	Lampung Utara	66,03	66,57	66,28	70,28	98,16	93,55	8,46	7,80	66,23	33,77
1807	Way Kanan	64,28	64,67	67,78	71,75	97,72	92,34	7,58	7,02	69,25	30,75
1808	Tulang Bawang	60,41	61,33	67,20	71,18	97,06	94,29	7,61	7,11	74,52	25,48
1809	Pesawaran	61,91	62,46	66,61	70,59	98,79	94,59	7,68	7,20	72,20	27,80
1810	Pringsewu	54,20	54,70	66,71	70,69	97,09	92,77	8,84	8,39	81,27	18,73
1811	Mesuji	59,43	60,04	66,44	70,42	95,89	90,51	6,86	6,13	73,04	26,96
1812	Tulang Bawang Barat	62,79	63,55	66,49	70,47	95,78	91,81	7,71	7,27	69,09	30,91
1871	Kota Bandar Lampung	69,02	69,63	69,32	73,26	99,26	97,77	10,52	10,10	69,17	30,83
1872	Kota Metro	71,31	71,72	70,90	74,74	99,54	97,40	10,26	9,86	66,55	33,45
<b>1900</b>	<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>60,79</b>	<b>61,38</b>	<b>67,12</b>	<b>71,10</b>	<b>98,78</b>	<b>94,92</b>	<b>8,02</b>	<b>7,31</b>	<b>76,39</b>	<b>23,61</b>
1901	Bangka	60,08	60,75	65,92	69,89	98,75	95,13	8,53	7,61	76,80	23,20
1902	Belitung	58,32	58,87	67,35	71,31	99,00	95,64	8,43	7,56	79,01	20,99
1903	Bangka Barat	60,25	60,72	65,97	69,94	97,02	91,45	7,21	6,59	74,39	25,61
1904	Bangka Tengah	56,89	57,43	66,13	70,11	98,89	96,26	7,82	6,89	79,28	20,72
1905	Bangka Selatan	51,29	51,75	65,99	69,97	95,82	91,38	6,85	6,00	80,75	19,25
1906	Belitung Timur	61,25	61,75	67,12	71,10	99,23	96,62	8,05	7,56	75,48	24,52
1971	Kota Pangkal Pinang	66,19	66,72	68,62	72,57	99,91	97,78	10,41	9,45	73,38	26,62
<b>2100</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>64,69</b>	<b>65,61</b>	<b>67,93</b>	<b>71,89</b>	<b>98,89</b>	<b>97,13</b>	<b>10,05</b>	<b>9,47</b>	<b>73,95</b>	<b>26,05</b>
2101	Karimun	60,87	61,74	68,00	71,96	98,24	94,90	8,52	7,83	76,05	23,95
2102	Bintan	60,16	60,90	67,83	71,79	97,68	95,70	9,01	8,78	78,21	21,79
2103	Natuna	57,40	58,30	66,44	70,41	98,73	95,86	7,95	7,48	77,69	22,31
2104	Lingga	56,31	57,00	68,35	72,31	94,66	88,58	7,86	6,74	78,58	21,42
2105	Kepulauan Anambas	58,33	59,38	65,61	69,57	94,12	85,97	7,06	6,31	74,38	25,62
2171	Kota Batam	68,10	68,92	68,95	72,88	99,84	99,00	11,13	10,75	72,76	27,24
2172	Kota Tanjung Pinang	62,91	63,73	67,74	71,70	99,23	98,20	10,35	9,90	75,40	24,60
<b>3100</b>	<b>DKI JAKARTA</b>	<b>74,01</b>	<b>74,66</b>	<b>71,50</b>	<b>75,30</b>	<b>99,67</b>	<b>98,89</b>	<b>11,24</b>	<b>10,16</b>	<b>63,45</b>	<b>36,55</b>
3101	Kep. Seribu	58,56	58,80	68,74	72,69	99,66	95,75	8,61	7,77	76,57	23,43
3171	Kota Jakarta Selatan	74,52	75,27	71,84	75,62	99,95	98,93	11,46	10,53	65,53	34,47
3172	Kota Jakarta Timur	73,69	74,33	71,67	75,45	99,98	99,33	11,42	10,66	66,86	33,14
3173	Kota Jakarta Pusat	74,70	75,59	70,55	74,40	99,98	99,30	11,42	10,32	63,17	36,83
3174	Kota Jakarta Barat	73,38	74,02	71,77	75,55	99,73	98,25	11,22	9,68	66,58	33,42
3175	Kota Jakarta Utara	73,17	73,87	71,10	74,92	99,86	98,96	11,09	9,65	64,97	35,03

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Sumbangan Pendapatan	
		2011	2012	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Persen)	
				L	P	L	P	L	P	L	P
3200	JAWA BARAT	63,25	63,68	66,48	70,46	98,08	94,66	8,44	7,65	72,31	27,69
3201	Bogor	62,14	62,53	67,34	71,33	98,22	93,39	8,22	7,48	73,96	26,04
3202	Sukabumi	60,05	60,60	65,46	69,42	99,31	96,54	7,23	6,54	74,17	25,83
3203	Cianjur	52,55	52,99	64,45	68,35	99,30	97,55	7,18	6,52	80,91	19,09
3204	Bandung	68,26	68,89	67,16	71,13	99,83	98,52	9,01	8,19	67,99	32,01
3205	Garut	63,57	63,90	64,10	67,99	99,35	98,22	7,62	7,09	70,43	29,57
3206	Tasikmalaya	60,53	60,97	66,25	70,24	99,67	98,36	7,72	7,02	74,31	25,69
3207	Ciamis	66,15	66,65	65,55	69,50	99,15	97,12	7,88	7,44	66,19	33,81
3208	Kuningan	61,17	61,67	65,67	69,63	98,47	94,60	7,79	7,23	72,92	27,08
3209	Cirebon	57,84	58,17	63,53	67,39	95,51	88,80	7,41	6,52	74,84	25,16
3210	Majalengka	57,82	58,14	64,71	68,63	98,68	92,88	7,76	6,80	75,67	24,33
3211	Sumedang	67,24	67,47	65,61	69,56	98,89	97,42	8,27	7,82	66,61	33,39
3212	Indramayu	50,79	51,24	65,31	69,26	92,87	77,46	6,97	5,23	80,46	19,54
3213	Subang	62,37	62,82	67,61	71,58	95,55	88,60	7,61	6,38	71,43	28,57
3214	Purwakarta	62,40	62,87	65,43	69,38	98,70	95,05	8,26	7,16	72,58	27,42
3215	Karawang	60,58	61,08	65,08	69,02	96,90	90,85	8,15	6,87	73,61	26,39
3216	Bekasi	59,87	60,51	67,80	71,78	97,11	91,81	9,23	8,13	76,85	23,15
3217	Kab Bandung Barat	68,17	68,49	66,75	70,72	99,38	98,90	8,45	7,81	67,40	32,60
3271	Kota Bogor	67,13	67,87	67,04	71,01	99,48	98,48	10,94	9,37	71,53	28,47
3272	Kota Sukabumi	63,63	64,19	67,77	71,74	99,96	99,39	9,89	9,32	74,81	25,19
3273	Kota Bandung	69,65	70,64	67,87	71,82	99,97	99,65	10,89	10,34	68,11	31,89
3274	Kota Cirebon	67,58	68,21	66,59	70,56	99,73	97,21	11,01	9,49	69,98	30,02
3275	Kota Bekasi	66,46	66,98	67,78	71,73	99,83	98,38	11,34	10,34	73,06	26,94
3276	Kota Depok	72,68	72,94	71,37	75,17	99,87	98,52	11,90	10,55	68,88	31,12
3277	Kota Cimahi	67,40	67,92	67,32	71,29	99,98	99,74	11,16	10,29	71,04	28,96
3278	Kota Tasikmalaya	68,11	68,54	68,30	72,27	99,89	99,68	9,34	8,60	68,77	31,23
3279	Kota Banjar	59,40	59,78	64,48	68,38	98,69	96,19	8,67	7,79	74,67	25,33

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Sumbangan Pendapatan	
		2011	2012	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Persen)	
				L	P	L	P	L	P	L	P
<b>3300</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>66,45</b>	<b>66,80</b>	<b>69,66</b>	<b>73,56</b>	<b>94,47</b>	<b>86,55</b>	<b>7,81</b>	<b>6,86</b>	<b>67,45</b>	<b>32,55</b>
3301	Cilacap	59,37	59,67	69,21	73,15	95,37	87,68	7,39	6,38	75,64	24,36
3302	Banyumas	64,65	65,02	67,85	71,81	97,94	92,70	8,15	7,31	70,56	29,44
3303	Purbalingga	62,89	63,43	68,50	72,46	95,76	91,35	7,41	7,01	71,27	28,73
3304	Banjarnegara	60,50	60,93	67,27	71,24	92,38	85,53	6,58	6,24	72,29	27,71
3305	Kebumen	56,97	57,71	67,46	71,42	95,22	88,85	7,50	6,52	76,71	23,29
3306	Purworejo	65,49	66,16	68,86	72,82	96,26	89,09	8,50	7,44	68,38	31,62
3307	Wonosobo	56,89	57,22	68,31	72,27	94,22	88,53	6,84	6,26	77,37	22,63
3308	Magelang	69,15	69,41	68,25	72,20	95,96	88,91	8,19	7,22	63,35	36,65
3309	Boyolali	68,37	68,84	68,51	72,46	94,05	83,01	8,16	6,79	60,56	39,44
3310	Klaten	69,68	70,18	69,78	73,68	96,25	86,23	9,12	7,53	63,68	36,32
3311	Sukoharjo	71,50	71,81	68,38	72,33	95,76	87,33	9,12	8,13	60,27	39,73
3312	Wonogiri	67,12	67,79	70,49	74,33	91,48	77,13	7,31	5,88	63,40	36,60
3313	Karanganyar	69,39	70,16	70,41	74,27	93,88	83,50	8,90	7,78	63,91	36,09
3314	Sragen	66,69	67,23	70,90	74,74	90,63	80,90	8,42	6,88	64,90	35,10
3315	Grobogan	56,13	56,98	67,97	71,93	95,72	86,01	7,43	6,39	76,92	23,08
3316	Blora	65,20	65,52	69,44	73,35	90,20	81,05	6,99	6,11	66,51	33,49
3317	Rembang	64,87	65,38	68,32	72,27	95,85	87,79	7,40	6,58	68,98	31,02
3318	Pati	64,14	64,50	71,04	74,85	93,98	82,81	7,89	6,60	70,35	29,65
3319	Kudus	70,92	71,33	67,75	71,71	97,58	91,13	8,95	7,97	59,88	40,12
3320	Jejara	58,00	58,52	69,08	73,01	97,06	89,90	7,95	7,16	77,43	22,57
3321	Demak	69,63	70,01	69,85	73,76	96,87	88,38	8,18	7,03	62,35	37,65
3322	Semarang	73,72	74,09	70,67	74,50	98,17	90,72	8,70	7,81	55,43	44,57
3323	Temanggung	72,31	72,67	70,79	74,63	97,97	94,53	7,68	6,91	60,27	39,73
3324	Kendal	65,30	65,95	66,83	70,82	95,12	85,69	7,63	6,68	67,08	32,92
3325	Batang	60,02	60,27	68,42	72,38	94,01	87,64	7,24	6,21	73,83	26,17
3326	Pekalongan	58,20	58,75	67,35	71,33	95,66	88,72	7,25	6,39	75,74	24,26
3327	Pemalang	63,84	64,23	65,97	69,94	93,29	85,53	6,93	6,24	66,81	33,19
3328	Tegal	60,18	60,72	67,15	71,13	95,70	87,27	7,21	6,21	73,29	26,71
3329	Brebes	54,81	55,55	66,03	70,02	92,02	84,31	6,94	5,45	76,84	23,16
3371	Kota Magelang	73,96	74,57	68,37	72,32	99,68	96,06	10,86	10,04	60,65	39,35
3372	Kota Surakarta	76,37	76,76	70,39	74,25	99,11	95,07	11,09	10,07	57,83	42,17
3373	Kota Salatiga	74,78	75,05	69,24	73,16	99,49	94,71	10,53	9,62	58,91	41,09
3374	Kota Semarang	72,47	72,98	70,31	74,17	99,34	95,94	11,13	9,73	65,00	35,00
3375	Kota Pekalongan	64,04	64,48	68,55	72,50	98,33	93,91	9,22	8,24	73,12	26,88
3376	Kota Tegal	63,92	64,44	67,00	70,98	98,65	92,31	8,77	7,80	71,94	28,06
<b>3400</b>	<b>D I YOGYAKARTA</b>	<b>73,07</b>	<b>74,11</b>	<b>71,42</b>	<b>75,21</b>	<b>96,55</b>	<b>88,43</b>	<b>9,79</b>	<b>8,67</b>	<b>60,45</b>	<b>39,55</b>
3401	Kulon Progo	67,85	68,41	72,63	76,34	96,99	88,03	9,16	8,07	67,93	32,07
3402	Bantul	71,71	72,69	69,43	73,33	96,45	87,96	9,40	8,51	61,13	38,87
3403	Gunung Kidul	66,04	66,62	69,10	73,02	92,23	79,01	7,84	6,32	62,36	37,64
3404	Sleman	74,75	75,76	73,32	76,97	98,46	92,01	11,18	9,97	63,28	36,72
3471	Kota Yogyakarta	77,92	78,71	71,62	75,40	99,79	96,86	12,11	11,32	57,03	42,97

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		3500	JAWA TIMUR	65,61	66,56	67,93	71,90	93,40	84,81	7,96	6,88
3501	Pacitan	68,66	69,23	69,57	73,48	97,49	88,93	7,41	6,54	62,45	37,55
3502	Ponorogo	65,50	66,32	68,31	72,28	94,69	82,62	7,65	6,63	66,09	33,91
3503	Trenggalek	68,86	69,59	69,99	73,88	96,92	89,96	7,91	6,92	64,50	35,50
3504	Tulungagung	69,38	70,05	69,82	73,72	96,90	92,22	8,39	7,67	63,30	36,70
3505	Blitar	71,67	72,03	69,18	73,11	96,34	89,17	7,81	7,04	60,55	39,45
3506	Kediri	64,31	64,72	67,98	71,95	97,02	90,17	8,26	7,34	70,26	29,74
3507	Malang	66,72	67,53	67,30	71,28	95,09	85,85	7,46	6,59	64,33	35,67
3508	Lumajang	52,54	53,24	65,53	69,49	89,68	82,84	6,97	6,11	77,31	22,69
3509	Jember	56,69	57,20	61,19	64,96	91,13	77,94	7,54	5,70	70,04	29,96
3510	Banyuwangi	61,10	62,79	66,04	70,03	95,84	84,76	7,95	6,48	69,62	30,38
3511	Bondowoso	59,24	60,31	61,70	65,49	87,89	73,23	6,68	5,16	63,12	36,88
3512	Situbondo	52,77	53,36	61,51	65,30	85,49	72,79	6,85	5,28	73,03	26,97
3513	Probolinggo	49,41	50,04	59,61	63,31	87,91	74,62	6,55	5,28	75,78	24,22
3514	Pasuruan	63,75	64,51	62,45	66,27	95,61	86,30	7,34	6,24	64,03	35,97
3515	Sidoarjo	67,23	68,01	68,87	72,83	99,18	96,60	10,69	9,49	71,52	28,48
3516	Mojokerto	69,05	69,90	68,49	72,45	98,11	92,90	8,46	7,50	64,99	35,01
3517	Jombang	61,61	62,23	68,27	72,22	96,77	90,77	8,40	7,60	73,76	26,24
3518	Nganjuk	57,42	58,05	67,18	71,15	95,84	88,35	7,99	7,12	76,33	23,67
3519	Madiun	60,45	61,13	67,15	71,12	93,50	84,99	8,11	6,76	71,43	28,57
3520	Magetan	68,50	69,28	69,52	73,43	96,99	86,99	8,43	7,22	63,56	36,44
3521	Ngawi	60,95	61,59	68,31	72,28	91,83	80,14	7,46	6,30	69,44	30,56
3522	Bojonegoro	54,31	54,92	65,37	69,32	91,11	80,35	7,27	6,16	75,35	24,65
3523	Tuban	59,33	59,82	66,06	70,04	91,16	81,01	7,04	6,44	71,24	28,76
3524	Lamongan	62,85	63,61	66,44	70,43	94,35	83,83	8,14	6,97	67,77	32,23
3525	Gresik	67,18	68,04	69,32	73,25	98,14	94,21	9,37	8,56	69,20	30,80
3526	Bangkalan	56,58	57,76	61,65	65,44	86,91	75,10	6,23	5,23	66,99	33,01
3527	Sampang	50,65	51,67	61,64	65,44	80,03	62,46	5,07	3,66	71,24	28,76
3528	Pamekasan	58,62	59,33	62,53	66,36	89,99	81,90	7,32	5,48	67,90	32,10
3529	Sumenep	59,59	60,38	63,02	66,87	86,76	71,41	6,65	4,81	64,32	35,68
3571	Kota Kediri	70,75	71,65	68,71	72,66	99,53	96,88	10,52	9,63	66,01	33,99
3572	Kota Blitar	72,77	73,54	70,65	74,51	98,85	96,58	10,28	9,59	64,74	35,26
3573	Kota Malang	71,58	72,24	68,75	72,72	99,38	97,33	11,20	10,61	66,37	33,63
3574	Kota Probolinggo	65,52	66,40	68,58	72,55	96,40	88,94	9,32	8,05	70,02	29,98
3575	Kota Pasuruan	64,83	65,62	64,52	68,43	99,00	95,04	9,72	8,58	70,21	29,79
3576	Kota Mojokerto	72,08	73,00	69,89	73,79	99,38	96,40	10,56	9,68	64,75	35,25
3577	Kota Madiun	72,29	73,13	69,31	73,23	99,43	96,82	10,98	9,99	62,87	37,13
3578	Kota Surabaya	71,93	72,46	69,37	73,29	99,94	96,74	10,94	9,63	66,19	33,81
3579	Kota Batu	65,56	66,56	67,79	71,77	98,87	96,91	8,97	8,20	70,91	29,09

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		<b>3600 BANTEN</b>	<b>63,35</b>	<b>63,93</b>	<b>63,18</b>	<b>67,03</b>	<b>99,04</b>	<b>94,95</b>	<b>9,13</b>	<b>8,08</b>	<b>70,44</b>
3601	Pandeglang	61,25	61,65	62,10	65,91	98,23	94,83	7,47	6,59	70,57	29,43
3602	Lebak	60,92	61,31	61,51	65,30	97,76	94,60	6,76	5,87	70,31	29,69
3603	Tangerang	62,11	62,97	64,01	67,89	98,30	94,23	9,42	8,54	72,79	27,21
3604	Serang	57,44	57,83	62,03	65,84	98,04	93,97	8,08	6,77	75,19	24,81
3671	Kota Tangerang	68,13	68,90	66,48	70,45	99,34	97,58	11,13	9,55	69,58	30,42
3672	Kota Cilegon	58,44	58,80	66,70	70,67	99,55	98,14	10,30	9,66	80,11	19,89
3673	Kota Serang	61,34	62,34	63,59	67,46	98,80	95,35	9,03	8,21	73,31	26,69
3674	Kota Tangerang Selatan	62,82	63,70	66,73	70,71	99,28	97,60	11,53	10,47	75,66	24,34
<b>5100 BALI</b>	<b>68,24</b>	<b>69,02</b>	<b>68,86</b>	<b>72,79</b>	<b>95,25</b>	<b>84,80</b>	<b>9,34</b>	<b>7,75</b>	<b>64,79</b>	<b>35,21</b>	
5101	Jembrana	70,01	70,44	69,99	73,86	96,69	86,91	8,75	7,09	62,02	37,98
5102	Tabanan	69,92	70,35	72,64	76,34	97,11	85,22	9,13	7,71	65,54	34,46
5103	Badung	70,85	71,66	69,98	73,86	97,30	88,21	10,53	8,67	64,72	35,28
5104	Gianyar	69,06	70,36	70,30	74,15	94,68	83,57	9,71	8,22	64,59	35,41
5105	Klungkung	69,61	70,11	67,22	71,19	92,10	76,06	8,28	6,64	57,03	42,97
5106	Bangli	66,61	67,40	69,84	73,72	91,69	78,18	7,36	5,85	64,39	35,61
5107	Karangasem	64,84	65,90	66,02	70,00	86,54	67,90	6,79	4,94	58,97	41,03
5108	Buleleng	67,43	68,29	67,41	71,39	96,30	83,35	8,44	6,61	62,49	37,51
5171	Kota Denpasar	76,49	77,01	71,22	75,03	99,66	96,15	11,45	10,41	60,16	39,84
<b>5200 NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>56,70</b>	<b>57,58</b>	<b>60,59</b>	<b>64,33</b>	<b>88,59</b>	<b>78,66</b>	<b>7,80</b>	<b>6,59</b>	<b>69,85</b>	<b>30,15</b>	
5201	Lombok Barat	54,34	55,04	59,48	63,17	84,77	72,17	6,81	5,58	68,86	31,14
5202	Lombok Tengah	54,66	55,52	59,72	63,43	84,31	71,61	7,02	5,47	67,05	32,95
5203	Lombok Timur	61,12	62,05	59,58	63,29	89,68	78,72	7,51	6,39	57,49	42,51
5204	Sumbawa	63,00	63,59	59,05	62,72	93,76	88,70	8,10	7,22	64,28	35,72
5205	Dompu	60,78	61,71	59,36	63,05	91,29	84,25	8,50	7,60	67,30	32,70
5206	Bima	53,58	54,58	61,40	65,19	92,06	84,06	7,93	7,26	74,75	25,25
5207	Sumbawa Barat	48,19	49,00	59,65	63,35	95,84	89,22	8,43	7,60	81,43	18,57
5208	Lombok Utara	47,84	48,66	59,15	62,83	82,14	69,29	6,37	4,92	74,59	25,41
5271	Kota Mataram	65,66	66,61	65,21	69,16	97,09	89,53	10,37	9,03	68,01	31,99
5272	Kota Bima	64,66	65,78	61,27	65,04	96,93	92,29	10,59	9,84	63,55	36,45

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		5300	NUSA TENGGARA TIMUR	65,33	65,99	65,83	69,80	91,03	87,00	7,34	6,86
5301	Sumba Barat	59,32	59,89	63,66	67,53	83,22	79,17	6,79	6,48	67,64	32,36
5302	Sumba Timur	61,35	61,92	60,33	64,06	88,16	84,32	6,63	6,42	59,59	40,41
5303	Kupang	61,94	62,37	63,82	67,69	91,49	87,70	7,57	7,05	66,56	33,44
5304	Timor Tengah Selatan	55,51	56,04	65,17	69,11	90,15	80,93	6,93	6,34	73,23	26,77
5305	Timor Tengah Utara	63,68	64,68	67,02	71,02	90,21	87,32	6,96	6,86	63,81	36,19
5306	Belu	60,62	61,45	64,45	68,36	85,64	82,17	6,72	6,42	63,62	36,38
5307	Alor	66,37	66,83	65,33	69,28	97,99	93,35	7,98	7,20	59,57	40,43
5308	Lembata	66,43	66,92	64,83	68,75	97,57	91,14	7,73	6,59	56,27	43,73
5309	Flores Timur	66,55	67,21	66,48	70,47	95,57	86,13	7,28	6,38	57,47	42,53
5310	Sikka	61,96	62,46	67,39	71,37	92,90	90,83	6,76	6,45	65,66	34,34
5311	Ende	67,22	67,72	63,19	67,04	96,84	92,00	7,94	7,03	47,21	52,79
5312	Ngada	68,76	69,38	65,40	69,35	98,32	95,32	7,85	7,62	56,35	43,65
5313	Manggarai	66,43	67,20	65,59	69,55	95,23	90,15	7,29	6,56	55,96	44,04
5314	Rote Nda	62,63	63,00	66,53	70,53	89,85	87,51	7,03	6,41	65,36	34,64
5315	Manggarai Barat	63,46	64,14	64,71	68,63	96,01	90,86	6,95	6,29	61,65	38,35
5316	Sumba Barat Daya	60,60	61,38	62,05	65,86	78,97	72,12	6,39	6,04	59,11	40,89
5317	Sumba Tengah	60,05	61,15	61,11	64,88	78,14	71,91	5,66	5,32	54,01	45,99
5318	Nageko	66,05	66,80	61,85	65,65	96,76	94,16	7,60	7,09	53,06	46,94
5319	Manggarai Timur	60,86	61,60	65,92	69,89	95,08	90,49	6,75	6,35	66,56	33,44
5320	Sabu Raijua	52,56	53,38	65,65	69,61	79,14	76,35	5,45	5,66	66,06	33,94
5371	Kota Kupang	73,99	74,73	71,32	75,15	99,17	98,05	11,59	10,90	64,23	35,77
6100	KALIMANTAN BARAT	64,78	65,62	64,85	68,77	94,66	87,90	7,58	6,63	65,98	34,02
6101	Sambas	60,50	60,95	59,52	63,22	96,73	86,68	6,78	5,72	65,05	34,95
6102	Bengkayang	64,71	65,04	67,05	71,02	93,64	85,16	7,10	6,29	65,18	34,82
6103	Landak	65,21	65,89	63,81	67,69	97,27	87,89	8,00	7,02	63,74	36,26
6104	Pontianak	64,33	64,67	65,38	69,33	94,96	83,75	7,33	6,23	65,84	34,16
6105	Sanggau	64,34	64,73	66,81	70,79	95,54	87,04	7,28	6,03	67,36	32,64
6106	Ketapang	58,31	59,09	65,73	69,70	95,17	89,00	7,00	6,13	74,36	25,64
6107	Sintang	63,63	64,17	66,60	70,58	93,90	87,37	7,91	6,57	67,96	32,04
6108	Kapuas Hulu	68,08	68,43	64,76	68,68	96,17	89,81	7,92	6,64	61,05	38,95
6109	Sekadau	65,24	65,92	65,45	69,40	95,92	86,94	7,37	6,16	62,57	37,43
6110	Melawai	64,34	64,87	65,90	69,87	94,24	91,13	8,03	7,04	66,65	33,35
6111	Kayong Utara	58,94	59,37	63,94	67,82	93,70	82,63	6,45	5,35	69,58	30,42
6112	Kubu Raya	62,77	63,72	64,47	68,37	93,54	84,11	7,73	6,58	66,64	33,36
6171	Kota Pontianak	67,46	68,39	65,48	69,43	98,55	94,25	10,22	9,47	67,01	32,99
6172	Kota Singkawang	59,54	60,05	65,41	69,36	93,90	86,86	7,89	7,38	73,33	26,67

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		<b>6200 KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>69,80</b>	<b>70,87</b>	<b>69,40</b>	<b>73,31</b>	<b>99,87</b>	<b>96,72</b>	<b>8,63</b>	<b>7,84</b>	<b>67,08</b>
6201 Kotawaringin Barat	61,32	61,86	69,71	73,61	98,96	93,27	8,44	7,41	77,64	22,36	
6202 Kotawaringin Timur	63,91	64,57	67,78	71,74	99,84	98,35	8,75	7,78	75,20	24,80	
6203 Kapuas	64,59	65,16	68,99	72,92	98,75	95,66	8,14	7,11	72,35	27,65	
6204 Barito Selatan	71,30	71,97	66,42	70,40	99,86	98,93	9,75	8,21	62,42	37,58	
6205 Barito Utara	74,91	75,42	70,32	74,19	99,50	98,25	9,84	8,15	58,01	41,99	
6206 Sukamara	54,47	55,17	65,98	69,96	98,74	94,59	7,90	6,93	81,86	18,14	
6207 Lamandau	62,62	63,30	65,36	69,31	99,24	98,50	8,39	7,46	74,88	25,12	
6208 Seruyan	63,87	64,39	66,11	70,09	99,87	98,99	9,24	7,60	74,69	25,31	
6209 Katingan	64,89	65,78	65,68	69,64	99,95	99,31	8,59	7,97	71,68	28,32	
6210 Pulang Pisau	57,58	58,26	65,73	69,69	98,68	95,67	8,20	7,36	78,55	21,45	
6211 Gunung Mas	71,85	72,42	66,16	70,14	99,95	99,54	9,81	8,77	43,37	56,63	
6212 Barito Timur	71,84	72,22	65,98	69,96	99,29	97,82	9,21	8,52	59,95	40,05	
6213 Murung Raya	64,83	65,45	66,25	70,23	99,97	99,91	7,95	7,19	71,90	28,10	
6271 Kota Palangka Raya	71,97	72,89	71,65	75,43	99,92	99,32	11,35	10,66	68,97	31,03	
<b>6300 KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>65,59</b>	<b>66,30</b>	<b>62,32</b>	<b>66,14</b>	<b>98,28</b>	<b>94,52</b>	<b>8,38</b>	<b>7,50</b>	<b>65,52</b>	<b>34,48</b>	
6301 Tanah Laut	63,07	63,66	66,81	70,81	98,46	94,47	7,81	6,92	72,38	27,62	
6302 Kota Baru	61,09	61,78	63,92	67,80	96,42	94,09	7,91	6,61	74,45	25,55	
6303 Banjar	65,08	65,63	63,80	67,68	98,46	94,97	7,71	6,94	68,00	32,00	
6304 Barito Kuala	65,94	66,60	60,49	64,23	98,24	92,89	7,47	6,33	59,83	40,17	
6305 Tapin	70,68	71,19	65,55	69,51	99,16	95,41	7,77	6,79	54,07	45,93	
6306 Hulu Sungai Selatan	58,10	58,71	62,46	66,28	99,53	95,51	7,67	7,33	75,11	24,89	
6307 Hulu Sungai Tengah	71,01	71,41	63,78	67,65	99,81	96,71	7,96	7,09	50,24	49,76	
6308 Hulu Sungai Utara	59,33	59,79	61,63	65,42	99,05	94,21	7,98	7,13	71,60	28,40	
6309 Tabalong	60,55	61,22	61,52	65,31	99,16	95,14	8,63	7,67	72,56	27,44	
6310 Tanah Bumbu	63,34	63,99	63,48	67,35	97,71	93,10	7,96	7,02	70,32	29,68	
6311 Balangan	62,27	62,73	60,22	63,95	98,05	93,37	7,50	6,59	65,80	34,20	
6371 Kota Banjarmasin	70,33	71,02	64,46	68,37	99,59	97,97	10,21	9,53	63,15	36,85	
6372 Kota Banjar Baru	68,01	68,66	65,83	69,80	99,63	98,85	11,03	10,29	70,19	29,81	
<b>6400 KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>61,07</b>	<b>61,86</b>	<b>69,51</b>	<b>73,43</b>	<b>98,32</b>	<b>96,42</b>	<b>9,54</b>	<b>8,83</b>	<b>78,90</b>	<b>21,10</b>	
6401 Pasir	61,92	62,21	71,59	75,40	97,68	92,76	8,64	7,85	78,25	21,75	
6402 Kutai Barat	62,71	63,06	68,58	72,53	98,21	94,87	9,01	7,76	76,05	23,95	
6403 Kutai	60,63	61,32	66,12	70,10	99,01	97,57	9,55	8,41	77,50	22,50	
6404 Kutai Timur	54,10	54,90	66,89	70,87	99,45	98,82	8,88	8,42	83,74	16,26	
6405 Berau	54,47	55,10	68,24	72,21	97,67	96,68	9,06	8,13	83,92	16,08	
6406 Malinau	64,62	64,97	66,54	70,53	96,60	91,71	8,69	7,75	74,07	25,93	
6407 Bulongan	61,28	61,84	71,26	75,08	97,37	94,38	8,59	7,95	79,14	20,86	
6408 Nunukan	64,81	65,43	69,88	73,78	97,85	92,85	8,45	7,46	74,67	25,33	
6409 Penajam Paser Utara	62,10	62,63	69,74	73,64	97,85	93,06	8,34	7,51	76,21	23,79	
6410 Tana Tidung	59,54	60,73	70,84	74,67	96,94	86,84	8,58	7,45	79,19	20,81	
6471 Kota Balikpapan	65,95	66,65	70,51	74,38	99,15	98,45	10,84	10,03	76,08	23,92	
6472 Kota Samarinda	69,80	70,45	69,51	73,43	99,44	97,81	10,80	10,01	70,89	29,11	
6473 Kota Tarakan	65,35	66,01	70,08	73,97	99,38	98,30	10,06	9,16	76,02	23,98	
6474 Kota Bontang	57,12	57,59	70,73	74,57	99,74	98,62	11,14	9,89	83,51	16,49	

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		<b>7100</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>68,60</b>	<b>69,11</b>	<b>70,45</b>	<b>74,30</b>	<b>99,78</b>	<b>99,39</b>	<b>9,15</b>	<b>8,97</b>
7101	Bolaang Mongondow	65,51	66,03	69,82	73,71	99,63	98,27	7,83	7,37	71,93	28,07
7102	Minahasa	73,27	73,94	70,68	74,51	99,90	99,51	9,50	9,55	62,47	37,53
7103	Kep.Sangihe Talaud	65,39	65,91	71,34	75,15	99,32	98,11	8,06	7,72	73,39	26,61
7104	Kepulauan Talaud	65,35	65,84	70,24	74,11	99,94	99,53	9,11	8,71	73,73	26,27
7105	Minahasa Selatan	68,73	69,10	70,54	74,39	99,95	99,64	8,85	8,66	69,31	30,69
7106	Minahasa Utara	71,31	71,73	70,88	74,71	99,66	99,85	9,48	9,29	66,68	33,32
7107	Bolaang Mongondow Utara	64,19	64,58	68,14	72,10	99,32	97,75	7,54	7,44	72,25	27,75
7108	Kep. Siau Tagulandang Biaro	69,10	69,71	66,79	70,76	99,88	99,69	8,44	8,66	66,26	33,74
7109	Minahasa Tenggara	66,84	67,21	68,17	72,13	99,69	99,45	8,65	8,40	67,43	32,57
7110	Bolaang Mongondow Selatan	62,04	63,01	69,45	73,35	98,81	99,31	7,42	6,70	73,46	26,54
7111	Bolaang Mongondow Timur	59,40	60,36	69,52	73,42	99,84	98,21	7,90	7,08	77,66	22,34
7171	Manado	72,56	73,27	70,85	74,68	99,98	99,71	10,98	10,79	66,78	33,22
7172	Kota Bitung	64,21	64,65	68,67	72,62	99,73	99,09	9,88	9,29	75,16	24,84
7173	Kota Tomohon	71,43	72,11	70,93	74,76	99,99	99,48	10,21	10,16	66,39	33,61
7174	Kota Kotamobago	63,38	64,25	70,08	73,96	99,85	99,37	9,57	9,47	75,78	24,22
<b>7200</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>63,03</b>	<b>63,59</b>	<b>64,95</b>	<b>68,87</b>	<b>97,85</b>	<b>95,32</b>	<b>8,28</b>	<b>7,95</b>	<b>71,71</b>	<b>28,29</b>
7201	Banggai Kepulauan	67,37	68,17	62,73	66,57	96,95	94,93	8,15	7,73	56,21	43,79
7202	Banggai	61,28	62,06	66,80	70,78	98,36	92,86	8,22	7,78	73,58	26,42
7203	Morowali	60,50	61,24	63,84	67,72	98,72	96,37	8,38	8,03	74,56	25,44
7204	Poso	63,81	64,46	63,33	67,19	99,01	97,01	9,03	8,72	70,15	29,85
7205	Donggala	61,89	62,54	63,75	67,63	97,11	93,82	7,84	7,51	71,59	28,41
7206	Toli-Toli	56,30	57,17	62,64	66,47	98,16	93,50	7,89	7,82	76,22	23,78
7207	Buol	56,70	57,58	63,74	67,61	98,85	97,92	8,33	8,19	77,00	23,00
7208	Pariigi Moutong	55,41	56,18	63,60	67,47	96,83	92,67	7,53	6,89	77,43	22,57
7209	Tojo Una-Una	58,01	58,76	62,18	66,00	99,14	96,85	8,39	7,80	74,93	25,07
7210	Sigi	62,08	62,60	63,74	67,61	96,67	96,17	8,11	7,77	68,80	31,20
7271	Kodya Palu	70,82	71,61	68,34	72,31	99,82	99,20	11,66	10,82	67,39	32,61

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		<b>7300</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>62,75</b>	<b>63,50</b>	<b>68,29</b>	<b>72,25</b>	<b>91,23</b>	<b>86,64</b>	<b>8,18</b>	<b>7,63</b>
7301	Selayar	61,16	61,81	65,95	69,93	95,43	88,64	7,73	6,95	69,38	30,62
7302	Bulukumba	64,28	64,92	70,25	74,12	88,18	85,04	7,40	7,02	66,89	33,11
7303	Bantaeng	64,48	65,27	72,11	75,88	82,61	79,09	6,52	6,39	66,09	33,91
7304	Jeneponto	55,57	56,00	63,29	67,15	80,07	76,01	6,50	5,97	70,78	29,22
7305	Takalar	57,59	58,39	68,11	72,09	85,88	79,55	7,39	6,63	72,57	27,43
7306	Gowa	63,53	63,94	69,90	73,79	85,75	80,75	7,47	7,05	68,81	31,19
7307	Sinjai	62,43	63,12	70,37	74,24	90,30	86,05	7,33	7,00	68,66	31,34
7308	Maros	59,40	60,04	70,88	74,74	89,32	82,14	7,88	6,93	74,48	25,52
7309	Pangkajene Kepulauan	61,73	62,69	67,04	71,02	91,34	86,77	7,76	7,02	68,62	31,38
7310	Barru	55,83	56,44	67,11	71,09	92,49	86,53	7,97	7,78	76,26	23,74
7311	Bone	61,15	61,79	68,06	72,03	89,40	84,59	7,22	6,33	69,56	30,44
7312	Soppeng	62,85	63,26	69,86	73,74	90,45	84,54	7,57	7,14	69,18	30,82
7313	Wajo	57,17	57,54	69,45	73,39	90,22	81,81	6,90	6,37	74,82	25,18
7314	Sidenreng Rappang	62,88	63,41	70,94	74,79	93,57	86,73	8,07	7,19	71,21	28,79
7315	Pinrang	67,28	67,78	70,40	74,27	95,17	87,20	7,92	7,57	66,16	33,84
7316	Enrekang	70,24	70,48	73,33	77,00	95,68	86,78	8,76	7,98	65,48	34,52
7317	Luwu	70,16	70,35	72,18	75,94	93,99	90,44	8,34	7,66	64,30	35,70
7318	Tana Toraja	69,17	70,05	72,36	76,08	91,39	84,86	8,72	7,78	62,75	37,25
7322	Luwu Utara	54,71	54,96	69,80	73,69	95,55	91,06	7,80	7,29	81,75	18,25
7325	Luwu Timur	58,18	58,62	69,16	73,09	96,48	91,55	8,57	7,98	78,73	21,27
7326	Toraja Utara	64,72	65,56	71,73	75,49	87,16	83,91	8,18	7,57	67,37	32,63
7371	Kota Makasar	73,04	73,81	71,97	75,74	98,46	95,55	11,58	10,71	66,16	33,84
7372	Kota Pare Pare	68,43	69,03	72,63	76,35	98,76	95,61	10,42	9,61	70,96	29,04
7373	Kota Palopo	70,54	71,06	70,73	74,57	99,28	95,92	10,34	10,00	66,60	33,40
<b>7400</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>64,79</b>	<b>65,72</b>	<b>66,08</b>	<b>70,06</b>	<b>95,94</b>	<b>89,15</b>	<b>8,64</b>	<b>7,92</b>	<b>66,61</b>	<b>33,39</b>
7401	Buton	61,04	61,89	66,99	70,98	92,74	82,07	7,65	6,54	68,92	31,08
7402	Muna	61,94	62,85	64,17	68,06	96,66	83,70	8,34	7,05	65,54	34,46
7403	Konawe/Kab Kendari	65,91	66,58	65,63	69,59	97,91	91,94	9,10	8,07	65,73	34,27
7404	Kolaka	57,92	58,71	65,47	69,42	95,11	92,39	8,57	7,90	76,94	23,06
7405	Konawe Selatan	61,85	62,60	65,86	69,83	96,97	92,66	8,04	7,56	71,36	28,64
7406	Bombana	56,64	57,26	65,99	69,97	92,94	88,99	7,52	7,20	75,08	24,92
7407	Wakatobi	63,98	64,56	66,25	70,23	96,20	90,32	8,15	7,40	63,52	36,48
7408	Kolaka Utara	59,37	60,10	63,81	67,68	96,10	92,06	7,96	7,57	73,51	26,49
7409	Konawe Utara	65,94	66,60	65,45	69,40	94,66	93,10	8,24	7,23	62,13	37,87
7410	Buton Utara	66,48	66,94	66,64	70,63	97,23	87,93	8,93	7,82	65,45	34,55
7471	Kota Kendari	71,15	71,75	67,24	71,20	99,59	97,98	11,60	11,19	65,80	34,20
7472	Kota Bau-Bau	64,56	65,30	68,77	72,73	98,08	94,19	10,43	9,59	71,31	28,69

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
		<b>7500</b>	<b>GORONTALO</b>	<b>57,67</b>	<b>58,32</b>	<b>65,19</b>	<b>69,13</b>	<b>96,49</b>	<b>95,65</b>	<b>7,13</b>	<b>7,69</b>
7501	Boalemo	59,19	59,77	66,37	70,36	96,64	95,45	5,90	6,82	73,14	26,86
7502	Gorontalo	58,10	58,82	67,15	71,14	94,57	95,11	6,71	7,22	75,03	24,97
7503	Pokuwato	66,40	67,09	65,94	69,91	97,80	96,61	6,57	6,97	64,30	35,70
7504	Bone Bolango	62,53	63,22	66,97	70,96	97,86	97,32	7,53	8,20	71,90	28,10
7505	Gorontalo Utara	57,46	58,40	65,27	69,22	94,69	96,05	6,14	6,81	75,01	24,99
7571	Kota Gorontalo	63,88	64,67	64,89	68,82	99,38	99,75	10,11	10,45	70,93	29,07
<b>7600</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>65,86</b>	<b>66,73</b>	<b>66,08</b>	<b>70,06</b>	<b>91,49</b>	<b>86,67</b>	<b>7,70</b>	<b>7,11</b>	<b>64,06</b>	<b>35,94</b>
7601	Majene	67,41	68,26	63,82	67,69	95,99	94,35	8,95	8,18	62,78	37,22
7602	Polewali Mamas	63,13	63,75	63,38	67,24	90,11	83,32	7,42	6,69	63,83	36,17
7603	Mamas	59,85	60,64	69,42	73,33	90,57	87,32	7,80	6,96	74,86	25,14
7604	Mamuju	60,42	61,40	66,83	70,82	94,76	88,02	7,71	7,29	73,26	26,74
7605	Mamuju Utara	53,84	54,07	65,66	69,62	96,54	93,93	7,53	6,95	80,80	19,20
<b>8100</b>	<b>MALUKU</b>	<b>67,76</b>	<b>68,54</b>	<b>65,69</b>	<b>69,65</b>	<b>99,07</b>	<b>98,06</b>	<b>9,31</b>	<b>8,98</b>	<b>64,42</b>	<b>35,58</b>
8101	Maluku Tenggara Barat	68,32	68,98	62,56	66,38	99,71	99,89	8,99	8,59	53,54	46,46
8102	Maluku Tenggara	66,56	67,11	66,25	70,24	99,80	99,36	9,17	8,76	66,88	33,12
8103	Maluku Tengah	65,73	66,33	64,01	67,89	99,84	98,51	8,93	8,65	66,64	33,36
8104	Buru	61,33	61,73	66,56	70,56	95,47	90,34	8,36	7,08	72,07	27,93
8105	Kepulauan Aru	68,92	69,27	66,01	69,99	99,55	98,79	8,27	7,54	60,31	39,69
8106	Seram Bagian Barat	66,19	66,73	64,77	68,69	99,12	96,45	8,70	8,54	64,41	35,59
8107	Seram Bagian Timur	61,31	61,89	64,18	68,07	98,77	97,61	8,04	7,64	70,03	29,97
8108	Maluku Barat Daya	63,86	64,58	62,49	66,32	98,78	98,05	8,19	7,79	62,14	37,86
8109	Buru Selatan	67,57	68,34	65,66	69,63	94,32	85,46	7,34	6,39	44,31	55,69
8171	Kota Ambon	76,47	76,88	71,31	75,12	99,81	99,43	11,48	11,26	60,67	39,33
8172	Kota Tual	62,48	63,15	67,11	71,09	99,80	99,45	10,11	9,58	75,93	24,07
<b>8200</b>	<b>MALUKU UTARA</b>	<b>65,35</b>	<b>66,04</b>	<b>64,41</b>	<b>68,31</b>	<b>97,96</b>	<b>94,95</b>	<b>8,86</b>	<b>8,07</b>	<b>64,64</b>	<b>35,36</b>
8201	Halmahera Barat	61,71	62,24	62,74	66,58	96,97	94,40	8,22	7,69	67,85	32,15
8202	Halmahera Tengah	61,09	61,64	65,07	69,01	98,80	96,01	8,47	7,63	71,94	28,06
8203	Kepulauan Sula	59,05	59,55	63,47	67,34	98,84	95,24	8,25	7,46	72,35	27,65
8204	Halmahera Selatan	52,37	52,97	63,80	67,67	97,90	94,66	8,09	7,41	79,84	20,16
8205	Halmahera Utara	58,92	59,75	64,29	68,19	98,78	96,52	8,61	7,82	73,99	26,01
8206	Halmahera Timur	57,57	58,15	63,77	67,64	96,87	94,95	8,41	7,49	75,65	24,35
8207	Pulau Morotai	55,78	56,49	63,67	67,54	96,15	93,61	7,22	6,15	73,95	26,05
8271	Kota Ternate	71,75	72,34	68,94	72,91	99,84	98,88	11,34	10,51	66,62	33,38
8272	Kota Tidore Kepulauan	63,49	64,22	63,37	67,23	99,16	96,20	9,26	8,74	68,16	31,84

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPG		Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Sumbangan Pendapatan	
		2011	2012	L	P	L	P	L	P	L	P
9100	PAPUA BARAT	59,24	60,02	66,87	70,86	98,30	92,79	9,79	8,22	76,34	23,66
9101	Fak-Fak	63,76	64,44	68,96	72,92	98,99	97,62	9,73	9,32	73,21	26,79
9102	Kaimana	66,28	66,82	68,02	71,98	98,14	95,65	8,80	7,55	68,41	31,59
9103	Teluk Wondama	53,10	53,73	65,83	69,80	90,92	82,95	7,39	6,25	79,25	20,75
9104	Teluk Bintuni	54,52	55,15	66,61	70,61	93,14	85,08	9,36	6,68	80,64	19,36
9105	Manokwari	57,53	58,36	66,31	70,30	95,71	83,69	10,14	8,00	75,53	24,47
9106	Sorong Selatan	57,73	57,95	64,92	68,85	99,33	83,98	8,58	7,62	74,60	25,40
9107	Sorong	54,02	54,57	66,28	70,28	96,79	89,03	8,86	7,51	80,31	19,69
9108	Raja Ampat	53,09	53,45	64,50	68,40	95,98	92,43	7,92	7,01	78,36	21,64
9109	Tambrau	49,93	50,36	64,53	68,44	81,50	72,76	6,41	5,11	59,35	40,65
9110	Maybrat	56,65	57,26	64,72	68,64	95,66	89,94	8,75	7,93	27,36	72,64
9171	Kota Sorong	64,81	65,48	70,48	74,36	99,80	99,56	11,41	10,52	77,15	22,85
9400	PAPUA	62,69	63,06	66,91	70,89	81,72	72,00	7,44	5,92	64,64	35,36
9401	Merauke	64,05	64,40	60,67	64,41	97,64	85,14	9,35	9,47	63,76	36,24
9402	Jayawijaya	53,55	54,49	64,73	68,65	68,02	34,99	5,99	4,11	44,74	55,26
9403	Jayapura	67,02	67,45	65,61	69,57	98,47	95,08	10,04	9,05	69,44	30,56
9404	Nabire	62,71	63,20	65,87	69,84	86,24	74,48	9,18	6,66	67,93	32,07
9408	Yapen Waropen	66,12	66,69	66,61	70,61	93,27	87,66	8,56	6,33	66,46	33,54
9409	Biak Namfor	62,51	62,76	64,84	68,76	98,94	97,37	9,92	9,41	71,72	28,28
9410	Paniai	58,09	58,09	66,06	70,04	68,99	51,05	6,74	3,45	55,51	44,49
9411	Puncak Jaya	67,16	67,23	65,97	69,95	84,08	89,33	7,03	5,21	61,66	38,34
9412	Mimika	59,26	59,66	68,61	72,58	97,02	86,99	9,20	6,70	79,80	20,20
9413	Boven Digoel	47,54	48,27	65,24	69,18	36,10	30,45	7,91	3,23	68,54	31,46
9414	Mappi	49,56	50,38	64,38	68,28	33,81	31,65	7,29	4,01	61,84	38,16
9415	Asmat	48,10	48,49	65,40	69,35	31,27	31,01	6,08	3,77	66,79	33,21
9416	Yahukimo	49,93	50,26	65,19	69,13	45,38	24,37	3,99	2,32	54,92	45,08
9417	Pegunungan Bintang	48,76	49,41	64,12	68,00	33,39	32,17	3,70	2,17	59,37	40,63
9418	Tolikara	52,17	52,53	64,21	68,10	58,30	29,58	5,43	2,16	45,63	54,37
9419	Sarmi	67,18	67,74	64,57	68,48	95,40	86,70	8,31	6,62	62,20	37,80
9420	Keerom	65,45	65,80	65,38	69,33	93,07	89,92	8,55	6,76	68,48	31,52
9426	Waropen	61,13	61,46	63,98	67,87	87,96	74,84	7,55	6,40	66,79	33,21
9427	Supiori	62,58	62,81	64,33	68,23	97,04	95,39	8,74	7,62	70,28	29,72
9428	Membramo Raya	57,15	57,61	64,31	68,20	75,58	57,02	7,57	4,17	41,00	59,00
9429	Nduga	48,11	48,37	63,95	67,83	36,70	24,45	3,02	2,58	56,16	43,84
9430	Lanny Jaya	49,14	49,69	64,60	68,51	50,65	29,85	4,55	2,84	60,44	39,56
9431	Mamberamo Tengah	48,21	48,54	64,55	68,46	43,21	23,95	3,79	1,84	54,66	45,34
9432	Yalimo	48,91	49,17	64,66	68,57	36,24	33,13	3,05	2,49	50,57	49,43
9433	Puncak	45,87	46,14	65,71	69,67	36,93	27,33	3,20	2,45	66,16	33,84
9434	Dogiyai	46,76	47,26	65,34	69,29	67,54	21,78	4,84	3,17	63,96	36,04
9435	Intan Jaya	46,55	46,98	63,17	67,02	39,91	18,20	3,45	1,20	52,23	47,77
9436	Deiyai	43,37	43,85	63,04	66,89	45,17	22,64	4,69	1,68	67,66	32,34
9471	Kota Jayapura	71,46	71,95	66,69	70,67	99,89	98,81	11,51	10,73	67,73	32,27
INDONESIA		67,80	68,52	67,72	71,69	95,78	90,67	8,48	7,64	65,30	34,70

**Lampiran 3. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2011-2012**

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
1100	ACEH	52,06	54,44	5,80	52,12	32,14
1101	Simeulue	57,91	46,02	5,00	37,67	23,55
1102	Aceh Singkil	54,62	54,86	16,00	26,28	27,80
1103	Aceh Selatan	41,18	42,15	0,01	54,03	26,88
1104	Aceh Tenggara	58,60	58,69	12,00	49,20	29,73
1105	Aceh Timur	45,59	49,72	5,71	48,87	27,96
1106	Aceh Tengah	57,98	57,07	6,67	58,84	35,10
1107	Aceh Barat	47,06	47,49	3,33	46,41	27,36
1108	Aceh Besar	44,41	44,71	2,86	58,61	24,82
1109	Pidie	47,65	46,44	4,44	62,36	27,51
1110	Bireuen	51,78	50,44	2,86	61,13	36,94
1111	Aceh Utara	47,39	50,01	2,22	55,31	33,46
1112	Aceh Barat Daya	42,75	43,94	0,01	50,69	27,61
1113	Gayo Lues	49,27	57,90	10,00	37,91	34,71
1114	Aceh Tamiang	55,44	48,05	6,67	62,94	26,02
1115	Nagan Raya	56,62	55,74	12,00	40,29	26,59
1116	Aceh Jaya	49,20	49,59	0,01	47,05	36,82
1117	Bener Meriah	48,32	47,83	4,00	58,29	27,22
1118	Pidie Jaya	56,12	63,81	16,00	60,04	32,24
1171	Kota Banda Aceh	46,72	47,68	3,33	45,21	24,77
1172	Kota Sabang	58,45	59,40	10,00	48,73	30,07
1173	Kota Langsa	70,05	59,83	16,00	48,89	26,47
1174	Kota Lhokseumawe	52,14	53,48	12,00	50,40	21,96
1175	Subulussalam	70,67	74,89	26,67	38,39	36,96

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
1200	SUMATERA UTARA	67,39	69,82	17,00	51,62	35,64
1201	Nias	46,89	45,38	0,01	26,76	48,97
1202	Mandailing Natal	63,16	63,49	7,50	54,91	45,33
1203	Tapanuli Selatan	63,72	63,42	6,67	55,70	47,98
1204	Tapanuli Tengah	73,48	74,05	20,00	51,81	41,91
1205	Tapanuli Utara	64,56	65,19	8,57	49,82	48,96
1206	Toba Samosir	67,76	68,05	12,00	57,19	42,54
1207	Labuhan Batu	57,95	60,07	10,00	50,35	30,48
1208	Asahan	53,19	53,48	8,89	49,02	25,02
1209	Simalungun	58,69	60,60	8,89	54,92	34,53
1210	Dairi	65,05	65,05	10,00	59,68	50,58
1211	Karo	60,29	65,41	11,43	63,50	51,93
1212	Deli Serdang	61,88	62,12	16,00	46,87	26,45
1213	Langkat	51,72	56,21	8,00	49,79	29,12
1214	Nias Selatan	61,27	56,18	13,33	28,21	33,62
1215	Humbang Hasundutan	57,67	58,51	4,00	52,03	50,35
1216	Pakpak Barat	58,88	56,64	5,00	65,20	47,86
1217	Samosir	67,63	68,12	12,00	53,31	50,22
1218	Serdang Bedagai	60,63	59,61	11,11	52,68	29,37
1219	Batu Bara	54,62	57,55	5,71	58,98	37,13
1220	Padang Lawas Utara	64,73	65,69	10,00	43,18	43,36
1221	Padang Lawas	55,04	56,56	3,33	55,34	40,18
1222	Labuhan Batu Selatan	55,43	70,18	20,00	55,55	32,03
1223	Labuhan Batu Utara	23,59	36,05	0,01	66,68	21,94
1224	Nias Utara	68,05	65,14	16,00	31,20	44,53
1225	Nias Barat	61,61	67,97	15,00	40,51	50,89
1271	Kota Sibolga	65,18	65,45	15,79	53,49	31,31
1272	Kota Tanjung Balai	58,47	62,13	24,00	59,73	21,83
1273	Kota Pematang Siantar	63,02	60,23	10,00	58,02	33,82
1274	Kota Tebing Tinggi	56,67	55,50	8,00	39,83	30,11
1275	Kota Medan	58,78	59,14	10,00	50,66	30,49
1276	Kota Binjai	60,86	60,11	10,00	62,28	34,14
1277	Kota Padang Sidempuan	65,92	66,04	20,00	53,63	28,98
1278	Gunung Sitoli	60,76	64,48	12,00	48,17	39,39

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
1300	SUMATERA BARAT	64,62	65,22	12,73	54,19	35,55
1301	Kepulauan Mentawai	43,01	45,77	0,01	48,71	29,22
1302	Pesisir Selatan	43,04	48,30	0,01	57,69	33,81
1303	Solok	54,09	54,62	2,86	54,66	37,87
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	49,03	48,99	8,00	69,53	26,87
1305	Tanah Datar	57,73	56,63	8,57	60,96	32,57
1306	Padang Pariaman	55,77	56,57	8,57	56,38	30,68
1307	Agam	60,10	60,20	7,50	56,55	38,43
1308	Limapuluh Koto	51,90	52,37	8,57	50,74	26,19
1309	Pasaman	54,84	55,31	3,33	44,64	64,50
1310	Solok Selatan	57,80	57,34	8,00	58,95	33,95
1311	Dharmas Raya	43,62	46,23	4,00	61,05	25,69
1312	Pasaman Barat	52,62	53,76	2,86	53,53	35,68
1371	Kota Padang	57,51	60,65	8,89	47,17	32,99
1372	Kota Solok	61,11	61,92	10,00	51,19	34,67
1373	Kota Sawah Lunto	63,03	60,95	20,00	65,08	26,08
1374	Kota Padang Panjang	75,50	74,37	20,00	62,84	45,59
1375	Kota Bukit Tinggi	69,74	69,84	16,00	54,84	37,82
1376	Kota Payakumbuh	59,85	55,69	4,00	56,76	36,20
1377	Kota Pariaman	47,95	56,55	10,00	59,05	29,40
1400	RIAU	65,34	69,05	21,82	46,46	26,51
1401	Kuantan Sengingi	55,13	55,03	2,86	55,36	34,45
1402	Indragiri Hulu	64,56	66,23	17,14	48,02	27,52
1403	Indragiri Hilir	51,54	49,45	4,44	33,91	27,75
1404	Pelalawan	45,71	45,76	0,01	40,98	27,44
1405	Siak	48,52	47,38	8,57	39,47	18,67
1406	Kampar	49,13	50,14	6,67	50,73	22,21
1407	Rokan Hulu	52,46	54,78	8,57	54,50	24,91
1408	Bengkalis	47,36	44,56	7,50	65,77	20,03
1409	Rokan Hilir	47,18	56,13	15,00	58,23	21,12
1410	Kepulauan Meranti	54,48	55,51	9,09	50,91	25,76
1471	Kota Pekanbaru	62,73	61,80	15,56	40,42	26,33
1473	Kota Dumai	49,89	49,78	6,67	41,92	21,95

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di	Perempuan sebagai tenaga	Sumbangan
		2011	2012	Parlemen (%)	Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
<b>1500</b>	<b>JAMBI</b>	<b>58,89</b>	<b>61,52</b>	<b>13,33</b>	<b>48,62</b>	<b>27,62</b>
1501	Kerinci	52,23	54,47	3,33	35,14	40,13
1502	Merangin	56,12	56,81	3,33	56,50	40,19
1503	Sarolangun	59,42	55,90	6,67	50,04	29,12
1504	Batanghari	70,59	71,86	20,00	49,45	33,59
1505	Muara Jambi	63,20	67,14	14,29	54,84	34,37
1506	Tanjung Jabung Timur	54,87	51,54	10,00	47,94	20,94
1507	Tanjung Jabung Barat	59,54	56,45	10,00	51,88	25,40
1508	Tebo	49,10	49,16	3,33	53,73	26,43
1509	Bungo	46,11	47,82	6,67	48,96	20,90
1571	Kota Jambi	55,35	55,34	8,89	44,84	26,44
1572	Kota Sungai Penuh	60,59	61,83	10,53	55,53	32,02
<b>1600</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>68,34</b>	<b>66,78</b>	<b>14,67</b>	<b>49,34</b>	<b>33,51</b>
1601	Ogan Komering Ulu	46,48	60,54	17,14	48,72	23,20
1602	Ogan Komering Ilir	46,36	49,03	6,67	59,34	23,88
1603	Muara Enim (Liot)	67,25	62,91	11,11	44,73	35,59
1604	Lahat	58,66	56,01	4,44	55,39	37,30
1605	Musi Rawas	55,88	49,72	7,50	41,75	24,06
1606	Musi Banyuasin	56,75	62,33	11,36	57,96	34,15
1607	Banyuasin	58,11	65,08	17,78	49,13	28,21
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	48,75	49,54	5,71	49,08	23,33
1609	Ogan Komering Ulu Timur	58,82	61,24	13,33	55,50	29,39
1610	Ogan Ilir	50,94	51,96	7,50	49,73	26,43
1611	Empat Lawang	70,27	64,46	20,00	70,38	33,95
1671	Kota Palembang	64,27	63,72	16,00	47,29	28,30
1672	Kota Prabumulih	49,29	49,31	8,00	46,18	22,88
1673	Kota Pagar Alam	48,17	53,10	12,00	51,58	21,29
1674	Kota Lubuk Linggau	63,13	63,94	20,00	46,67	26,43
<b>1700</b>	<b>BENGGULU</b>	<b>69,33</b>	<b>69,57</b>	<b>17,78</b>	<b>50,07</b>	<b>33,49</b>
1701	Bengkulu Selatan	61,45	62,06	8,00	58,99	40,66
1702	Rejang Lebong	62,42	56,69	13,33	50,23	23,30
1703	Bengkulu Utara	62,30	64,38	10,00	51,79	37,74
1704	Kaur	57,95	60,05	8,00	44,19	36,05
1705	Seluma	58,20	58,98	10,00	44,30	32,78
1706	Mukomuko	47,60	54,27	4,00	53,57	32,01
1707	Lebong	73,07	69,50	16,00	50,41	37,67
1708	Kepahiang	67,28	67,70	16,00	48,51	34,93
1709	Bengkulu Tengah	55,81	62,70	12,00	37,52	39,54
1771	Bengkulu	74,63	75,21	26,67	50,60	31,21

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
<b>1800</b>	<b>LAMPUNG</b>	<b>65,86</b>	<b>67,24</b>	<b>20,00</b>	<b>51,21</b>	<b>28,13</b>
1801	Lampung Barat	67,21	70,26	20,00	44,49	32,05
1802	Tanggamus	53,94	52,28	6,82	62,11	27,61
1803	Lampung Selatan	60,78	60,74	13,33	45,26	28,24
1804	Lampung Timur	62,49	62,15	13,33	55,80	30,88
1805	Lampung Tengah	58,34	58,39	10,00	49,78	29,13
1806	Lampung Utara	61,33	61,24	11,11	57,51	33,77
1807	Way Kanan	58,60	59,10	10,00	49,38	30,75
1808	Tulang Bawang	60,22	58,43	12,50	52,18	25,48
1809	Pesawaran	62,18	62,87	17,14	58,66	27,80
1810	Pringsewu	59,44	60,10	22,86	51,85	18,73
1811	Mesuji	67,87	69,15	25,00	53,74	26,96
1812	Tulang Bawang Barat	54,68	54,84	6,90	54,96	30,91
1871	Kota Bandar Lampung	62,82	63,42	13,33	49,27	30,83
1872	Kota Metro	75,74	76,24	28,00	51,42	33,45
<b>1900</b>	<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>56,03</b>	<b>56,54</b>	<b>11,11</b>	<b>45,73</b>	<b>23,61</b>
1901	Bangka	52,85	58,07	13,33	41,98	23,20
1902	Belitung	49,21	49,37	8,00	41,22	20,99
1903	Bangka Barat	56,29	58,28	12,00	55,21	25,61
1904	Bangka Tengah	44,54	45,08	4,00	47,93	20,72
1905	Bangka Selatan	43,77	45,79	8,00	49,94	19,25
1906	Belitung Timur	47,21	49,65	5,00	51,04	24,52
1971	Kota Pangkal Pinang	50,01	55,20	8,00	44,20	26,62
<b>2100</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>60,62</b>	<b>59,32</b>	<b>11,96</b>	<b>46,22</b>	<b>26,05</b>
2101	Karimun	49,93	50,14	6,67	58,11	23,95
2102	Kepulauan Riau	61,29	63,11	20,00	50,98	21,79
2103	Natuna	45,94	46,80	5,26	44,34	22,31
2104	Lingga	38,59	39,29	0,01	53,14	21,42
2105	Kepulauan Anambas	49,96	49,48	5,00	39,11	25,62
2171	Kota Batam	65,88	69,69	22,22	43,77	27,24
2172	Kota Tanjung Pinang	56,42	57,10	12,00	47,62	24,60
<b>3100</b>	<b>DKI JAKARTA</b>	<b>74,70</b>	<b>76,14</b>	<b>24,47</b>	<b>48,83</b>	<b>36,55</b>
3101	Kep. Seribu	63,35	63,75	24,47	52,74	23,43
3171	Kota Jakarta Selatan	74,70	76,01	24,47	45,10	34,47
3172	Kota Jakarta Timur	73,75	73,76	24,47	38,33	33,14
3173	Kota Jakarta Pusat	75,52	75,15	24,47	62,57	36,83
3174	Kota Jakarta Barat	74,18	75,00	24,47	42,37	33,42
3175	Kota Jakarta Utara	74,60	73,08	24,47	63,83	35,03

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di	Perempuan sebagai tenaga	Sumbangan
		2011	2012	Parlemen (%)	Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
3200	JAWA BARAT	68,08	68,62	24,00	38,76	27,69
3201	Bogor	59,46	61,35	18,00	34,51	26,04
3202	Sukabumi	58,29	56,88	16,00	30,45	25,83
3203	Cianjur	48,93	52,65	14,00	45,11	19,09
3204	Bandung	66,11	69,64	20,00	39,23	32,01
3205	Garut	64,68	65,16	16,00	46,81	29,57
3206	Tasikmalaya	57,86	57,79	14,29	39,67	25,69
3207	Ciamis	57,56	58,52	8,00	45,56	33,81
3208	Kuningan	55,91	58,04	12,00	43,57	27,08
3209	Cirebon	57,75	55,87	14,00	32,13	25,16
3210	Majalengka	52,48	55,77	12,00	47,49	24,33
3211	Sumedang	65,14	62,91	12,24	41,29	33,39
3212	Indramayu	56,50	54,84	22,00	27,70	19,54
3213	Subang	49,80	51,75	6,00	38,27	28,57
3214	Purwakarta	64,74	64,73	24,44	28,77	27,42
3215	Karawang	58,86	60,32	14,29	39,97	26,39
3216	Bekasi	56,81	54,95	14,00	34,38	23,15
3217	Kab Bandung Barat	71,03	68,76	20,83	34,15	32,60
3271	Kota Bogor	64,75	66,09	17,78	40,76	28,47
3272	Kota Sukabumi	53,58	52,26	10,00	33,57	25,19
3273	Kota Bandung	65,76	67,77	18,00	39,78	31,89
3274	Kota Cirebon	52,37	52,25	6,67	32,38	30,02
3275	Kota Bekasi	59,49	64,69	18,75	39,65	26,94
3276	Kota Depok	76,37	79,55	38,00	40,00	31,12
3277	Kota Cimahi	66,51	69,28	22,22	43,03	28,96
3278	Kota Tasikmalaya	50,60	55,23	6,67	40,17	31,23
3279	Kota Banjar	55,80	51,67	8,00	43,79	25,33

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
<b>3300</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>68,99</b>	<b>70,66</b>	<b>21,00</b>	<b>45,22</b>	<b>32,55</b>
3301	Cilacap	57,72	53,40	10,00	42,62	24,36
3302	Banyumas	67,64	57,52	12,00	34,26	29,44
3303	Purbalingga	67,47	61,74	15,56	40,78	28,73
3304	Banjarnegara	59,23	59,10	12,00	44,75	27,71
3305	Kebumen	65,63	64,97	24,00	46,53	23,29
3306	Purworejo	58,30	58,41	8,89	48,21	31,62
3307	Wonosobo	48,06	43,68	4,44	36,22	22,63
3308	Magelang	60,79	58,97	6,00	45,88	36,65
3309	Boyolali	68,82	69,39	15,56	49,23	39,44
3310	Klaten	70,41	65,37	12,00	49,76	36,32
3311	Sukoharjo	67,46	66,50	11,11	47,61	39,73
3312	Wonogiri	62,71	58,40	6,00	44,01	36,60
3313	Karanganyar	66,44	70,96	17,78	48,18	36,09
3314	Sragen	57,18	57,58	6,67	46,56	35,10
3315	Grobogan	57,45	51,75	10,00	44,89	23,08
3316	Blora	75,08	71,44	22,22	42,02	33,49
3317	Rembang	69,97	57,74	8,89	40,33	31,02
3318	Pati	63,63	59,20	12,00	41,63	29,65
3319	Kudus	66,05	68,10	13,33	51,24	40,12
3320	Jepara	47,23	49,58	8,00	45,67	22,57
3321	Demak	70,84	62,02	10,00	40,23	37,65
3322	Semarang	76,92	71,30	15,56	46,18	44,57
3323	Temanggung	72,00	71,83	17,78	42,83	39,73
3324	Kendal	64,65	64,57	16,00	33,84	32,92
3325	Batang	64,74	60,66	15,56	45,78	26,17
3326	Pekalongan	56,81	57,35	13,33	47,82	24,26
3327	Pemalang	69,95	66,55	18,00	37,25	33,19
3328	Tegal	51,70	51,16	6,00	42,54	26,71
3329	Brebes	53,95	48,99	8,00	38,09	23,16
3371	Kota Magelang	66,78	63,06	8,00	47,23	39,35
3372	Kota Surakarta	78,06	77,56	22,50	48,44	42,17
3373	Kota Salatiga	81,45	73,53	20,00	39,80	41,09
3374	Kota Semarang	64,48	62,59	10,00	53,80	35,00
3375	Kota Pekalongan	68,44	60,29	13,33	49,81	26,88
3376	Kota Tegal	69,18	67,44	23,33	36,49	28,06
<b>3400</b>	<b>DI YOGYAKARTA</b>	<b>77,84</b>	<b>75,57</b>	<b>21,82</b>	<b>43,83</b>	<b>39,55</b>
3401	Kulon Progo	61,15	59,23	10,00	54,18	32,07
3402	Bantul	68,46	68,52	13,33	45,39	38,87
3403	Gunung Kidul	62,22	64,58	13,33	42,06	37,64
3404	Sleman	70,52	69,66	16,00	42,23	36,72
3471	Kota Yogyakarta	70,00	70,70	15,00	42,68	42,97

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
3500	JAWA TIMUR	68,62	69,29	18,00	46,81	33,52
3501	Pacitan	67,61	68,38	15,56	50,06	37,55
3502	Ponorogo	67,58	65,84	14,00	48,66	33,91
3503	Trenggalek	64,92	66,06	13,33	53,30	35,50
3504	Tulungagung	52,67	53,00	2,00	46,39	36,70
3505	Blitar	63,33	66,65	11,32	56,93	39,45
3506	Kediri	72,20	72,24	26,00	53,40	29,74
3507	Malang	69,51	70,45	18,00	56,12	35,67
3508	Lumajang	47,99	45,78	8,00	65,37	22,69
3509	Jember	58,76	61,63	14,29	43,81	29,96
3510	Banyuwangi	65,50	64,81	16,00	53,42	30,38
3511	Bondowoso	55,45	54,06	4,44	38,75	36,88
3512	Situbondo	68,09	69,29	26,67	47,42	26,97
3513	Probolinggo	57,01	58,40	16,00	46,42	24,22
3514	Pasuruan	73,85	75,24	24,00	51,25	35,97
3515	Sidoarjo	63,21	64,59	16,00	46,24	28,48
3516	Mojokerto	70,47	71,00	20,00	39,76	35,01
3517	Jombang	49,69	51,21	6,00	47,42	26,24
3518	Nganjuk	57,92	56,79	16,00	37,87	23,67
3519	Madiun	56,90	57,77	11,11	53,14	28,57
3520	Magetan	64,65	65,87	13,33	47,30	36,44
3521	Ngawi	66,39	66,71	20,00	54,39	30,56
3522	Bojonegoro	58,28	59,27	18,00	40,82	24,65
3523	Tuban	62,91	64,46	18,00	55,88	28,76
3524	Lamongan	56,62	57,18	8,00	47,32	32,23
3525	Gresik	63,56	63,44	14,00	45,01	30,80
3526	Bangkalan	50,20	48,58	2,22	38,69	33,01
3527	Sampang	43,26	44,18	2,22	33,90	28,76
3528	Pamekasan	51,85	51,04	4,44	39,28	32,10
3529	Sumenep	54,74	55,52	6,00	38,91	35,68
3571	Kota Kediri	71,92	74,31	23,33	48,57	33,99
3572	Kota Blitar	68,47	69,39	16,00	48,91	35,26
3573	Kota Malang	78,75	74,50	24,44	44,80	33,63
3574	Kota Probolinggo	76,14	77,10	33,33	52,05	29,98
3575	Kota Pasuruan	56,50	57,42	8,00	47,33	29,79
3576	Kota Mojokerto	64,46	65,15	12,00	52,45	35,25
3577	Kota Madiun	79,21	79,96	33,33	43,03	37,13
3578	Kota Surabaya	77,09	78,02	30,00	43,14	33,81
3579	Kota Batu	75,01	76,10	32,00	47,99	29,09

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
<b>3600</b>	<b>BANTEN</b>	<b>66,58</b>	<b>65,53</b>	<b>17,65</b>	<b>39,34</b>	<b>29,56</b>
3601	Pandeglang	58,63	59,65	12,00	38,76	29,43
3602	Lebak	59,50	63,09	14,00	41,93	29,69
3603	Tangerang	52,88	55,41	10,00	35,69	27,21
3604	Serang	50,08	54,21	10,00	41,86	24,81
3671	Kota Tangerang	65,17	64,60	14,00	43,49	30,42
3672	Kota Cilegon	57,79	55,16	14,29	48,20	19,89
3673	Kota Serang	64,04	63,50	17,78	38,09	26,69
3674	Kota Tangerang Selatan	60,46	59,94	17,78	36,00	24,34
<b>5100</b>	<b>BALI</b>	<b>58,59</b>	<b>58,49</b>	<b>7,27</b>	<b>39,50</b>	<b>35,21</b>
5101	Jembrana	71,76	68,93	20,00	32,61	37,98
5102	Tabanan	55,16	54,43	5,00	38,22	34,46
5103	Badung	53,24	54,76	2,50	47,79	35,28
5104	Gianyar	59,42	57,72	7,50	34,90	35,41
5105	Klungkung	66,78	67,81	12,00	40,11	42,97
5106	Bangli	63,39	64,22	13,33	35,55	35,61
5107	Karangasem	57,69	56,75	5,00	32,58	41,03
5108	Buleleng	61,22	58,14	8,89	31,76	37,51
5171	Kota Denpasar	55,74	56,28	2,22	42,38	39,84
<b>5200</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>56,57</b>	<b>57,90</b>	<b>10,91</b>	<b>40,92</b>	<b>30,15</b>
5201	Lombok Barat	43,06	50,50	4,44	39,62	31,14
5202	Lombok Tengah	48,39	48,65	6,67	29,27	32,95
5203	Lombok Timur	59,57	59,19	8,00	39,78	42,51
5204	Sumbawa	52,92	57,69	5,00	48,27	35,72
5205	Dompu	60,94	62,50	10,71	47,61	32,70
5206	Bima	43,00	44,79	2,50	52,06	25,25
5207	Sumbawa Barat	40,01	40,23	4,00	43,11	18,57
5208	Lombok Utara	41,87	39,49	4,00	27,53	25,41
5271	Kota Mataram	54,40	57,60	8,57	39,26	31,99
5272	Kota Bima	58,41	58,19	8,00	41,66	36,45

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
<b>5300</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>58,90</b>	<b>59,55</b>	<b>7,27</b>	<b>47,22</b>	<b>40,29</b>
5301	Sumba Barat	46,43	47,81	0,01	51,58	32,36
5302	Sumba Timur	65,94	66,51	13,33	51,07	40,41
5303	Kupang	60,53	61,49	11,43	45,75	33,44
5304	Timor Tengah Selatan	55,53	55,96	12,50	42,84	26,77
5305	Timor Tengah Utara	58,78	64,21	13,33	51,91	36,19
5306	Belu	68,21	67,98	20,00	39,00	36,38
5307	Alor	51,94	54,80	4,00	46,36	40,43
5308	Lembata	58,78	60,45	8,00	50,11	43,73
5309	Flores Timur	58,48	59,15	6,67	56,28	42,53
5310	Sikka	53,17	53,92	6,67	53,27	34,34
5311	Ende	63,66	64,00	10,00	54,10	52,79
5312	Ngada	63,06	63,46	10,00	44,20	43,65
5313	Manggarai	62,38	61,24	10,00	37,99	44,04
5314	Rote Nda	58,14	65,11	16,00	42,67	34,64
5315	Manggarai Barat	47,70	48,60	0,01	45,52	38,35
5316	Sumba Barat Daya	59,88	51,91	0,01	49,04	40,89
5317	Sumba Tengah	60,78	61,37	6,67	50,40	45,99
5318	Nageko	49,14	51,70	0,01	56,89	46,94
5319	Manggarai Timur	39,30	46,04	3,33	32,80	33,44
5320	Sabu Raijua	56,64	39,42	0,01	62,62	33,94
5371	Kota Kupang	54,84	55,37	3,33	44,89	35,77
<b>6100</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>56,39</b>	<b>59,34</b>	<b>7,27</b>	<b>45,37</b>	<b>34,02</b>
6101	Sambas	59,66	61,48	11,11	42,12	34,95
6102	Bengkayang	62,15	60,97	10,34	39,91	34,82
6103	Landak	57,65	57,42	5,71	41,47	36,26
6104	Pontianak	53,73	55,00	4,44	42,80	34,16
6105	Sanggau	58,12	59,20	14,29	27,52	32,64
6106	Ketapang	49,29	50,00	5,00	47,08	25,64
6107	Sintang	59,50	61,78	11,43	47,37	32,04
6108	Kapuas Hulu	60,57	60,58	6,67	42,53	38,95
6109	Sekadau	59,19	60,00	8,00	41,86	37,43
6110	Melawai	39,13	45,73	0,01	35,32	33,35
6111	Kayong Utara	45,86	44,43	0,01	37,71	30,42
6112	Kubu Raya	53,97	54,80	4,44	45,70	33,36
6171	Kota Pontianak	64,40	64,95	13,33	52,89	32,99
6172	Kota Singkawang	53,34	54,19	8,00	47,14	26,67

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
<b>6200</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>69,48</b>	<b>70,35</b>	<b>17,78</b>	<b>43,55</b>	<b>32,92</b>
6201	Kotawaringin Barat	58,96	60,92	16,67	42,74	22,36
6202	Kotawaringin Timur	60,82	60,27	14,71	35,99	24,80
6203	Kapuas	55,99	58,94	11,43	42,64	27,65
6204	Barito Selatan	76,98	76,95	24,00	44,88	37,58
6205	Barito Utara	78,56	78,91	24,00	49,08	41,99
6206	Sukamara	58,55	59,58	20,00	43,84	18,14
6207	Lamandau	49,31	50,45	5,00	37,19	25,12
6208	Seruyan	63,33	62,32	16,00	35,61	25,31
6209	Katingan	64,16	64,71	16,00	39,79	28,32
6210	Pulang Pisau	67,22	66,51	28,00	38,76	21,45
6211	Gunung Mas	83,08	81,58	35,00	61,61	56,63
6212	Barito Timur	65,23	66,16	10,53	46,08	40,05
6213	Murung Raya	58,71	59,15	10,00	44,19	28,10
6271	Kota Palangka Raya	62,39	63,35	12,00	52,73	31,03
<b>6300</b>	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>66,61</b>	<b>68,40</b>	<b>16,36</b>	<b>42,16</b>	<b>34,48</b>
6301	Tanah Laut	63,96	64,46	16,67	44,39	27,62
6302	Kota Baru	68,68	66,24	22,86	32,03	25,55
6303	Banjarnegara	70,31	71,13	20,00	48,70	32,00
6304	Barito Kuala	63,39	57,41	3,33	49,97	40,17
6305	Tapin	71,44	75,39	20,00	46,18	45,93
6306	Hulu Sungai Selatan	54,29	54,60	10,00	44,43	24,89
6307	Hulu Sungai Tengah	76,03	76,30	20,00	50,21	49,76
6308	Hulu Sungai Utara	52,21	56,23	10,00	56,06	28,40
6309	Tabalong	65,25	65,89	20,00	39,41	27,44
6310	Tanah Bumbu	51,50	48,92	2,86	33,47	29,68
6311	Balangan	58,53	58,86	8,00	46,28	34,20
6371	Kota Banjarmasin	78,77	78,30	28,89	39,79	36,85
6372	Kota Banjar Baru	61,79	61,31	12,00	38,94	29,81
<b>6400</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>61,29</b>	<b>61,84</b>	<b>20,00</b>	<b>39,17</b>	<b>21,10</b>
6401	Pasir	56,08	54,51	12,00	37,18	21,75
6402	Kutai Barat	47,77	53,70	8,00	44,90	23,95
6403	Kutai	45,81	46,04	4,44	35,86	22,50
6404	Kutai Timur	54,92	48,56	13,33	32,15	16,26
6405	Berau	49,53	50,34	12,00	48,74	16,08
6406	Malinau	56,97	61,24	15,00	30,93	25,93
6407	Bulungan	58,49	57,68	16,00	35,54	20,86
6408	Nunukan	72,04	68,93	24,00	35,95	25,33
6409	Penajam Paser Utara	63,69	63,98	20,00	39,98	23,79
6410	Tana Tidung	58,83	58,68	15,00	39,44	20,81
6471	Kota Balikpapan	58,62	68,94	24,44	45,42	23,92
6472	Kota Samarinda	57,49	55,60	6,67	38,68	29,11
6473	Kota Tarakan	58,05	49,79	8,00	30,10	23,98
6474	Kota Bontang	59,11	59,06	24,00	42,54	16,49

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
<b>7100</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>73,34</b>	<b>75,00</b>	<b>28,89</b>	<b>52,02</b>	<b>29,36</b>
7101	Bolaang Mongondow	67,75	65,26	20,00	62,79	28,07
7102	Minahasa	78,27	79,21	28,57	52,35	37,53
7103	Kep.Sangihe Talaud	60,96	62,83	16,00	51,37	26,61
7104	Kepulauan Talaud	55,14	61,57	15,00	48,10	26,27
7105	Minahasa Selatan	66,59	66,94	20,00	62,63	30,69
7106	Minahasa Utara	71,20	78,74	32,00	51,14	33,32
7107	Bolaang Mongondow Utara	51,33	51,98	5,00	47,40	27,75
7108	Kep. Siau Tagulandang Biaro	78,75	76,88	32,00	64,03	33,74
7109	Minahasa Tenggara	46,59	70,26	25,00	61,83	32,57
7110	Bolaang Mongondow Selatan	60,24	54,10	15,00	26,34	26,54
7111	Bolaang Mongondow Timur	64,71	64,98	25,00	57,56	22,34
7171	Manado	63,55	71,41	20,00	49,74	33,22
7172	Kota Bitung	60,46	70,62	28,00	52,18	24,84
7173	Kota Tomohon	78,40	79,72	35,00	48,41	33,61
7174	Kota Kotamobago	62,75	63,97	20,00	50,49	24,22
<b>7200</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>66,08</b>	<b>67,96</b>	<b>20,00</b>	<b>50,03</b>	<b>28,29</b>
7201	Banggai Kepulauan	68,22	69,27	16,00	39,85	43,79
7202	Banggai	61,65	62,84	17,14	44,04	26,42
7203	Morowali	58,31	58,77	12,00	49,27	25,44
7204	Poso	46,56	47,19	0,01	50,90	29,85
7205	Donggala	44,38	68,29	20,69	55,15	28,41
7206	Toli-Toli	61,86	62,79	20,00	54,54	23,78
7207	Buol	63,20	65,01	24,00	51,85	23,00
7208	Parigi Moutong	53,41	52,12	15,00	70,46	22,57
7209	Tojo Una-Una	40,38	40,73	0,01	61,60	25,07
7210	Sigi	61,25	65,06	16,67	48,22	31,20
7271	Kodya Palu	70,45	70,58	20,00	44,56	32,61

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
<b>7300</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>63,38</b>	<b>63,88</b>	<b>16,00</b>	<b>51,94</b>	<b>29,73</b>
7301	Selayar	70,30	70,56	28,00	61,56	30,62
7302	Bulukumba	58,53	60,81	12,50	59,55	33,11
7303	Bantaeng	74,73	74,50	28,00	58,89	33,91
7304	Jeneponto	58,02	55,32	11,43	65,91	29,22
7305	Takalar	60,51	62,65	20,00	61,55	27,43
7306	Gowa	73,23	74,71	28,89	48,46	31,19
7307	Sinjai	59,77	56,40	13,33	68,28	31,34
7308	Maros	60,54	61,10	17,14	52,45	25,52
7309	Pangkajene Kepulauan	58,93	56,66	8,57	51,13	31,38
7310	Barru	61,67	63,12	24,00	56,43	23,74
7311	Bone	65,37	60,59	15,56	64,41	30,44
7312	Soppeng	59,75	60,51	13,33	55,63	30,82
7313	Wajo	59,49	59,67	17,14	50,88	25,18
7314	Sidenreng Rappang	47,93	47,95	3,33	59,01	28,79
7315	Pinrang	62,13	62,10	11,43	54,34	33,84
7316	Enrekang	57,52	61,77	10,00	50,83	34,52
7317	Luwu	63,76	59,92	8,57	57,36	35,70
7318	Tana Toraja	64,44	65,88	13,33	45,03	37,25
7322	Luwu Utara	39,29	39,77	2,86	49,47	18,25
7325	Luwu Timur	43,12	43,61	3,33	45,55	21,27
7326	Toraja Utara	62,83	62,72	13,33	47,53	32,63
7371	Kota Makasar	65,26	66,10	14,00	46,02	33,84
7372	Kota Pare Pare	62,80	63,70	16,00	48,73	29,04
7373	Kota Palopo	68,38	69,84	20,00	53,97	33,40
<b>7400</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>65,26</b>	<b>65,86</b>	<b>15,56</b>	<b>44,69</b>	<b>33,39</b>
7401	Buton	66,80	60,11	12,00	47,89	31,08
7402	Muna	57,97	59,66	10,00	49,44	34,46
7403	Konawe/Kab Kendari	64,24	64,50	13,33	46,28	34,27
7404	Kolaka	57,52	55,32	11,43	46,83	23,06
7405	Konawe Selatan	56,33	57,55	10,00	45,85	28,64
7406	Bombana	54,67	55,19	12,00	46,39	24,92
7407	Wakatobi	56,77	56,39	8,00	43,50	36,48
7408	Kolaka Utara	48,81	49,14	4,00	54,64	26,49
7409	Konawe Utara	65,43	66,36	15,00	42,82	37,87
7410	Buton Utara	54,57	55,27	5,00	40,99	34,55
7471	Kota Kendari	79,37	79,11	33,33	41,22	34,20
7472	Kota Bau-Bau	59,10	55,38	12,00	34,84	28,69

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
<b>7500</b>	<b>GORONTALO</b>	<b>62,12</b>	<b>62,08</b>	<b>20,00</b>	<b>57,62</b>	<b>24,35</b>
7501	Boalemo	50,74	50,20	8,00	64,19	26,86
7502	Gorontalo	56,02	57,38	15,00	59,15	24,97
7503	Pokuwato	74,32	72,05	24,00	63,70	35,70
7504	Bone Bolango	44,70	51,58	8,00	64,96	28,10
7505	Gorontalo Utara	51,50	51,71	8,00	56,53	24,99
7571	Kota Gorontalo	68,76	69,23	24,00	49,82	29,07
<b>7600</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>63,71</b>	<b>64,25</b>	<b>11,11</b>	<b>51,65</b>	<b>35,94</b>
7601	Majene	68,38	68,04	16,00	60,42	37,22
7602	Polewali Mamasa	65,56	67,16	15,00	51,92	36,17
7603	Mamasa	46,84	47,72	4,00	43,12	25,14
7604	Mamuju	60,58	61,14	14,29	53,14	26,74
7605	Mamuju Utara	51,47	51,46	12,00	43,77	19,20
<b>8100</b>	<b>MALUKU</b>	<b>76,51</b>	<b>78,72</b>	<b>31,82</b>	<b>49,68</b>	<b>35,58</b>
8101	Maluku Tenggara Barat	57,65	58,29	5,00	49,90	46,46
8102	Maluku Tenggara	51,84	52,76	4,00	47,44	33,12
8103	Maluku Tengah	59,69	60,64	11,43	60,41	33,36
8104	Buru	56,68	56,24	12,00	34,92	27,93
8105	Kepulauan Aru	50,22	51,03	0,01	48,73	39,69
8106	Seram Bagian Barat	59,56	57,11	8,00	61,20	35,59
8107	Seram Bagian Timur	44,41	44,88	0,01	48,74	29,97
8108	Maluku Barat Daya	53,81	54,70	5,00	47,25	37,86
8109	Buru Selatan	59,09	59,57	5,00	46,53	55,69
8171	Kota Ambon	55,77	56,46	2,86	44,90	39,33
8172	Kota Tual	47,80	48,96	5,00	50,09	24,07
<b>8200</b>	<b>MALUKU UTARA</b>	<b>59,38</b>	<b>64,51</b>	<b>13,33</b>	<b>47,85</b>	<b>35,36</b>
8201	Halmahera Barat	64,50	62,80	16,00	61,52	32,15
8202	Halmahera Tengah	65,41	65,66	20,00	45,77	28,06
8203	Kepulauan Sula	47,79	48,33	4,00	51,27	27,65
8204	Halmahera Selatan	40,20	40,31	3,33	42,50	20,16
8205	Halmahera Utara	63,97	64,09	20,00	52,06	26,01
8206	Halmahera Timur	40,64	41,56	0,01	52,74	24,35
8207	Pulau Morotai	58,72	53,16	15,00	29,03	26,05
8271	Kota Ternate	67,94	67,91	16,00	43,93	33,38
8272	Kota Tidore Kepulauan	58,96	58,66	10,00	55,12	31,84

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender		Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
		2011	2012			
<b>9100</b>	<b>PAPUA BARAT</b>	<b>57,54</b>	<b>58,46</b>	<b>15,91</b>	<b>38,81</b>	<b>23,66</b>
9101	Fak-Fak	52,47	55,91	10,00	45,19	26,79
9102	Kaimana	53,81	54,91	10,00	28,27	31,59
9103	Teluk Wondama	39,46	51,04	20,00	20,93	20,75
9104	Teluk Bintuni	38,09	34,33	0,01	29,81	19,36
9105	Manokwari	40,60	42,19	4,00	30,77	24,47
9106	Sorong Selatan	54,00	58,74	20,00	29,51	25,40
9107	Sorong	43,35	41,67	5,00	35,63	19,69
9108	Raja Ampat	48,94	40,61	10,53	21,54	21,64
9109	Tambrauw	31,61	37,64	0,01	37,45	40,65
9110	Maybrat	50,51	40,74	0,01	48,82	72,64
9171	Kota Sorong	50,79	50,95	6,67	48,43	22,85
<b>9400</b>	<b>PAPUA</b>	<b>57,74</b>	<b>57,76</b>	<b>8,93</b>	<b>31,56</b>	<b>35,36</b>
9401	Merauke	71,24	69,93	20,00	36,81	36,24
9402	Jayawijaya	54,87	48,48	10,00	16,44	55,26
9403	Jayapura	55,88	58,73	8,00	43,27	30,56
9404	Nabire	56,43	53,99	8,00	27,98	32,07
9408	Yapen Waropen	49,99	49,29	0,01	39,96	33,54
9409	Biak Namfor	47,83	49,16	4,00	45,89	28,28
9410	Paniai	50,27	49,77	3,33	28,19	44,49
9411	Puncak Jaya	68,48	67,29	20,83	22,38	38,34
9412	Mimika	54,33	53,04	12,00	29,74	20,20
9413	Boven Digoel	41,59	44,89	0,01	34,98	31,46
9414	Mappi	61,01	54,17	10,00	24,77	38,16
9415	Asmat	31,44	37,38	5,00	13,53	33,21
9416	Yahukimo	38,27	50,26	5,71	24,00	45,08
9417	Pegunungan Bintang	60,63	62,13	15,00	25,92	40,63
9418	Tolikara	43,63	40,27	6,67	10,03	54,37
9419	Sarmi	56,66	56,73	5,00	33,26	37,80
9420	Keerom	62,03	60,62	10,00	35,24	31,52
9426	Waropen	59,63	58,38	10,00	32,73	33,21
9427	Supiori	67,63	66,73	30,00	24,95	29,72
9428	Membramo Raya	59,74	59,98	10,00	35,75	59,00
9429	Nduga	70,02	68,99	20,00	30,64	43,84
9430	Lanny Jaya	62,70	63,63	16,00	30,64	39,56
9431	Mamberamo Tengah	52,43	52,79	5,00	30,64	45,34
9432	Yalimo	47,90	43,40	5,00	17,69	49,43
9433	Puncak	49,25	48,86	10,53	20,22	33,84
9434	Dogiyai	38,53	39,78	5,00	18,11	36,04
9435	Intan Jaya	49,73	49,96	0,01	39,35	47,77
9436	Deiyai	20,24	20,43	0,01	5,61	32,34
9471	Kota Jayapura	72,63	71,45	20,69	35,79	32,27
<b>INDONESIA</b>		<b>69,14</b>	<b>70,07</b>	<b>18,04</b>	<b>45,22</b>	<b>34,70</b>



# Catatan Teknis



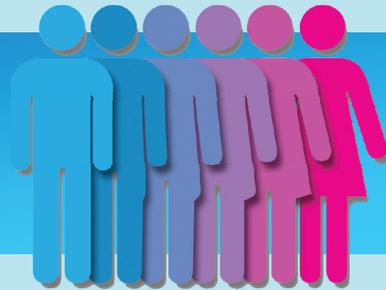


• **Metode Penghitungan Indeks Komposit**



• **Diagram Penghitungan Indeks Komposit**

# Catatan Teknis



# Metode Penghitungan Indeks Komposit

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak (lihat Diagram 1). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas dan dalam, karena terkait banyak faktor didalamnya. Meski demikian, secara sederhana dapat diterjemahkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:

### Lamanya hidup/Angka Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan sehat mencerminkan aspek kesehatan, pada cakupan lebih luas merupakan ukuran kinerja pembangunan sektor kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi capaian dari dimensi umur panjang dan sehat adalah angka umur harapan hidup (*life expectancy*). Angka umur harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan *life table*. Pada publikasi ini angka umur harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect*). Jenis data masukan yang digunakan untuk menghitung angka umur harapan hidup terdapat dua (2) jenis, yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Paket program *Mortpack* dapat membantu menghitung angka harapan hidup dengan *input* data ALH dan AMH. Metode yang dipilih adalah metode *Trussel* dengan model *West* karena sesuai/cocok dengan kondisi Indonesia.

## Tingkat Pendidikan

Dimensi pengetahuan menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk dewasa; yakni penduduk berusia 15 tahun ke atas. Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua (2) indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*means years schooling*) dan angka melek huruf. Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberikan bobot dua pertiga.

## Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP untuk mengukur standar hidup layak menggunakan GDP riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula *Atkinson*.

$$\begin{aligned}
 C(i) &= C(i) && \text{Jika } C(i) < Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)1/2 && \text{Jika } Z < C(i) < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)1/2 + 3(C(i) - 2Z)1/3 && \text{Jika } 2Z < C(i) < 3Z
 \end{aligned}$$

dan seterusnya.

*Dimana*

$C(i)$  = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

$Z$  = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.549.500 per kapita per tahun atau Rp. 1.500 per kapita per hari

Sumber data yang digunakan untuk menghitung standar hidup layak adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

## Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

$X_{(i,j)}$  = Indeks komponen ke- $i$  dari daerah  $j$

$X_{(i-\min)}$  = Nilai minimum dari  $X_i$

$X_{(i-\max)}$  = Nilai maksimum dari  $X_i$

Untuk menghitung indeks setiap komponen, batas nilai minimum dan maksimum setiap komponen IPM ditentukan berdasarkan standar sebagai berikut:

**Table A. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen**

Komponen IPM	Max	Min	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata2 Lama Sekolah	15	0	
4. Daya Beli	732,720 <sup>a</sup>	300,000 (1996) 360,000 <sup>b</sup> (1999, 2002)	Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan

*Keterangan:*

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_j \text{Indeks } X_{(i,j)}$$

Dimana:

Indeks  $X_{(i,j)}$  = Indeks komponen IPM ke  $i$  untuk wilayah ke  $j$ ;

$i$  = 1, 2, 3

$j$  = 1, 2, .....  $k$  wilayah

## Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender (lihat Diagram 2). IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

### Penyusunan Indeks

1. Indeks dari setiap komponen IPG dihitung dengan menggunakan batas maksimum dan minimum sebagai berikut:

**Table B. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPG**

	Maksimum		Minimum	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup	82,5	87,5	22,5	27,5
Angka Melek Huruf	100	100	0	0
Rata-Rata Lama Sekolah	15	15	0	0
Konsumsi per Kapita	732.720		300.000 (1996) 360.000 (1999, 2002)	

Keterangan : L = laki-laki    P = Perempuan

## 2. Menghitung nilai $X_{ede}$ dari tiap indeks

$$X_{ede} = [P_f X_f^{(1-\varepsilon)} + P_m X_m^{(1-\varepsilon)}]$$

- dimana  $X_f$  : Pencapaian perempuan  
 $X_m$  : Pencapaian laki-laki  
 $P_f$  : Proporsi penduduk perempuan  
 $P_m$  : proporsi penduduk laki-laki

## 3. Menghitung IPG dengan rumus

$$IPG = 1/3 (X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{Inc-dis})$$

- dimana  $X_{ede(1)}$  :  $X_{ede}$  untuk harapan hidup  
 $X_{ede(2)}$  :  $X_{ede}$  untuk Pendidikan  
 $I_{Inc-dis}$  : Indeks distribusi pendapatan

## Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Selanjutnya, dimensi IDG direpresentasikan oleh indikator-indikator seperti yang terlihat pada Diagram 3.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut.

## Penyusunan Indeks

### 1. Indeks keterwakilan di parlemen ( $I_{par}$ )

$$EDEP_{(par)} = \{(X_f)(Y_f)^{-1} + (X_m)(Y_m)^{-1}\}^{-1}$$

$$I_{(par)} = \{EDEP_{(par)}\}/50$$

dimana

$X_f$  = proporsi penduduk perempuan

$X_m$  = proporsi penduduk laki-laki

$Y_f$  = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

$Y_m$  = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

### 2. Indeks pengambilan keputusan ( $IDM$ )

$$EDEP_{(DM)} = \{(X_f)(Z_f)^{-1} + (X_m)(Z_m)^{-1}\}^{-1}$$

$$I_{(DM)} = \{EDEP_{(DM)}\}/50$$

dimana

$Z_f$  = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

$Z_m$  = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

### 3. Indeks distribusi pendapatan ( $I_{inc-dis}$ )

Sebagaimana disajikan pada penghitungan IPG di atas.

### 4. Indeks pemberdayaan gender

$$IDG = 1/3 (I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{inc-dis})$$

# Diagram Penghitungan Indeks Komposit

Diagram Penghitungan IPM

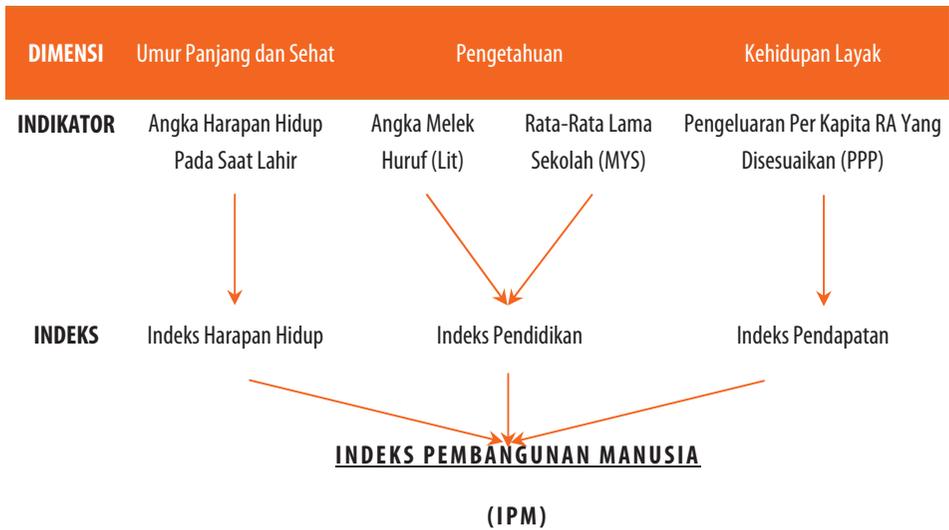
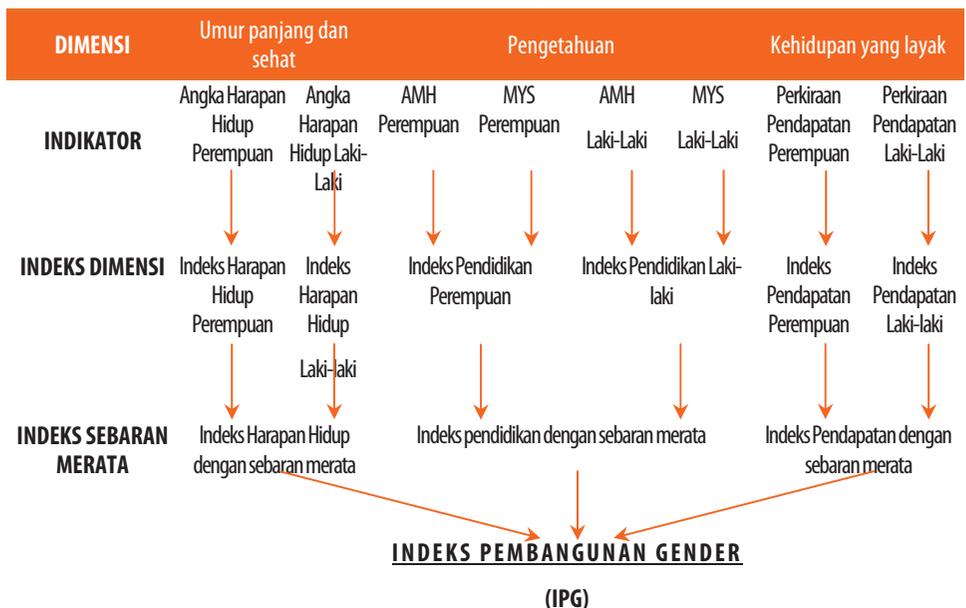


Diagram Penghitungan IPG



### Diagram Penghitungan IDG

